

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

**TINJAUAN
HUKUM
DI INDONESIA**

BUKU AJAR KRIMINOLOGI

**TINJAUAN
HUKUM
DI INDONESIA**

Bambang Slamet Riyadi



LPU-UNAS

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Copyright : **Bambang Slamet Riyadi**

Buku Ajar Kriminologi - TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta 2017, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan, Februari 2017

ISBN : 978-623-7273-55-4

Editor : Tim LPU UNAS

Setter : Tim LPU UNAS

Desain Cover : Tim LPU UNAS

Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)

Jl. Sawo Manila, No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telepon : (021) 78837310/7806700 (Hunting) ext. 172

E-mail : bee_bers@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya buku ajar ini dapat diterbitkan dalam rangka menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Penyusun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan rekan-rekan dosen yang telah mendorong dan mendukung sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan.

Buku ajar ini adalah sebuah karya tulis yang akan digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa sehingga dapat dipergunakan untuk lebih memahami dan mendalami materi yang dibahas. Meskipun telah disediakan buku ajar, mahasiswa tetap perlu membaca literatur atau bahan kepustakaan yang dilampirkan pada setiap bab karena buku ini merupakan bahan awal yang sebaiknya dikembangkan lebih jauh melalui belajar mandiri dan diskusi.

Penyusun menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan pada isi buku ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan untuk mendapatkan masukan dari semua pihak demi penyempurnaan buku ini. Semoga buku ajar yang sederhana ini bermanfaat dalam menambah dan memperkaya pengetahuan bagi para pembaca dan mahasiswa yang menggunakan.

Salam,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB 1 Kriminologi: Latar Belakang Produksi dan Konsumsi Pengetahuan Tentang Kejahatan Dan Keadilan	1
1.1 Ruang Lingkup Kriminologi	8
1.2 Tujuan Kriminologi	16
1.3 Praktik Kriminologi	26
1.4 Rangkuman	32
1.5 Bahan Diskusi	34
BAB 2 Kriminologi dalam Pandangan Teori Sosiologi	47
2.1 Penyimpangan dan Aturan Sosial	47
2.1.1 Penerapan dalam Hukum di Indonesia	52
2.2 Anomi dan Teori Kontrol	53
2.2.1 Penerapan dalam Hukum di Indonesia	59
2.3 Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>) dalam Kriminologi	65
2.3.1 Penerapan dalam Hukum di Indonesia	68
2.4 Teori Aktivitas Rutin (<i>Routine Activities Theory</i>) dalam Kriminologi ...	69
2.4.1 Penerapan dalam Hukum di Indonesia	71
2.5 Teori Pelabelan (<i>Labeling Theory</i>) dalam Kriminologi	73
2.5.1 Penerapan dalam Hukum di Indonesia	79
2.6 Bahan Diskusi	81
BAB 3 Bentuk-Bentuk Kriminalitas dalam Kriminologi	99
3.1 Kejahatan dengan Tindak Kekerasan (<i>Violent Crimes</i>)	99
3.1.1 Tindak Kekerasan dalam Kehidupan Politik dan Negara ...	101
3.1.2 Tindak Kekerasan dalam Perusahaan (<i>Corporate Violence</i>) ...	102
3.1.3 Tindak Kekerasan antarpribadi (<i>Interpersonal Violence</i>) ...	103
3.2 Kejahatan Terorganisasi di Masyarakat	105

3.3	Kejahatan Ekonomi dan Bisnis: kejahatan Kerah Putih dan Korporat	107
3.4	Penerapan dalam Hukum di Indonesia	110
3.5	Bahan Diskusi	112
BAB 4 Tindak Kejahatan Daring atau Hibrida dan Dampak Terhadap Korban		117
4.1	Pesan Seks (<i>Sexting</i>)	118
4.2	Korban Kejahatan pada Penguntitan di Dunia Maya (<i>Cyberstalking</i>)	123
4.3	Korban Kejahatan Peretasan/Penyalahgunaan Jaringan Komputer (<i>Hacking Victimization</i>)	125
4.4	Korban Kejahatan Pencurian Identitas (<i>Identity Theft</i>)	129
4.5	Risiko Kredibilitas pada Kejahatan Perangkat Lunak Berbahaya (<i>Malware Victimization</i>)	132
4.6	Eksplotasi Seksual pada Korban Pornografi Anak (<i>Child Pornography Victimization</i>)	135
4.7	Rangkuman	136
4.8	Bahan Diskusi	140
BAB 5 Objek Kriminalitas pada Kejahatan Personal dan Properti		149
5.1	Penghilangan Nyawa Orang Lain	149
5.2	Korban dan Dampak Kejahatan Penyerangan	153
5.3	Korban dan Dampak Kejahatan Perampokan dengan Kekerasan (<i>Robbery</i>)	155
5.4	Korban dan Dampak Kejahatan Perampokan dengan Pembobolan (<i>Burglary</i>)	158
5.5	Korban dan Dampak Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor ..	160
5.6	Korban dan Dampak Kejahatan Pembakaran Disengaja	162
5.7	Korban dan Dampak Kejahatan Pengambilan yang Melanggar Hukum (<i>Larceny-theft</i>)	164
5.8	Dampak Viktimisasi dalam Kehidupan Korban	170
5.9	Bahan Diskusi	173

BAB 1

KRIMINOLOGI: LATAR BELAKANG PRODUKSI DAN KONSUMSI PENGETAHUAN TENTANG KEJAHATAN DAN KEADILAN

Perkembangan teori dan pengetahuan ilmu sosial terjadi tidak hanya di dalam kepala individu, tetapi dalam domain kelembagaan tertentu. Domain-domain ini, pada gilirannya, dibentuk oleh lingkungannya: bagaimana institusi akademik diatur, bagaimana disiplin ilmu dibagi dan dibagi, bagaimana perselisihan muncul, bagaimana penelitian didanai, dan bagaimana temuan dipublikasikan dan digunakan. Dalam kriminologi, pemahaman tentang domain kelembagaan ini sangat penting karena pengetahuan terletak tidak hanya, atau bahkan terutama, di dunia akademis yang 'murni', tetapi dalam domain terapan aparat pengontrol kejahatan negara. (Cohen, 1988: 67)

Tiga dekade lalu, pada tahun 1981, **Stanley Cohen** menerbitkan laporan tentang keadaan kriminologi saat ini dan sosiologi penyimpangan di Inggris. Makalah yang berjudul *Footprints in the Sand* itu menguraikan visi dan pembagian bidang penelitian ilmiah sosial dan pengajaran tentang kejahatan seperti yang diamati Cohen pada saat itu. Cohen menggambarkan lokasi institusional, afiliasi disipliner, dan memandu keasyikan dari apa yang disebutnya sebagai 'kriminologi Inggris arus utama', dan memetakan beberapa perubahan kunci yang terjadi selama tahun 1970-an. Dia juga

memetakan pembentukan dan perkembangan terpecah-pecah dari *National Deviancy Conference* dan mengemukakan ide-ide yang menantang, dan berusaha untuk melampaui, parokialisme kriminologi konvensional. Kesimpulannya adalah bahwa sementara di tepi bidang akademis ide-ide baru sedang diserap dan akomodasi dibuat, sedikit yang terjadi untuk merusak kepercayaan diri kolektif arus utama. 'Di pusat perusahaan kriminologi', Cohen berkata, 'ini adalah bisnis seperti biasa' (Cohen, 1988: 84).

Meninjau kembali analisis Cohen sekarang ini, kita akan terkejut oleh dua hal. Jelas, pertama-tama, bahwa Cohen menulis di titik puncak perubahan yang signifikan—di dalam kriminologi dan dalam institusi dan praktik sosial di mana ia terlibat dan berusaha untuk memahami dan menjelaskan. Pada tahun 1981 kriminologi akademis di Inggris tetap merupakan industri rumahan yang bertubuh kecil, meskipun industri ini baru-baru ini didorong oleh perluasan pendidikan tinggi pada tahun 1960-an. Ini terdiri dari beberapa lusin peneliti aktif. Tidak ada konferensi kriminologi tahunan. Pendidikan kriminologi dibatasi pada beberapa program master dan beberapa pilihan tahun terakhir pada gelar hukum dan sosiologi. Gagasan bahwa seseorang dapat mengajar seluruh gelar kriminologi kepada para sarjana masih harus menangkap imajinasi calon direktur kursus atau wakil rektor kewirausahaan. Bidang ini memiliki dua jurnal khusus—*The British Journal of Criminology* dan *The Howard Journal of Criminal Justice*—dan setiap tahun menghasilkan jumlah buku, artikel, dan laporan yang relatif kecil dan dapat dikelola. Dimungkinkan untuk membaca semua yang diproduksi. Dalam periode intervensi kriminologi telah berkembang pesat, di Inggris dan di beberapa yurisdiksi lain di seluruh dunia (Kerner, 1998). Seperti yang akan kita lihat, telah terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah peneliti, guru, kursus, siswa, konferensi, buku, dan jurnal. Akibatnya, kriminologi—agak membuat cemas Cohen dan banyak

orang sezamannya—mengambil perlengkapan institusional dari disiplin otonom (Garland, 2011).

Ekspansi ini terjadi sebagian karena objek penyelidikan kriminologis—kejahatan, kepolisian, keadilan, hukuman, ketakutan, korban, kontrol, ketertiban, keamanan—sejak tahun 1980-an menempati tempat yang jauh lebih menonjol dan diperdebatkan dalam kehidupan dan kehidupan kesadaran warga negara dan pembicaraan serta tindakan otoritas yang mengatur, di Inggris dan di banyak negara demokrasi Barat lainnya (Garland, 2001; Simon, 2007). Pada saat esai Cohen, penampakan awal ‘pemanasan’ dari pertanyaan kriminal ini sudah dapat dilihat, dan memang telah dibedah dengan cerdas oleh Cohen (1980). Meningkatnya tingkat kejahatan, kepanikan dan mobilisasi di sekitar subkultur pemuda dan ‘perampok hitam’, dan bentrokan polisi dengan pemrotes dan pemogok telah menjadikan Pemilihan Umum 1979 yang pertama di mana ‘hukum dan ketertiban’ menyuarakan dengan keras dan mempengaruhi pemilih (Downes dan Morgan, 1994). Bahkan jika institusi dan asumsi tetap tentang ‘elitisme liberal’ dan ‘welfarist hukuman’ sebagian besar tetap ada (Loader, 2006). Namun dalam tiga dekade intervensi, lanskap kejahatan, ketertiban, dan kontrol bergeser secara meyakinkan (Loader dan Sparks, 2007). Pertumbuhan penjara massal, keamanan swasta, dan teknologi pengawasan; kebangkitan populisme hukuman dan gerakan korban; globalisasi kejahatan dan pengembangan jaringan pengendalian kejahatan transnasional; 9/11 dan 7/7; dan munculnya internet, berita dari dinding ke dinding, dan media sosial baru—semua ini membuktikan tempat yang menonjol dan emosional bahwa kejahatan dan pengendalian kejahatan telah terjadi dalam hubungan sosial dan budaya politik kontemporer. Keunggulan ini secara jelas dan erat terkait dengan perluasan kriminologi. Dalam pandangan penulis, perubahan konteks ini juga membutuhkan pemikiran baru tentang batasan, fokus, dan ambisi bidang tersebut.

Hal kedua yang mencolok—dan masih berharga—tentang esai Cohen adalah esai tersebut memiliki semangat dan orientasi yang dapat membantu penulis dalam tugas ini. *Footprints in the Sand* adalah contoh awal dari suatu aktivitas yang sejak itu menjadi lebih umum di seluruh ilmu sosial, yaitu upaya untuk berpikir secara sosiologis tentang produksi dan konsumsi pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan kriminologis. Memikirkan—dan karenanya ‘menempatkan’—kriminologi dengan cara ini adalah menanyakan di mana aktivitas ini berada, apa batasannya, dan hubungan apa yang ada antara kriminologi dan institusi yang mendukungnya. Ini berarti memperhatikan tidak hanya pertanyaan, pendekatan, dan klaim pengetahuan yang merupakan aktivitas, tetapi juga pada kondisi kemungkinan untuk berbagai jenis produksi pengetahuan, dan pada sirkulasi dan efek dari pengetahuan yang dihasilkan. Ini adalah mempelajari kriminologi bukan sebagai disiplin (kita tidak, seperti yang akan menjadi jelas, berpikir bahwa ini adalah cara berpikir yang paling membantu tentangnya) tetapi sebagai ‘bidang’, tidak hanya dalam pengertiannya yang biasa tetapi juga dalam pengertian Pierre Bourdieu. penerapan yang lebih khusus dari istilah ini. Ini mengarahkan penyelidikan terhadap di mana dan bagaimana kriminologi dibentuk, pada garis visi dan divisi, dan hubungannya dengan bidang lain—akademis, hukum, politik, birokrasi, jurnalistik, dan sebagainya (*Bourdieu, 2004*).

Untuk menyarankan bahwa pendekatan ini telah menjadi lebih umum pada tahun-tahun sejak esai Cohen ditulis adalah untuk menunjukkan badan kerja yang berkembang—jika jarang tidak kontroversial—dalam ‘studi sains dan teknologi’ yang telah memeriksa, antara lain, praktik laboratorium ilmuwan, politik pembuatan klaim ilmiah, dan peran serta kekuatan sains dalam masyarakat demokratis (misalnya *Latour 1987; Collins dan Pinch 1998; Irwin dan Michael 2003*). Sampai saat ini, sedikit dari pekerjaan ini—dan pertanyaan serta konsepnya—telah ‘kembali’ pada ilmu sosial itu

sendiri; tidak ada yang seperti studi ilmu sosial yang memiliki kedalaman empiris yang setara dan kecanggihan teoretis. Orientasi semacam itu dengan demikian hanya ditemukan ekspresi secara sporadis dalam studi kriminologi. Ada, pastinya, beberapa catatan sejarah penting tentang asal-usul dan perkembangan dari ‘ilmu kriminal’ yang menekankan bahwa kriminologi dibentuk di penjara dan laboratorium sebelum memantapkan dirinya sebagai subjek akademis di dalam universitas (misalnya *Garland, 1988, 2002; Raft er, 2009*). Karya almarhum Richard Ericson berulang kali kembali ke pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan kriminologis diproduksi dan dikomunikasikan dalam sirkuit kekuasaan (*Ericson, 2003*). Penulis lain telah menyelidiki hubungan yang sering tegang yang ada antara peneliti kriminologi dan sponsor dan pengguna pengetahuan mereka (*Zedner, 2003; Walters, 2003*), dan seseorang dapat menunjukkan kumpulan refleksi terbaru yang terkenal tentang kondisi, perbatasan, dan masa depan lapangan (*Bosworth dan Hoyle, 2011*). Pertanyaan tentang keterlibatan kriminologis dengan politik dan kehidupan publik juga telah menjadi subjek pekerjaan penulis baru-baru ini (*Loader dan Sparks, 2010*). Namun penelitian dan penulisan tentang kriminologi sebagai bidang penyelidikan tetap merupakan aktivitas sporadis dan tidak sistematis, kurang memiliki kedalaman sejarah yang cukup. Terlebih lagi, hal ini sering dianggap sebagai ‘menatap pusing’. Bahkan Cohen mengakhiri laporannya tentang kriminologi dengan peringatan tentang ‘bahaya refleksi diri yang obsesif’ (*Cohen, 1988: 89*).

Ada beberapa alasan yang jelas untuk ketidaksabaran dan terkadang sikap meremehkan refleksi tentang kriminologi. Hal ini berkaitan dengan impor sosial dan politik, dan kepentingan sosiologis, dari pertanyaan pengorganisasian kriminologi. Cohen mengatakan bahwa hanya ada tiga: ‘Mengapa hukum dibuat?’, ‘Mengapa hukum itu dilanggar?’, Dan ‘Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan tentang ini?’

(Cohen, 1988: 9; lihat juga Sutherland et. al., 1992: 3). Bagaimana seseorang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memiliki implikasi praktis dan kebijakan yang utama. Mereka juga terkait erat dengan subjektivitas dan kesejahteraan individu; tekstur kehidupan kolektif, dan ruang lingkup, kekuasaan, legitimasi, dan akuntabilitas negara dan otoritas pemerintahan lainnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terletak dekat dengan inti kepedulian ilmu sosial yang abadi dengan ‘masalah ketertiban’ dan tidak dapat dipisahkan dari kontes politik mengenai sifat masyarakat yang baik. Mengingat hal ini, para skeptis bertanya, mengapa ada orang yang menyusahkan diri mereka sendiri dengan sesuatu yang sepele seperti studi kriminologi atau sama membosankannya dengan aktivitas dan pemahaman diri para kriminolog? Penulis memiliki simpati dengan pandangan ini dan sangat memahami, bahkan berbagi, ketidaksabaran untuk kembali ke pertanyaan yang lebih substantif. Namun justru karena kedekatan subjek kriminologi dengan kehidupan dan kesibukan warga negara, dan kekuasaan serta kepentingan otoritas yang mengatur, mereka yang memproduksi dan mengkonsumsi pengetahuan tentang kejahatan dan keadilan harus memupuk dan mempertahankan kesadaran refleksif tentang kondisi di mana pengetahuan tersebut diproduksi (atau tidak) dan konteks di mana pengetahuan itu digunakan, disalahgunakan, diperjuangkan, dicemooh, atau diabaikan. Refleksivitas dalam pengertian ini bukanlah gangguan dari bisnis nyata untuk mencoba menjawab salah satu dari tiga pertanyaan Cohen. Ini adalah unsur penting dalam penelitian ilmu sosial yang baik dalam kaitannya dengan masing-masingnya.

Bagaimanapun juga, inilah pemikiran-pemikiran yang menghidupkan upaya penulis dalam bab ini untuk memberikan sketsa—dan itu hanya bisa menjadi sketsa—dari kontur kriminologi kontemporer. Penulis mulai dengan berfokus pada kondisi dan pengaturan produksi kriminologis. Penulis menjelaskan cara-cara kriminologi telah berkembang selama

bertahun-tahun sejak *Footprints in the Sand* muncul dan menganalisis pengaturan dan hubungan kelembagaan yang mengkondisikan produksi pengetahuan tentang kejahatan dan keadilan saat ini. Perhatian penulis di sini adalah memikirkan beberapa manfaat dan bahaya kemunculan kriminologi sebagai ‘disiplin’ otonom. Penulis beralih ke objek kriminologi. Penulis menguraikan beberapa garis visi dan divisi yang membentuk lapangan sehubungan dengan akun yang bersaing tentang apa artinya menghasilkan pengetahuan tentang dunia sosial. Cakupan masalah yang dipilih untuk pemeriksaan kriminologis saat ini sangat luas; dan mode dan topik penyelidikan baru yang menarik perhatian di dunia yang mengglobal dan tidak aman saat ini meluas dari genetika hingga genosida. Penulis kemudian memeriksa konsumsi pengetahuan kriminologis. Perhatian penulis di sini adalah dengan khalayak, bentuk keterlibatan, dan visi tata kelola yang didalilkan oleh produsen penelitian kriminologis saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Penulis mencatat beberapa cara di mana kriminologi diterima di sirkuit budaya dan politik yang lebih luas, dan persaingan yang terjadi antara kriminologi dan klaim lain untuk mengetahui tentang kejahatan dan keadilan, dan tuntutan tindakan yang mengalir darinya. Sebagai kesimpulan, penulis menyarankan bahwa hal ini secara tak terelakkan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proyek-proyek kriminologis terjatuh dengan konsepsi yang bersaing tentang masyarakat yang baik—dan karenanya dengan politik. Penulis berpendapat bahwa visi politik tertentu terkubur dalam konsepsi kriminologi yang berbeda dan bahwa ada manfaat untuk membuatnya lebih eksplisit, sebelum menetapkan kasus untuk agenda penelitian yang mengambil objek penyelidikannya hubungan antara kejahatan, hukuman, dan politik yang demokratis.

1.1 Ruang Lingkup Kriminologi

Pengetahuan tentang kejahatan dan keadilan tidak terjadi begitu saja. Juga tidak terletak hanya di kepala dan aktivitas individu yang memproduksinya. Pertanyaan tentang apa yang akan diketahui, dari perspektif teoritis apa, dengan metode apa, tentang kejahatan apa, dan cara-cara menanggapi kejahatan, dalam bentuk apa, dan dengan efek apa yang dikondisikan oleh berbagai institusi. Institusi ini mempekerjakan peneliti (secara permanen atau sementara); mendanai (atau tidak mendanai) proyek dan program penelitian; mengizinkan (atau menolak) akses ke data, subjek penelitian, dan situs; menawarkan outlet untuk publikasi; dan menggunakan, menyalahgunakan, memperjuangkan, atau mengabaikan produk penelitian itu. Masing-masing lembaga ini—universitas, dewan penelitian, badan amal, lembaga think tank, perusahaan konsultan, penerbit, surat kabar, penyiar dan media sosial baru, kelompok kampanye dan pelobi, partai politik, penjara, kepolisian, departemen pemerintah, dan sebagainya—diri mereka sendiri terletak dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak. Untuk mempelajari kriminologi sebagai ‘bidang’ adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan kekuasaan dan perjuangan antara aktor di situs kelembagaan yang berbeda ini menyusun pengetahuan yang (dan tidak) diproduksi.¹

Salah satu keunggulan utama esai **Stanley Cohen** adalah bahwa pada tahun 1981 ia berusaha memetakan bidang kriminologi dengan mempertimbangkan isu-isu ini. Cohen mencatat pentingnya kriminologi di Inggris sejak 1945 dari sejumlah kecil institusi akademis utama, terutama *Cambridge Institute of Criminology* (didirikan dengan dukungan pemerintah

1 Dalam perluasan baru-baru ini dari teori lapangan Bourdieu ke sosiologi hukuman, Page secara berguna mendefinisikan bidang ini sebagai ‘lingkup tindakan semi-otonom, relatif terbatas di mana orang, kelompok, dan organisasi berjuang dengan dan melawan satu sama lain’ (2012)

pada 1960—Butler 1974; Radzinowicz 1988), tetapi juga *London School of Economics* dan kelompok kecil aktivitas kriminologi di Edinburgh, Oxford, dan Sheffield. Dia juga mendaftarkan ukuran dan signifikansi penelitian kriminologi yang dilakukan di dalam atau didanai oleh pemerintah—yang paling penting oleh Unit Riset dan Perencanaan Kantor Dalam Negeri (didirikan pada tahun 1959—Lodge 1974) tetapi juga di cabang riset departemen penjara dan Kepolisian Metropolitan. Cohen lebih lanjut mengisyaratkan peran yang dimainkan oleh ‘badan kuasi-akademik’ (1988: 83) dengan ambisi reformis dan hubungan dekat dengan peradilan pidana dan praktisi psikiatri. *Institute for the Study and Treatment of Delinquency*, yang mendirikan dan memiliki *British Journal of Criminology*, adalah yang terdepan di antaranya, meskipun harus disebutkan juga tentang *Howard League for Penal Reform*, sebuah kelompok penekan yang menampung jurnal utama lainnya di lapangan, *Howard Journal of Criminal Justice*.

Poin Cohen adalah bahwa kumpulan institusional ini menyusun kontur utama kriminologi Inggris pasca-perang. Pertama, ‘kerangka acuan pragmatis’ (1988: 69) dan ketidaksukaan terhadap teori—pemahaman dirinya sebagai ‘realistis’, ‘empiris’, dan ‘moderat’ (Radzinowicz, 1999). Kedua, bentuk eklektisme antar-disiplinnya—**Sir Leon Radzinowicz**, Direktur pendiri Cambridge Institute dan tokoh kriminologi Inggris abad ke-20 yang menjulang tinggi, memandang kriminologi antar-disiplin dalam istilah berikut: ‘Seorang psikiater, sosial psikolog, penologis, pengacara, ahli statistik bergabung bersama dalam operasi penelitian gabungan’ (1961: 177). Ketiga, orientasi kriminologi pada tugas menghasilkan apa yang dipandang sebagai sistem peradilan yang efektif dan manusiawi—singkatnya, sistem keadilan yang ‘beradab’. Akhirnya, hubungannya yang jauh dan saling mencurigakan dengan sosiologi.

Cohen juga berangkat, bagaimanapun, untuk menggambarkan tantangan intelektual dan politik yang mulai muncul untuk konsepsi

kriminologi ini dan hubungannya dengan dunia. Generasi baru sosiolog, yang memulai karir akademis di universitas baru tahun 1960-an, dan terlibat dalam kekacauan politik dan budaya pada dekade itu, membawa objek penyelidikan baru ke permukaan: penyimpangan, kontrol sosial, konflik politik dan kekerasan negara, kekuatan polisi, ideologi dan pembuatan berita, belum lagi pemeriksaan ulang yang reflektif dan sengaja subversif terhadap klaim dan efek kriminologi itu sendiri yang begitu banyak dipermasalahkan dalam esai Cohen dan dalam tulisan lain periode itu. Perspektif dan konsep teoretis baru diimpor (dari AS dan dari tempat lain dalam ilmu sosial) dan digunakan: apresiasi, pelabelan, kepanikan moral, interaksionisme simbolik, anti-psikiatri, Marxisme, dan feminisme. Institusi baru dibentuk untuk menyediakan platform bagi perspektif ini dan untuk membangun aliansi dengan pekerja sosial radikal dan pengacara, anti- psikiater, pelajar, organisasi narapidana, dan kampanye melawan kekerasan negara. Yang paling menonjol di antaranya adalah Konferensi Penyimpangan Nasional (1968-1979) dan Kelompok Eropa untuk Studi Penyimpangan dan Kontrol Sosial (didirikan pada tahun 1973 dan masih ada). Dunia sosial yang bertumbuh kecil dari kriminologi Inggris telah menjadi salah satu konflik dan perpecahan.²

Namun, bagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sejak esai Cohen ditulis? Seperti apa bidang kriminologi saat ini jika kita mencoba memahaminya dalam istilah Cohen? Tema besar adalah salah satu perluasan di sejumlah dimensi. Platform untuk pertumbuhan telah menanamkan kriminologi dalam pendidikan tinggi massal. Program sarjana pertama di bidang kriminologi di Inggris diluncurkan di Universitas Keele pada tahun 1991. Dua puluh tahun kemudian, 87 universitas di Inggris mengajarkan kriminologi dan peradilan pidana dalam gelar tunggal dan gabungan yang

2 Publikasi kunci dari periode tersebut termasuk Cohen (1971), Taylor, Walton, dan Young (1973, 1975), Taylor dan Taylor (1975), Pearson (1975), Smart (1977), Hall et al. (1978), dan Downes and Rock (1979).

jumlahnya mencapai ratusan. Enam puluh tiga universitas di Inggris menjalankan program pascasarjana. Perkembangan ini memicu ledakan selama dua dekade jabatan akademis di lapangan. Hal ini pada gilirannya—sebagian di bawah tekanan rezim penilaian penelitian pemerintah—menyebabkan semakin banyak buku teks, buku pegangan, monograf, volume yang diedit, dan artikel jurnal. Penulis sendiri, dan semua rekan penulis dari orientasi politik dan teoritis apa pun, telah menjadi penerima manfaat dan peserta dalam ledakan yang dihasilkan. Di Inggris, sebagian besar aliran buku yang meningkat muncul karena penerbit akademis spesialis kriminologi sendiri—Willan.³

Tema kunci kedua adalah otonomi yang tumbuh: karena kriminologi telah mengasumsikan sifat institusional yang terkait dengan disiplin ilmu ilmiah, ia telah menemukan tempat yang lebih mapan dan terpisah di dalam bidang akademik (*Garland, 2011*). Sebagian dari cerita ini berkaitan dengan spesialisasi internal. Karena bidang kriminologi telah berkembang, demikian pula upaya menangani keragaman yang dihasilkan (dalam orientasi teoretis, metode, pertanyaan yang diajukan, disiplin yang diambil, komitmen yang diungkapkan, khalayak yang diharapkan) dengan melembagakan perbedaan yang menonjol dari fokus dan tujuan. Penulis telah membahas berbagai divisi dan diferensiasi ini di tempat lain, dan mencatat bahaya dari begitu banyak kriminologi yang bersaing yang sering mengklaim lebih dari sekadar spesialisasi subjek sederhana dan malah menimbulkan keraguan pada kredibilitas intelektual atau politik satu sama lain (*Loader dan Sparks, 2010: ch. 1*). Tetapi risiko terkait juga melekat pada aspek kedua dari otonomi kriminologi yang berkembang—pemisahannya dari bidang penyelidikan sosial yang secara historis memelihara teori dan penelitian kriminologi. Sepanjang sejarahnya, banyak eksponen utamanya telah berhati-hati untuk menyangkal bahwa kriminologi adalah sebuah

3 Pada 2010, Willan dijual ke Taylor and Francis Group.

disiplin—mereka memang, seperti kita, telah tertarik oleh ketidakmurnian disiplin dan pelanggaran batas residivis (*Braithwaite, 2011:133*). Misalnya, *Savelsberg* dan *Sampson (2002:101)* berpendapat bahwa kriminologi adalah bidang multidisiplin yang ‘memiliki materi pelajaran tetapi tidak ada komitmen metodologis yang unik atau kerangka teoritis paradigmatik’. Selain itu, mereka berpendapat, ‘tidak ada asumsi umum atau wawasan yang membimbing. Tidak ada gagasan intelektual yang menjiwai kriminologi’.

David Downes (1988) memiliki, dalam nada yang sama, terkenal menggambarkan kriminologi sebagai ‘subjek pertemuan’—bidang yang diatur di sekitar masalah sosial yang berfungsi sebagai persimpangan jalan untuk pertukaran antara peneliti yang dilatih dalam disiplin yang lebih dasar (sosiologi, psikologi, hukum, filsafat, sejarah, ekonomi, ilmu politik), dan berulang kali dijiwai dan diremajakan oleh gagasan dan konsep yang diimpor dari luar.

Namun, terlepas dari protes ini, ekspansi kriminologi telah membuatnya mengasumsikan properti organisasi dari suatu disiplin ilmu—departemen, gelar, jurnal, konferensi, dan penghargaan yang terpisah serta, seiring waktu, mempekerjakan peneliti yang seluruh pendidikan tingginya di bidang kriminologi. Dalam konteks ini, ada baiknya mengingat kembali analisis *Andrew Abbott (2001)* tentang fungsi budaya dari disiplin ilmu. Disiplin, menurut **Abbott**, memiliki apa yang disebut tujuan eksistensial dan epistemik. Dalam kasus sebelumnya, ‘disciplines memberikan mimpi dan model baik dari kenyataan maupun pembelajaran. Mereka memberi gambaran tentang wacana yang koheren. Mereka menciptakan cara-cara pengetahuan yang bagi peserta tampak nyata dan unik. Setiap akademisi mengetahui pengalaman membaca karya dari luar disiplinnya dan mengetahui perasaan tidak nyaman yang ditimbulkannya.

Maksud **Abbott** adalah bahwa organisasi disiplin itu penting: memiliki efek material pada produksi pengetahuan. **Steve Fuller** mengomentari

dinamika ini dengan tajam. Batasan disipliner, dia menyarankan, adalah ‘hambatan artifisial untuk transaksi klaim pengetahuan. Batasan semacam itu adalah kejahatan yang diperlukan yang menjadi lebih jahat jika dianggap perlu’ (1993: 36). Dilihat dari sudut ini, ada beberapa risiko kriminologi yang berubah menjadi ‘disiplin’ otonom. Ada risiko bahwa bidang tersebut akan kehilangan koneksi dengan disiplin ilmu dasar (Garland, 2011: 300) dengan cara yang mempersempit cakrawala intelektual, memisahkan kriminologi dari ide-ide utama dan perdebatan dalam ilmu sosial dan politik, dan menghasilkan pekerjaan yang tidak memiliki ambisi dan keilmuan yang lebih luas. kepentingan—atau yang hanya salah menyatakan asal usul dan sumber daya intelektualnya dan menyangkal semua kepentingan dalam sejarahnya sendiri (Rock, 2005). Pemutusan hubungan ini akan membuat kriminologi tidak siap untuk menanggapi tantangan hidup di masa globalisasi, resah, dan tidak aman—poin yang dibuat satu dekade lalu oleh Garland dan Sparks (2000). Ada risiko penelitian kriminologis dan program pengajaran menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dan kontrol eksternal dengan cara yang mengarahkan lapangan ke arah penyelesaian masalah yang diarahkan pada kebijakan dan jauh dari peningkatan masalah yang didorong oleh rasa ingin tahu.⁴

Tiga dekade terakhir telah melihat beberapa perubahan luas di tempat pertanyaan kriminal menempati dalam hubungan sosial sehari-hari dan budaya politik Inggris dan banyak negara demokrasi liberal Barat lainnya. Upaya untuk memahami perubahan ini telah memunculkan beberapa karya paling penting dan debat signifikan dalam kriminologi kontemporer, baik dalam hal ‘budaya kontrol’ (Garland, 2001), ‘mengatur melalui kejahatan’ (Simon 2007), atau efek hukuman dari neo-liberalisme (Reiner 2007; Wacquant, 2009a). Penulis tidak memiliki ruang untuk

4 Dalam studi sosiologis penting tentang kriminologi AS, Savelsberg dan rekan-rekannya telah menunjukkan secara empiris efek ini (Savelsberg et al., 2002, 2004; Savelsberg dan Flood, 2004).

mendeskripsikan perubahan yang relevan secara mendetail. Penulis juga tidak dapat menganalisis vektor ketidaksepakatan, selain mencatat bahwa perkembangan yang ditunjukkan istilah-istilah ini secara tidak merata ditemui di dalam dan di antara negara bagian (Tonry, 2007; Lacey, 2008; Barker, 2009); bahwa seseorang perlu menekankan kontinuitas dan kontingensi daripada zaman dan bencana (Loader dan Sparks, 2004; O'Malley, 2000), dan aspek tersebut tetap aktif diperdebatkan (Matthews, 2005). Namun demikian, lanskap pemerintahan yang berubah ini sangat berkaitan dengan masalah penempatan kriminologi, seperti yang akan kita lihat. Oleh karena itu, ringkasan singkat—dan tentu saja kasar—dari perkembangan utama disusun:

- *Politicization of crime*. Kejahatan tidak lagi dikelola 'di luar panggung' oleh para ahli tetapi telah menjadi subyek perselisihan dan kontes politik. Ketika kejahatan menjadi tanda persaingan politik, reaksi pemerintah terhadapnya sangat dipengaruhi oleh kalkulasi dan kemanfaatan jangka pendek. Dalam iklim ini, kebijakan kejahatan semakin di bawah pengaruh media massa dan 'opini publik' dan bergantung pada emosi populer yang terkadang secara aktif mengobarkan. Korban muncul sebagai aktor politik yang berpengaruh dan mewakili kepentingan publik. Hasilnya adalah lingkungan kebijakan yang hiperaktif, tidak stabil, dan tidak stabil, di mana menjadi sulit untuk membuat alasan dan bukti pendorong dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Semua ini didukung, dan sampai batas tertentu didorong, oleh kesadaran kejahatan yang meningkat di antara warga negara, karena kecemasan tentang kejahatan mengambil tempat yang lebih menonjol dalam membentuk rutinitas sehari-hari dan institusi sosial.
- *Re-centring the penal state*. Dalam menghadapi meningkatnya ketidakamanan dan tuntutan akan ketertiban (yang disebabkan oleh kerawanan sosial-ekonomi dan pencabutan sebagian dari kesejahteraan

sosial), negara peradilan pidana menjadi pusat material dan simbolis bagi pengelolaan ketertiban dan kontrol populasi marjinal. Penjara ‘kembali’ sebagai institusi modal regulasi sosial dan disertai dengan era pengawasan pidana massal. Kekuatan dan perintah baru berkembang biak untuk mengendalikan perilaku anti-sosial, kekerasan dan seks, dan terorisme. Pemolisian menjadi lebih terlihat dan sangat penting dalam upaya untuk mengelola konflik dan meredakan kecemasan sosial. Hal ini disertai dengan pembingkai publik atas masalah kriminal yang memberikan perlindungan publik terhadap penjahat lainnya.

- *A ‘silent revolution’ in crime control.* Penegasan kembali otoritas kedaulatan disertai dengan apa yang oleh **David Garland (2001)** disebut sebagai ‘strategi adaptif’ untuk mengelola risiko kejahatan. Skema pencegahan kejahatan situasional memanipulasi lingkungan untuk mengurangi peluang berakhirnya kejahatan. Kemitraan multi-lembaga lokal berkembang biak, seperti halnya perpolisian pemecahan masalah. Pemerintah melakukan upaya yang lebih besar—melalui target, inspeksi, dan audit—untuk mengelola birokrasi peradilan pidana secara mikro dan membentuk hasil. Teknik dan wacana baru dari manajemen risiko digunakan untuk memprediksi kejahatan di masa depan, menargetkan para pelaku, dan menangani perilaku mereka yang berada di bawah pengawasan pidana. Hal ini sering kali disertai dengan tuntutan sistemik akan pengetahuan baru dan orientasi yang lebih besar untuk menempatkan pengendalian kejahatan dalam basis bukti.
- *Pluralization of policing and security.* Negara hanya menjadi salah satu dari sejumlah aktor yang terlibat dalam pemberian hukuman dan tata kelola keamanan. Tanggung jawab untuk pencegahan kejahatan menyebar ‘ke bawah’ untuk warga negara dan bisnis, sekolah, rumah

sakit, perencana, dan sebagainya. Keterlibatan dalam pengendalian kejahatan menyebar 'ke luar' ke sektor swasta yang personel dan perangkat kerasnya memainkan peran yang lebih besar dalam kepolisian dan perlindungan serta pembangunan dan pengelolaan penjara. Tanggung jawab dan kapasitas juga menyebar 'ke atas' ke badan-badan internasional dan transnasional baru, termasuk Uni Eropa (yang mengambil tempat baru yang vital dalam kepolisian lintas batas dan kontrol migrasi), Dewan Eropa, dan Pengadilan Kriminal Internasional.

- *Global flows of crime and crime policies.* Dalam kondisi globalisasi, terjadi percepatan dalam intensitas dan keluasan arus modal, gagasan, orang, dan barang lintas batas. Dunia menjadi salah satu jaringan dan arus daripada tempat dan perbatasan, dan kondisi yang ada untuk kegiatan kriminal diatur dan berlangsung melintasi perbatasan. Tetapi hal yang sama berlaku untuk sirkulasi dan pertukaran antara aktor kelembagaan dan resep kebijakan. Kita mendiami era elit kebijakan transnasional, pengusaha seluler, dan wadah pemikir global yang memainkan peran kunci dalam sirkulasi internasional inovasi pengendalian kejahatan seperti toleransi nol, perpolisian komunitas, hukuman tiga kali pemogokan, dan privatisasi pidana. Seseorang sekarang perlu memperhatikan 'perjalanan pertanyaan kriminal' (Melossi et al., 2011a). Ini berarti menyelidiki tidak hanya agen difusi, tetapi juga bentuk dan makna yang diambil kebijakan dalam konteks lokal yang berbeda, dan alasan mengapa beberapa teknik pengendalian kejahatan merasa sulit, atau bahkan gagal sama sekali, untuk bepergian.

1.2 Tujuan Kriminologi

Keraguan tentang kriminologi muncul sejak awal. Dalam sebuah artikel pertanda brilian tahun 1933 berjudul 'Beberapa masalah dasar

kriminologi’, **Jerome Hall** memandang dengan ragu-ragu dari dasar teori hukum pidana yang seolah-olah lebih tinggi. Dalam perkembangannya saat ini, katanya, ilmu sosial tampak seperti ‘kebijakan sosial yang kurang lebih terselubung’ (1933: 119). Kriminologi, khususnya, berisi ‘ekspresi persetujuan atau ketidaksenangan’ yang menyamar sebagai penilaian objektif. Menurut **Hall**, tidak mungkin bahwa kriminologi akan berkembang melampaui kondisi ini dalam waktu dekat karena alasan utama daripada mengambil objek penyelidikan ilmiah yang terpisah, ia bergerak di dunia di mana ‘kerangka acuan kita telah dibangun untuk kita’ (*ibid.*). **Hall** tidak melihat adanya hubungan yang diperlukan antara ‘kebijakan bijak’ dan ‘penyempurnaan presisi ilmiah yang tak ada habisnya’ (1933: 128). Prospek kriminologi terbatas karena ia terdiri dari ‘beberapa bidang yang tumpang tindih dan berpotongan di begitu banyak titik sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi karakteristik umum’ (1933: 132).

Banyak yang telah berubah dalam kurun waktu hampir 80 tahun—tetapi tidak semuanya. Setidaknya beberapa keprihatinan **Hall** memiliki gaung kontemporer yang berbeda, bahkan jika dia menulis sebelumnya hampir semua yang sekarang kita sampaikan kepada siswa sebagai catatan kanonik (jika tidak memang klise) dari suksesti tengara dalam teori kriminologi tetap harus ditulis. Dua jenis pertanyaan bergema selama beberapa dekade. Pertama-tama berkaitan dengan apakah kriminologi pernah dapat atau seharusnya menginginkan suatu bentuk kesatuan paradigmatik atau konsensus. Yang kedua menyangkut hubungan yang tidak pasti antara pengetahuan kriminologis dan tindakan sosial dan politik di dunia.

Young tentu saja sangat sadar bahwa sebagian besar model ini bukanlah teori kriminologis yang unik; juga bukan teori yang sama (*Young, 1981: 250*). Klasisisme adalah nama yang diberikan oleh para kriminolog untuk versi tertentu dari teori kontrak sosial yang diterapkan pada kejahatan dan

hukuman. Positivisme pada awalnya merupakan posisi dalam filsafat ilmu (sosial). Konservatisme adalah badan keyakinan dan kepekaan politik. Teori ketegangan adalah hipotesis sosiologis yang berkaitan dengan penjelasan kejahatan dalam jenis struktur sosial tertentu. Teori penyimpangan baru secara sadar menantang apa yang ditafsirkannya sebagai kriminologi konvensional. Marxisme adalah teori materialis tentang perkembangan sejarah melalui perubahan dinamis dalam sarana dan hubungan sosial produksi dan pertukaran. Seperti yang diamati Young, bukan hanya para kriminolog yang berpikir serius tentang kejahatan. Selain itu, sebagian dari intinya adalah bahwa teman-teman yang berbeda dan tidak nyaman ini bertemu dan, pada akhirnya, menyimpang, dalam beberapa kasus tidak dapat direkonsiliasi. Ketidaksepakatan mereka bersifat permanen, tetapi tidak sepenuhnya kacau. Young memprediksi dengan tepat, tidak akan ada perkembangan unilinear, tidak ada teori dominan tunggal (terlepas dari berbagai tawaran pengambilalihan). Ia berpendapat bahkan lebih tajam lagi, akan ada tingkat tinggi kelupaan historis dan penemuan kembali yang naif (1981: 306–7). Ini akhirnya karena ‘studi tentang kejahatan bukanlah perhatian marjinal bagi warga negara tetapi segera menjerumuskan kita ke dalam pertanyaan mendasar tentang ketertiban dan moralitas dalam masyarakat dan pada pemeriksaan atas dasar peradaban tempat kita hidup’ (1981: 307).

Daripada mencoba tipologi lain atau eksposisi formal posisi atau paradigma, penulis bermaksud untuk mengikuti ajaran Young di mana penulis pikir itu membawa penulis. Ini berarti mengambil untaian kedua dari pertanyaan yang belum terselesaikan yang bergema selama beberapa dekade dari Jerome Hall dan seterusnya dan berfokus pada hubungan antara teori kriminologi dan berbagai bentuk tindakan sosial sehubungan dengan dunia yang sedang berubah yang direpson oleh teori itu. Satu sumber panduan di sini lagi-lagi disediakan oleh Young, yang menulis

lebih dari satu dekade kemudian di edisi pertama Buku Pegangan ini. Saat ini, pada tahun 1994, contoh posisi teoritis yang menarik perhatian Young telah berubah. Kriminologi yang relevan di tahun 1980-an dan 1990-an baginya adalah semua cara untuk menangani (atau menyangkal) krisis yang menyertai etiologi dan kebijakan—ia menyebut idealisme Kiri/konstruksionisme sosial radikal; Kriminologi administratif baru; Realisme Kanan dan Realisme Kiri. Substansi dari kartografi khusus ini bukanlah perhatian utama penulis di sini—dilihat dari sudut pandang lain di dunia, pemetaan akan dilakukan pada proyeksi yang berbeda, seperti halnya segalanya terlihat berbeda lagi 15 tahun kemudian.

Poin Young termasuk bahwa posisi ini sendiri sebagian besar adalah versi dari yang sebelumnya, pengulangan yang dimungkinkan oleh amnesia historis dan tampaknya ‘penemuan kembali’ (*lih. Rock 2005*). Dia melanjutkan dengan berpendapat bahwa disiplin ilmu memiliki sejarah ‘interior’ dan ‘eksterior’. Sejarah interior melibatkan banyak topik yang telah kita bahas di atas—sifat pertukaran akademis, pengaturan kelembagaan tempat penelitian dilakukan, pendanaannya, penerbitannya, dan sebagainya—dan karenanya konstitusinya sebagai bidang yang layak. Sementara itu, sejarah eksterior melibatkan sejauh mana ‘dialog interior didorong oleh dunia luar’; sarjana keyakinan yang berbeda ‘bentrok di medan ditentukan oleh kota tertentu masyarakat mereka’ (*Young, 1994: 71*; lihat juga *Melossi, 2008*). Teori, untuk Young, ‘muncul dari hubungan sosial dan politik tertentu’ dan memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda dalam konteks yang beragam di seluruh dunia. Generalisasi tidak sepenuhnya tidak mungkin, tetapi tidak semuanya berjalan seperti yang kadang-kadang dibayangkan oleh produsernya (lihat *Melossi dkk. 2011a*).

Namun jelas bahwa berbagai kriminologi, meskipun tidak semuanya secara tegas berafiliasi dengan satu atau ideologi politik lainnya, dan sama sekali tidak hanya dilakukan oleh orang-orang politik yang terang-

terangan, melibatkan teori tindakan yang berbeda, penggambaran lembaga, asumsi mengenai kelayakan berbagai bentuk kebijakan, visi bentuk ‘penemuan moral’ yang lebih kecil atau lebih besar (*O’Malley 1992*), manajemen dan intervensi. Mereka mengklaim jenis perubahan sosial atau politik tertentu—kecil atau besar—sebagai mungkin dan diinginkan dan mengabaikan atau menghalangi orang lain sebagai tidak dapat dicapai atau tidak dapat diterima. Mereka menampilkan pengertian yang berbeda tentang kelangsungan hidup intervensi melalui institusi sistem peradilan pidana seperti yang dipahami secara konvensional, dan premis yang berbeda mengenai keefektifan atau sebaliknya dari berbagai mode hukuman atau jenis peraturan sosial lainnya. Mereka membayangkan jenis hubungan yang berbeda antara peran negara dalam kontrol sosial yang memaksa dan aktivitas mereka dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, atau keluarga dan mengaitkan bobot dan signifikansi yang berbeda dengan ini. Mereka memproyeksikan citra yang berbeda dan dalam beberapa kasus pada akhirnya saling eksklusif menggambarkan peran yang tepat dari lembaga pemerintah dan tempat lain dari aksi kolektif, komersial atau asosiasi. Mereka memperbesar beberapa masalah dan memperdebatkan signifikansi relatif dari orang lain. Dengan kata lain, teori kriminologi mungkin tidak semuanya teori politik (mereka mungkin, dan sangat sering, terlalu mengabaikan klaim teori politik yang disebut— *Loader dan Sparks, 2010:bab 5*), tetapi semuanya, tanpa kecuali, penggunaan dan aplikasinya dalam keadaan yang dibentuk dan dikondisikan oleh ranah politik dan membawa implikasi dari dan untuk sekitar.

Maksud penulis di sini bukanlah untuk mencoba menetapkan apa yang harus atau harus dilakukan oleh para kriminolog atau orang lain: penulis telah berusaha keras di tempat lain untuk memperdebatkan nilai ucapan ‘legislatif’ tersebut (*Loader dan Sparks 2010: 20–2*). Klaim penulis hanyalah bahwa meskipun telah lama benar bahwa kriminologi mendiami berbagai

situs dan register yang berbeda—seperti yang dikatakan *Ericson (2003: 43)* sebagai ‘bidang multi-disiplin, multi—profesional, multi—institusional’—cakupan, jangkauan, dan kompleksitas masalah yang mungkin ditanggung secara sah hari ini sangat besar. Ini bukan untuk mengandaikan, apalagi mencoba memaksakan, semacam omni-kompetensi yang tidak layak secara manusiawi dari pihak kriminolog. Tetapi itu untuk mengajukan pertanyaan tentang formasi profesional mereka, kurikulum yang mereka pelajari dan ajarkan, keterbukaan mereka terhadap berbagai perspektif, dan cara-cara di mana kita berdebat dan mendiskusikan prioritas yang kita sesuaikan dengan topik dan objek penyelidikan yang mungkin berbeda. Apa, secara tepat, dapat dikatakan sebagai kontribusi kriminologis untuk diskusi genosida dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan (*Hagan dan Rymond-Richmond, 2009; Savelsberg, 2011*)—dan apakah pertanyaan ini masih masuk akal?

Setidaknya tiga implikasi menonjol yang layak untuk disebutkan secara singkat lebih lanjut. Pertama, ada ruang bagi kriminolog untuk memberikan perhatian baru pada pengertian di mana subjek mereka adalah bidang hukum dan juga kebijakan (*Lacey dan Zedner, volume ini; Zedner, 2011*). Hal ini tidak hanya menyangkut poin yang sudah jelas tetapi juga sering diabaikan bahwa kriminologi memiliki hubungan internal dengan masalah dalam definisi dan penerapan sanksi pidana—singkatnya kriminalisasi dan alternatifnya (*Simester dan von Hirsch, 2011*). Ini juga, dalam konteks perkembangan yang digambarkan di atas, menyarankan perlunya perhatian yang lebih intens terhadap serangkaian pertanyaan konstitusional dan yurisdiksi, seperti yang diangkat sehubungan dengan pertanyaan tentang tata kelola multi-level, perjanjian internasional dan kepatuhan konvensi, dan begitu seterusnya. Hal ini telah dibuat dengan baik oleh **Murphy dan Whitty (2007)** dengan perhatian khusus pada studi penjara kontemporer oleh kriminolog dan ilmuwan sosial lainnya, tetapi

ini memiliki aplikasi yang lebih luas. Mereka berkomentar tentang apa yang mereka lihat sebagai keberadaan perbedaan disipliner yang aneh di mana para ilmuwan sosial membuat sedikit referensi (atau tidak sama sekali) untuk hak asasi manusia, meskipun mereka semakin menonjol dalam kosakata administrasi penjara dan peran mereka dalam merestrukturisasi tata kelola penjara. Kelalaian ini, mereka berpendapat, hasil dari beberapa kombinasi penutupan disipliner dan ketergantungan berlebihan oleh para peneliti pada pertimbangan pragmatis dan manajerial yang didefinisikan secara resmi (*ibid* : 800). Ironisnya di sini adalah bahwa ilmuwan sosial, karena gagal terlibat dengan ilmu hukum, kehilangan aspek kunci dari apa yang sedang terjadi.

Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa para kriminolog [Inggris] tidak terlibat secara berkelanjutan dan terinformasi dengan hak asasi manusia. Namun demikian, masih sulit untuk memahami mengapa perubahan kriminologis tahun 1990-an ke arah peningkatan hukuman tidak mendorong minat pendamping dalam pertumbuhan konstitusionalisme hukum berbasis hak di Inggris atau, lebih khusus lagi, dalam dampak Eropa. Pengadilan Hak Asasi Manusia tentang hukum Inggris dalam kaitannya dengan hal-hal seperti tanggal pembebasan narapidana, sidang disipliner, atau akses narapidana ke nasihat hukum dan pengadilan (*lib. Lazarus 2004*).

Sebaliknya, **Murphy** dan **Whitty** menyarankan, meskipun telah ada perkembangan dalam diskusi doktrinal dan substantif di antara para pengacara hak asasi manusia, sehubungan dengan penjara seperti di bidang lain, masih ada 'sangat sedikit literatur empiris dalam hukum tentang dampak hak asasi manusia [di Inggris Raya], baik dalam hal permulaan klaim hak dan implementasi norma hak '(2007: 801). Dalam nada yang sama, tetapi pada kanvas Eropa yang lebih luas, *van Zyl Smit* dan *Snacken* (2009) mengiklankan di sub-judul buku mereka tentang kepedulian untuk

menghubungkan *Penology and Human Rights*. Mereka berpendapat bahwa ‘meningkatnya pengakuan hak asasi manusia narapidana di Eropa, termasuk prinsip penggunaan penjara sebagai upaya terakhir’ (2009: xvii) sebagian disebabkan oleh penelitian empiris tentang karakteristik penjara sebagai institusi, dan efek pemenjaraan, serta refleksi yang lebih luas tentang teori hukuman dan tujuan pemenjaraan. Ini tampaknya merupakan argumen yang kuat untuk saling belajar.

Kedua, tampaknya tidak lagi cukup baik bagi para kriminolog untuk memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada masalah domestik segelintir negara terkaya di dunia. Untuk semua yang kriminolog memiliki catatan panjang dan dalam banyak kasus terhormat perhatian atas efek ketidaksetaraan di negara-negara tersebut, rekam jejak bidang keingintahuan yang tulus di, atau perhatian dengan, mayoritas negara atau orang di dunia terbatas pada terbaik. Mengingat hal tersebut di atas, ini tidak lagi berkelanjutan. Seperti yang dikatakan *Agozino (2010)* dengan tajam, kriminologi ‘Barat’ ‘modernis’ telah terlalu lama ‘mengubur kepalanya di salju’ Eropa dan Amerika Utara. Hal ini telah mengakibatkan, terlepas dari upaya sejumlah perintis (mis. *Sumner, 1992; Cain, 2000; Agozino, 2005*), dalam ketidaktahuan selektif tentang dampak kebijakan dan intervensi Barat yang telah, dan terus terjadi, di sekitar Dunia. Ini mengalihkan perhatian dari perasaan di mana pengalaman masyarakat Afrika atau Amerika Latin mungkin meredam atau mengoreksi klaim yang konon menggeneralisasikan kriminologi ‘Anglo-Saxon’. Dengan kata lain, dunia yang diwujudkan oleh efek historis berturut-turut dari kolonialisme dan yang terakhir dari globalisasi kapitalis adalah sama terhubungnya dengan ketidaksetaraan—sebuah ‘multiplisitas tanpa persatuan’, seperti yang dikatakan *Beck (2000: 11)*. Seperti yang telah kita catat di tempat lain (*Melossi et al., 2011b: 6*) kekhawatiran ini terus menjadi krusial melekat dan kekhususan pertanyaan kriminal di setiap konfigurasi nasional dan historis,

pada saat yang sama menarik perhatian pada cara-cara di mana berbagai bentuk *savoir* bergerak di sepanjang garis pengaruh atau afinitas historis, ekonomi, politik, dan bahasa.

Salah satu versi dari argumen terakhir baru-baru ini diteliti secara fasih dan berpengaruh oleh **Loïc Wacquant**. Dalam pandangan **Wacquant**, konvergensi antara bahasa dan praktik sistem peradilan pidana di seluruh dunia tidak hanya dihasilkan dari tanggapan umum terhadap masalah serupa, belum juga dari adopsi pragmatis atau tiruan dari pelajaran atau teknik. Sebaliknya, Wacquant mendeteksi dominasi serangkaian model dan slogan tertentu—‘jendela pecah’, ‘toleransi nol’, ‘penjara tanpa embel-embel’, dan sebagainya—yang, dalam pandangannya, merupakan bagian integral dari cara ‘hegemoni neoliberalisme’ (2009b: 5) mengawasi ketidakamanan dan ketakutan yang ditimbulkannya sendiri. Perkembangan ini, dalam hal ini, datang sebagai satu paket dan secara aktif dan penuh semangat diekspor oleh lembaga pemikir, konsultan, dan peminjil lain untuk neo-liberalisme dan untuk solusi penologis dan kebijakannya. Dengan cara ini, Wacquant berpendapat, ‘penyebaran’ toleransi nol ‘mengambil bagian dari lalu lintas internasional yang lebih luas dalam formula kebijakan yang mengikat bersama aturan pasar, penghematan sosial, dan pembesaran hukuman’ (Wacquant, 2009b: 171).

Ketiga, dan terakhir untuk saat ini, kita perlu menunjukkan kesadaran bahwa dunia globalisasi tidaklah ‘datar’. Perhatian dengan implikasi perkembangan tingkat makro untuk teori dan penelitian kriminologi sekarang (tidak lebih dari pada waktu lainnya) hanya sebuah lisensi untuk memilih novel, gaya, dan penyapuan yang membumi, empiris, dan lokal, atau untuk melepaskan diri dari masalah kebijakan dan politik yang rumit dan terperinci di mana pun kita bertemu dengannya. Di tengah beberapa transformasi yang berpotensi menjangkau jauh di dunia yang kita tinggali, masih banyak yang bisa dikatakan untuk strategi penelitian yang terus memperhatikan hal-hal seperti pengalaman, keyakinan, nilai,

kepekaan, dan perasaan. Lebih jauh lagi, banyak yang bisa diperoleh dari upaya memahami aspek- aspek perubahan sosial dan politik global secara mikroskopis—melalui etnografi, dan observasi, dan berbicara dengan orang-orang tentang tekstur kehidupan sehari-hari mereka. Dimensi kehidupan sosial yang dilambangkan dengan gagasan ‘budaya’ berlanjut, singkatnya, menjadi materi dan seharusnya mendapat perhatian kriminologis dengan benar.

Mereka penting karena perubahan sosial tingkat makro dari jenis yang menjadi perhatian kita di sini menyaring ke dalam kehidupan, pengalaman dan disposisi, individu dan kelompok sosial (menjadi, seolah-olah, ciri-ciri budaya duniawi) dengan cara yang tidak merata dan tidak pernah sepenuhnya dapat diprediksi, dan yang tidak bisa begitu saja ‘dibaca’ dari teks dan prinsip teori sosial—dengan kata lain, mereka membutuhkan penyelidikan empiris yang sabar. Sebagian, hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan dari kumpulan penyelidikan yang kaya yang berkaitan dengan bagaimana kejahatan, ketertiban, keadilan, dan hukuman direpresentasikan melalui media cetak dan media elektronik yang semakin membingungkan dan beragam; ini menjadi salah satu rute utama yang melaluinya makna-makna profan dari pengertian-pengertian seperti keamanan, risiko, dan bahaya dan dikodekan dan diteruskan ke dalam sirkulasi budaya. Pandangan kriminologis mungkin juga berbuah (lebih jauh) di sini menuju cara-cara di mana kejahatan dan tatanan sosial terlihat dalam kehidupan, dan selalu di beberapa bagian lokal, hubungan sosial dari orang-orang yang terletak berbeda secara luas, mengejutkan, dan seringkali jauh di bawah. Jelajahi berbagai tempat dan keadaan. Masih ada kebutuhan yang kuat untuk apa yang Daly, menurut *Christie (1997)*, sebut sebagai ‘**penelitian data dekat**’ (*2011:117-19*), dan untuk imajinasi etnografi yang berkomitmen untuk menangkap hasrat dan kekhususan cara-cara di mana pertanyaan kriminal dijalani, ditransaksikan, dan diperjuangkan di seluruh dunia.

1.3 Praktik Kriminologi

Di antara cara-cara di mana kriminologi berbeda adalah konsepsi mereka tentang hubungan mereka dengan khalayak, dampak, dan pengaruh—untuk siapa dan untuk tujuan apa mereka ditulis? Modus atau model apa dari pengaruh yang mereka bayangkan dan seberapa sukses mereka dalam mewujudkannya? Karena bidang ini telah berkembang dan beragam, dengan cara yang penulis uraikan di atas, maka jawaban tersurat maupun tersirat yang ditawarkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini oleh sekolah dan praktisi yang berbeda menjadi lebih beragam dan bisa dibilang lebih diperebutkan.

Sosiologi pengetahuan implisit **Cohen** dalam *Footprints in the Sand* canggih dan apresiatif, tetapi dunia yang dibahasnya tampak lebih kecil dan dalam beberapa hal kurang kompleks daripada yang dihadapi kriminologi saat ini. Dalam periode-periode pembentukannya, sebagian besar versi peta kemungkinan cara-cara di mana kriminologi dapat digunakan di dunia membayangkan para kriminolog memiliki hubungan yang cukup akrab dengan audiens yang mereka tuju. Bagi mereka yang berada dalam ‘arus utama’—di antaranya, setidaknya di Inggris, **Radzinowicz** adalah sosok dominan dan simbolik—ini berarti pegawai negeri dan profesional senior. Jika kriminologi menghasilkan pengetahuan untuk kebijakan, ia melakukannya di lingkungan yang lokasinya lebih merupakan ruang bersama senior daripada di laboratorium. Memang setidaknya satu kritikus sosial yang waspada terhadap periode tersebut, *Raymond Williams (1983)*, berpendapat bahwa informalitas dan keramahan kasual dari pertukaran ini adalah aspek kunci dari cara di mana anggota kelompok intelektual dan politik yang dominan mempertahankan dominasi mereka dan mereproduksi a berbagi gambar dunia. Di Inggris, **Radzinowicz** adalah anggota serial Komisi Kerajaan dan badan-badan agung lainnya, seperti Dewan Penasihat Sistem Penal (*Radzinowicz, 1999*). **Nigel Walker**, penerus **Radzinowicz**

sebagai Direktur Institut Kriminologi Cambridge, adalah pegawai negeri sebelum menjadi akademisi. Beberapa analisis tentang dunia liberalisme elit yang hilang pada 1950-an dan 1960-an, dari sudut pandang 1990-an yang lebih keras dan lebih panas (*Windlesham, 1997*) kadang-kadang juga sebagian merupakan ekspresi penyesalan terhadap keadaan sosial yang menopang postur-postur tersebut, dan sirkuit komunikasi yang mudah yang merupakan ciri dari mode operasi mereka.

Untuk kaum radikal dan kritikus dari tahun 1970-an dan seterusnya ada juga lawan bicara dan kelompok referensi, tetapi mereka berbeda temperamennya—banyak dari mereka sebelumnya tidak terwakili dan tidak terdengar dalam wacana akademis. Mereka termasuk para narapidana, keluarga dari orang-orang yang meninggal dalam tahanan, dan sejumlah kelompok praktisi yang kurang beruntung seperti pekerja muda. Setidaknya secara aspirasi, dan kadang-kadang secara tulus dan efektif, akun oposisi baru tentang kriminologi melihat diri mereka terkait dengan berbagai bidang perjuangan sosial. Dari jumlah tersebut, feminisme jelas merupakan yang paling tahan lama dan yang secara fundamental memengaruhi bidang ini, karena ia memiliki sebagian besar bidang penelitian di bidang humaniora dan ilmu sosial. Namun demikian, ada juga pengakuan yang meningkat secara bertahap dari *interseksionalitas vis-à-vis ras* dan kelas (*Sokoloff dan Burgess-Proctor, 2011*).

Singkatnya, ruang posisi untuk kebijakan dan keterlibatan politik di dunia yang ditangani Cohen pada tahun 1981 tampak agak lebih sederhana. Ada kriminologi 'arus utama' yang terutama ditujukan kepada pemerintah; dan ada kriminologi radikal yang berkumpul di dalam NDC yang berorientasi pada gerakan sosial baru dan profesional radikal. Perbedaan ini bisa dibilang memiliki kegunaan terbatas di dunia di mana kriminologi telah berkembang dan terdiversifikasi dan di mana politik masalah kriminal memanas. Memikirkan hal-hal ini dewasa ini menimbulkan sejumlah

pertanyaan. Misalnya: Siapakah audiens yang didalilkan untuk penelitian kriminologi? Jika pengetahuan kriminologis saat ini beredar di ruang yang lebih diperebutkan, wacana dan kepentingan lain apa yang mengelilingi dan bersinggungan dengannya? Bagaimana pekerjaan kriminologis terlibat dengan dunia politik, kebijakan, dan media? Adakah produk sampingan yang menguntungkan dari iklim yang lebih panas, misalnya karena segala sesuatunya menjadi lebih eksplisit dan lebih jelas bermasalah? Di sisa bagian ini, penulis membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan masalah yang dipertaruhkan untuk menjawabnya. Dalam melakukannya, penulis menggunakan gerakan kebijakan berbasis bukti dalam kriminologi, dan klaim, prasangka, dan visi politik dan pemerintahan yang baik yang dimobilisasi oleh beberapa aktor kunci, sebagai contoh kasus penulis.

Dalam diskusi penulis sebelumnya tentang berbagai mode keterlibatan kriminolog dengan aksi sosial dan debat kebijakan (*Loader dan Sparks 2010*) penulis mencatat bahwa siswa kejahatan dan hukuman dari semua ‘pihak’, faksi, sekolah, dan narapidana telah menganggap serius kontribusi dari pengetahuan yang mereka hasilkan untuk kebijakan, wacana publik secara lebih luas, pengambilan keputusan, dan praktik profesional dari berbagai jenis. Seperti beberapa komentator yang bijaksana telah mengamati sesuatu seperti ini lebih atau kurang mendasar untuk lapangan (*Ericson 2003; Garland 2011*), seperti halnya di antara keprihatinan yang berasal dari ilmu sosial secara lebih umum. Posisi yang bersangkutan bervariasi dalam kepercayaan diri epistemologis mereka, dan dalam ekspektasi pengaruh langsung mereka, tetapi semuanya adalah versi dari hubungan pengetahuan/kebijakan atau pengetahuan/praktik.

Sebagian besar posisi yang saat ini dimainkan, dalam kriminologi seperti di tempat lain, memiliki kesamaan dengan—bahkan dapat dilihat sebagai versi dari—satu atau lebih upaya ‘klasik’ untuk menyelesaikan masalah hubungan pengetahuan/kebijakan yang telah dicoba pada poin-

poin sebelumnya di sejarah ilmu sosial. Misalnya, banyak argumen saat ini berdasarkan bukti dan kriminologi eksperimental (Sherman 2009) mengingatkan pada pandangan ‘ilmu demokrasi’ yang terkait dengan Harold Lasswell (1951)—salah satu yang memahami ‘tugas operasional analisis kebijakan sebagai fokus perhatian semua pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk mencapai rasionalitas maksimum mereka’ (Hoppe, 2005: 202). Pandangan ini agak kontras dengan catatan Lindblom (1959) dan Schön (1983) yang tidak kalah terkenal. Makalah Lindblom yang terkenal menawarkan visi sederhana tentang kemampuan ilmu sosial dalam lingkungan ‘inkrementalisme’ dan ‘persaingan polyarkis’. Schön membawa kita lebih jauh lagi ke arah pemahaman skeptis dan sementara tentang kemampuan pengetahuan untuk menginformasikan kebijakan. Dalam sebuah pernyataan terkenal dia menyarankan bahwa:

There is a high, hard ground where practitioners can make effective use of researchbased theory and technique, and there is a swampy lowland where situations are confusing ‘messes’ incapable of technical solution. The difficulty is that the problems of the high ground, however great their technical interest, are often relatively unimportant to clients or to the large society, while in the swamp are the problems of greatest human concern. Shall the practitioner stay on the high, hard ground where he can practice rigorously, as he understands rigor, but where he is constrained to deal with problems of relatively little social importance? Or shall he descend to the swamp where he can engage the most important and challenging problems if he is willing to forsake technical rigor? [...] There are those who choose the swampy lowland. They deliberately involve themselves in messy but crucially important problems and, when asked to describe their methods of inquiry, they speak of experience, trial and error, intuition, and muddling through. (Schön, 1983: 42–3)

Terjemahan:

Ada dasar yang tinggi dan keras di mana praktisi dapat menggunakan teori dan teknik berbasis penelitian secara efektif, dan ada dataran rendah berawa di mana situasi membingungkan ‘kekacauan’ tidak mampu memberikan solusi teknis. Kesulitannya adalah bahwa masalah dataran tinggi, betapapun besarnya minat teknis mereka, seringkali relatif tidak penting bagi klien atau masyarakat luas, sedangkan di rawa adalah masalah yang paling menjadi perhatian manusia. Akankah praktisi tetap berada di tempat yang tinggi dan keras di mana dia bisa berlatih dengan keras, karena dia memahami ketelitian, tetapi di mana dia dibatasi untuk menangani masalah yang secara sosial relatif kecil penting? Atau akankah dia turun ke rawa di mana dia bisa menghadapi masalah yang paling penting dan menantang jika dia mau meninggalkan kekakuan teknis? [. . .] Ada yang memilih dataran rendah berawa. Mereka sengaja melibatkan diri dalam masalah yang berantakan tetapi sangat penting dan, ketika diminta untuk menjelaskan metode penyelidikan mereka, mereka berbicara tentang pengalaman, coba-coba, intuisi, dan kekacauan. (*Schön, 1983: 42–3*)

Ucapan ini mengingatkan kita akan perlunya mengakui spektrum posisi tentang kelayakan dukungan ilmiah untuk keputusan. Versi yang paling bersemangat dari dukungan ini membayangkan apa yang *Hoppe (2005: 202)* sebut sebagai ‘saintisasi sistem pengetahuan’, yang dicirikan oleh ‘penggunaan instrumen atau penelitian sebagai data’, dalam mendukung langsung pengambilan keputusan. Sebagian besar pemanfaatan pengetahuan, dalam kebijakan kejahatan atau di mana pun,

secara historis tidak terlihat seperti ini, meskipun para pendukung gerakan kebijakan berbasis bukti dalam peradilan pidana dalam beberapa tahun terakhir hampir mengklaim bahwa itu seharusnya.

Pertanyaan kontroversi dengan demikian sangat penting dalam kaitannya dengan peredaran dan penggunaan pengetahuan tentang kejahatan dan hukuman. Seperti yang ditunjukkan Boswell (mengacu pada penggunaan keahlian sehubungan dengan bidang lain dari kontroversi intens, kebijakan imigrasi), dalam kondisi kontestasi tinggi ‘organisasi yang menghadapi penentangan terhadap preferensi kebijakan mereka mungkin merasa bijaksana untuk menggunakan sumber daya tambahan untuk memberikan kredibilitas untuk pandangan mereka’ (2008: 474). Hal yang Boswell sebut sebagai ‘mode penyelesaian teknokratis’ berlaku ketika bukti dan analisis ilmiah diterima sebagai kriteria yang sah untuk menentukan preferensi. Ini adalah kondisi dimana versi yang lebih literal dari gerakan kebijakan berbasis bukti berpikir dapat atau harus menang di sebagian besar waktu, tetapi yang menurut **Boswell** dan lainnya sebenarnya agak jarang (*cf. Hope, 2004*). Sebaliknya, mode ‘demokratis’ berlaku di bidang kebijakan di mana dukungan rakyat dianggap menentukan. Biasanya, ini adalah area di mana konflik berkisar pada perbedaan nilai atau kepentingan, daripada persaingan klaim pengetahuan (*Radaelli, 1999*).

Boswell membuat perbedaan terkait antara ‘organisasi yang berorientasi pada tindakan’ dan ‘organisasi politik’—yang pertama mencari ‘pengetahuan instrumental’ dan mendukung cara penyelesaian teknokratis. Pada prinsipnya, ada pertanyaan tentang siapa yang menawarkan nasihat terbaik yang harus relatif mudah bahkan jika secara teknis sangat rumit. Tetapi banyak organisasi yang melanggar batasan ini, dan hubungannya dengan pengetahuan ahli lebih bervariasi dan ambigu. Penulis, penulis mungkin menyarankan, sistem penjara dalam banyak hal adalah organisasi aksi dengan kebutuhan teknis yang jelas. Pemolisian

adalah fungsi tindakan pemerintah dalam banyak hal dan memiliki banyak persyaratan untuk jenis pengetahuan yang sangat instrumental. Tetapi keduanya juga merupakan organisasi politik, dan hubungannya dengan pengetahuan ahli sangat kompleks. Mereka juga menghadapi kontroversi besar, ketidaksepakatan normatif yang serius, mengerahkan kekuasaan atas warga lain, dan beroperasi di lingkungan di mana dukungan publik, pemahaman, dan legitimasi merupakan masalah kritis. Ada janji dan risiko dalam hal ini. Kekhawatiran Boswell adalah kenyataan dari mode operasi ini yang menentukan bahwa keahlian biasanya digunakan dalam justifikasi preferensi, atau seperti yang dikatakan **Ericson**, sebagai retorika.

Hal ini bukan nasihat keputusan. Memang itu bukan berita buruk sama sekali. Siswa pemanfaatan pengetahuan hanya menceritakan cerita yang lebih termodulasi tentang kondisi nyata di mana pengetahuan 'transfer' atau 'dipertukarkan'. Ini adalah cerita tentang cara-cara yang berbeda dalam menggambar dan mendefinisikan batas-batas antara bidang produksi dan penggunaan, dan karenanya membedakan konsepsi 'kontrak antar-lembaga' (tidak harus kontrak formal—sering kali kesepakatan yang relatif informal) antara berbagai jenis yang berbeda. aktor yang pekerjaannya mengharuskan mereka untuk beroperasi melintasi batas (*Hoppe, 2005*).

1.4 Rangkuman

Dalam pandangan penulis, refleksi ini menawarkan peluang mediasi antara posisi yang tampak dogmatis. Ada lebih banyak pemikiran tentang pengetahuan dan kebijakan (atau tentang 'kriminologi publik?') Daripada sekadar berpegang pada penelitian advokasi sebagai pengganti sains, atau sebaliknya. Beberapa argumen yang berkisar di kedua sisi tidak berlaku, terutama ketika mereka mencoba menggambarkan bidang secara biner. Salah jika mengatakan bahwa kriminolog dari berbagai garis tidak tertarik

pada tujuan publik. Sama salahnya untuk berpendapat bahwa orang-orang yang bekerja dengan berbagai metode dan dalam tradisi yang beragam entah bagaimana mengabaikan bukti. Sebaliknya, mengangkat senjata melawan ‘kebijakan berbasis bukti’ seperti itu (karena asosiasi lokalnya saat ini dan alokasi retorik) tampaknya merupakan hal yang aneh untuk dilakukan. Yang jauh lebih menarik adalah argumen yang bisa didapat tentang apa artinya mendasarkan kebijakan seseorang dalam bukti, atau untuk memberlakukan kebijakan yang konsisten dengan bukti, dll. Dan argumen tersebut telah berkembang lebih jauh di bidang lain, misalnya dalam kedokteran tetapi juga sampai batas tertentu dalam pendidikan, daripada yang mereka lakukan selama ini dalam kriminologi.

Kita membutuhkan perspektif yang lebih luas dan lateral. Penulis juga membutuhkan perspektif sejarah yang lebih baik. Ini bukan seolah-olah pertanyaan tentang bagaimana ilmu sosial ‘berlaku’, bagaimana hal itu dapat dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis, dan tujuan apa yang dapat dan tidak dapat diminta untuk dilayani, belum diperdebatkan secara intensif. Akhirnya, kita mungkin mendapat manfaat dari orientasi yang lebih kosmopolitan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini—yang mendorong kita untuk berpikir lebih sistematis dengan cara komparatif tentang hubungan kelembagaan antara produksi penelitian dan pemanfaatan kebijakan di berbagai negara. Masih banyak pekerjaan konseptual dan empiris yang harus dilakukan.

1.5 Bahan Diskusi

1. Apa saja manfaat mempelajari Kriminologi untuk studi anda?
2. Menurut anda, apa yang menarik dari mempelajari Kriminologi?
3. Bagaimana hubungan antara hukum positif dan Kriminologi?
4. Adakah manfaat mempelajari Kriminologi untuk perkembangan pembuatan kebijakan kriminal?

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, A. (2001), *Chaos of Disciplines*, Chicago: University of Chicago Press.
- Agozino, B. (2005), 'Crime, Criminology and Postcolonial Theory: Criminological Reflections on West Africa', in J. Sheptycki (ed.), *Transnational and Comparative Criminology*, London: Glasshouse Press.
- (2010), 'What is Criminology?: A Control-Freak Discipline!', *African Journal of Criminology and Justice Studies* 4/1: i–xx.
- Akers, R. (1995), *Linking Sociology and its Specialties: The Case of Criminology*, *Social Forces*, 71: 1–16.
- Ashworth, A. and Zedner, L. (2008), 'Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure and Sanctions', *Criminal Law and Philosophy*, 2: 21–51.
- Barker, V. (2009), *The Politics of Imprisonment*, Oxford: Oxford University Press.
- Barnes, B. (2000), *Understanding Agency*, London: Sage.
- Bauman, Z. (2001), 'Wars of the Globalization Era', *European Journal of Social Theory*, 4(1): 11–28.
- Beck, U. (2000), *What is Globalization?*, Cambridge: Polity.
- Blunkett, D. (2000), 'Influence or Irrelevance: Can Social Science Improve Government', speech to Economic and Social Research Council, 2 February.
- Boswell, C. (2008), 'The Political Functions of Expert Knowledge: Knowledge and Legitimation in European Union Immigration Policy', *Journal of European Public Policy*, 15(4): 471–88.
- Bosworth, M and Hoyle, C. (eds) (2011), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (2004), *Science of Science and Reflexivity*, Cambridge: Polity.
- Braithwaite, J. (2002), *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press.

- (2011), 'Opportunities and Dangers of Capitalist Criminology', in S. Parmentier, I. Aertson, J. Maesschalck, L. Paoli, and L. Walgrave (eds), *The Sparking Discipline of Criminology: John Braithwaite and the Construction of Critical Social Science and Social Justice*, Leuven: Leuven University Press.
- and Pettit, P. (1990), *Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice*, Oxford: Oxford University Press.
- Bratton, W. (1998), *Turnaround: How America's Top Cop Reversed the Crime Epidemic*, New York: Random House.
- Butler, R. (1974), 'The Foundation of the Institute of Criminology in Cambridge', in R. Hood (ed.), *Crime, Criminology and Public Policy*, London: Heinemann.
- Cain, M. (2000), 'Orientalism, Occidentalism and the Sociology of Crime', in D. Garland and R. Sparks (eds), *Criminology and Social Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Carlen, P. (2011), 'Against Evangelism in Academic Criminology: For Criminology as a Scientific Art', in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- Castells, M. (1996), *The Information Age: Economy, Society and Culture: Vol. I—The Rise of the Network Society*, Oxford: Basil Blackwell.
- (1998), *The Information Age: Economy, Society and Culture: Vol. III—End of Millennium*, Oxford: Basil Blackwell.
- Christie, N. (1997), 'Four Blocks Against Insight: Notes on the Over-socialization of Criminologists', *Theoretical Criminology*, 1(1): 13–23.
- Cohen, S. (ed.) (1971), *Images of Deviance*, Harmondsworth: Penguin.
- (1980), *Folk Devils and Moral Panics*, London: Paladin.
- (1985), *Visions of Social Control*, Cambridge: Polity.
- (1988), *Against Criminology*, New Brunswick, NJ: Transaction.
- (1990), *Intellectual Scepticism and Political Commitment: The Case of Radical Criminology*, University of Amsterdam: Bonger Institute of Criminology.

- (1996), *Crime and Politics: Spot the Difference*, *British Journal of Sociology*, 47(1): 1–21.
- Collins, H. and Evans, R. (2007), *Rethinking Expertise*, Chicago: University of Chicago Press.
- Collins, H. and Pinch, T. (1998), *The Golem: What you Should Know about Science*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cuneen, C. (2011), *Postcolonial Perspectives for Criminology*, in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?* Oxford: Oxford University Press.
- Currie, E. (1985), *Confronting Crime: An American Challenge*, New York: Pantheon.
- (2011), *Thinking about Criminology*, *British Journal of Criminology*, 51(4): 710–13.
- Daly, K. (2011), *Shake it up Baby: Practising Rock ‘n’ Roll Criminology*, in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- Dilulio, J. (1990), *Governing Prisons*, New York: Simon and Schuster.
- Douglas, M. (1992), *Risk and Blame*, London: Routledge.
- Downes, D. (1988), *The Sociology of Crime and Social Control in Britain, 1960–87*, in P. Rock (ed.), *A History of British Criminology*, Oxford: Oxford University Press.
- and ROCK, P. (eds) (1979), *Deviant Interpretations*, London: Martin Robertson.
- and MORGAN, R. (1994), *Hostages to Fortune: The Politics of Law and Order in Post-war Britain*, in M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, 1st edn, Oxford: Oxford University Press.
- Dzur, A. (2008), *Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional Ethics, Identity, and Practice*, University Park, PA: Penn State Press.
- Einstadter, W. and Henry, S. (2006), *Criminological Theory: An Analysis of*

- its Underlying Assumptions*, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
- Ericson, R. (2003), 'The Culture and Power of Criminological Research', in L. Zedner and A. Ashworth (eds), *The Criminological Foundations of Penal Policy*, Oxford: Oxford University Press.
- Farrington, D. and Welsh, B. (2007), *Saving Children from a Life of Crime*, Oxford: Oxford University Press.
- Fitzgerald, M., McLennan, G., and Pawson, J. (eds) (1981), *Crime and Society: Readings in History and Theory*, Milton Keynes: Open University Press.
- Fuller, S. (1993), *Philosophy of Science and Its Discontents*, London: Guilford Press.
- Garland, D. (1988), 'British Criminology before 1935', *British Journal of Criminology*, 28(2): 1–17.
- (2001), *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford: Oxford University Press.
- (2002), 'Of Crimes and Criminals: The Development of Criminology in Britain', in M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, 3rd edn, Oxford: Oxford University Press.
- (2011), 'Criminology's Place in the Academic Field', in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- and SPARKS, R. (2000), 'Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times', in D. Garland and R. Sparks (eds), *Criminology and Social Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Hagan, J. and Raymond-Richmond, W. (2009), *Darfur and the Crime of Genocide*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, J. (1933), 'Some Basic Problems of Criminology', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 169: 119–34.
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., and Roberts, B. (1978), *Policing the Crisis*, London: Macmillan.
- Haney, P. (2008), *The Americanization of Social Science: Intellectuals and Public Responsibility in the Postwar United States*, Philadelphia: Temple University Press.

- Heidensohn, F. (2000), *Sexual Politics and Social Control*, Buckingham: Open University Press.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., and Perraton, J. (1999), *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, Cambridge: Polity.
- Hindess, B. (1973), *The Uses of Official Statistics in Sociology*, London: Macmillan.
- Hirsch, A. Von (1996), *Censure and Sanctions*, Oxford: Oxford University Press.
- Hope, T. (2004), 'Pretend it Works: Evidence and Governance in the Evaluation of the Reducing Burglary Initiative', *Criminology & Criminal Justice*, 4/3: 287–308.
- (2011), 'Official Criminology and the New Crime Sciences', in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- and Walters, R. (2008), *Critical Thinking about the Uses of Research*, London: Centre for Crime and Justice Studies.
- Hoppe, R. (2005), 'Rethinking the Science-Policy Nexus: From Knowledge Utilization and Science Technology Studies to Types of Boundary Arrangements', *Poiesis and Praxis*, 3(3): 199–215.
- Irwin, A. and Michael, M. (2003), *Science, Social Theory and Public Knowledge*, Buckingham: Open University Press.
- Jones, T. and Newburn, T. (2006), *Policy Transfer and Criminal Justice*, Buckingham: Open University Press.
- Kelling, G. and Coles, C. (1998), *Fixing Broken Windows*, New York: Free Press.
- Kerner, H.-J. (1998), 'The Global Growth of Criminology', *International Annals of Criminology*, 36(1): 27–42.
- Kitsuse, J. and Cicourel, A. (1963), 'A Note on the Uses of Official Statistics', *Social Problems*, 11: 131–9.
- Lacey, N. (2008), *The Prisoners' Dilemma: The Political Economy of Punishment in Comparative Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Lamont, M. (2009), *How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judgement*, Camb., Mass.: Harvard University Press.
- Lasswell, H. (1951), 'The Policy Orientation', in D. Lerner and H. Lasswell (eds), *The Policy Sciences of Democracy*, Palo Alto: Stanford University Press.
- Latour, B. (1987), *Science in Action*, Camb., Mass.: Harvard University Press.
- Lazarus, L. (2004), *Contrasting Prisoners' Rights*, Oxford: Oxford University Press.
- Lee, M. (ed.) (2007), *Human Trafficking*, Cullompton: Willan.
- (2011), *Trafficking and Global Crime Control*, London: Sage.
- Lindblom, C. (1959), 'The Science of "Muddling Through"', *Public Administration Review*, 19(2): 79–88.
- Loader, I. (2006), 'Fall of the "Platonic Guardians": Liberalism, Criminology and Political Responses to Crime in England and Wales', *British Journal of Criminology*, 46(4): 561–86.
- (2010), 'Is it NICE? The Appeal, Limits and Promise of Translating a Health Innovation into Criminal Justice', *Current Legal Problems*, 63: 72–91.
- (2011), 'Playing with Fire? Democracy and the Emotions of Crime and Punishment', in S. Karstedt, I. Loader, and H. Strang (eds), *Emotions, Crime and Justice*, Oxford: Hart.
- and WORRALL, A. (1995), 'Identikit Picture of a Subject', *Times Higher Education Supplement*. Available at: www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=161812§ioncode=7.
- LOADER, I. and SPARKS, R. (2004), 'For an Historical Sociology of Crime Policy in England and Wales since 1968', *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 7(2): 5–32.
- and — (2007), 'Contemporary Landscapes of Crime, Order and Control: Governance, Risk and Globalization', in M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, 4th edn, Oxford: Oxford University Press.

- and — (2010) *Public Criminology?* London: Routledge.
- and — (2011), 'Criminology and Democratic Politics: A Reply to Critics', *British Journal of Criminology*, 51/4: 734–8.
- LODGE, T. (1974), 'The Founding of the Home Office Research Unit', in R. Hood (ed.), *Crime, Criminology and Public Policy*, London: Heinemann.
- MARX, K. (1852/2001), *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, Berlin: Mondial.
- MATTHEWS, R. (2005), 'The Myth of Punitiveness', *Theoretical Criminology*, 9(2): 175–201.
- MEAGHER, L., LYALL, C. and NUTLEY, S. (2008), 'Flows of Knowledge, Expertise and Influence: A Method for Assessing Policy and Practice Impacts from Social Science Research', *Research Evaluation*, 17/3: 163–73.
- MELOSSI, D. (2008), *Controlling Crime, Controlling Society*, Cambridge: Polity Press.
- , SOZZO, M., and SPARKS, R. (eds) (2011a), *The Travels of the Criminal Question*, Oxford: Hart.
- , —, and — (2011b), 'Introduction: Criminal Questions— Cultural Embeddedness and Global Mobilities', in D. Melossi, M. Sozzo, and R. Sparks (eds), *The Travels of the Criminal Question*, Oxford: Hart.
- MILLER, L. (2009), *The Perils of Federalism: Race, Poverty, and the Politics of Crime Control*, Oxford: Oxford University Press.
- MUNRO, V. (2006), 'Stopping Traffic? A Comparative Study of Responses to the Trafficking in Women for Prostitution', *British Journal of Criminology*, 46(2): 318–33.
- MURPHY, T. and WHITTY, N. (2007), 'Risk and Human Rights in UK Prison Governance', *British Journal of Criminology*, 47(5): 798–816.
- MURRAY, C. (1984), *Losing Ground: American Social Policy 1950–1980*, New York: Basic Books.
- NEWBURN, T. (2011), 'Criminology and Government: Some Reflections on Recent Developments in England', in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.

- OLIN WRIGHT, E. (2010), *Envisioning Real Utopias*, London: Verso.
- O'MALLEY, P. (2000), 'Criminologies of Catastrophe? Understanding Criminal Justice on the Edge of the New Millennium', *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 33: 153–67.
- (2008), 'Experiments in Criminal Justice', *Theoretical Criminology*, 12(4): 451–69.
- (2010) *Crime and Risk*, London: Sage.
- PAGE, J. (2012), 'Punishment and the Penal Field', in J. Simon and R. Sparks (eds), *The Sage Handbook of Punishment and Society*, London: Sage.
- PARSONS, W. (2002), 'From Muddling Through to Muddling Up— Evidence Based Policy Making and the Modernisation of British Government', *Public Policy and Administration*, 17(3): 43–60.
- PEARSON, G. (1975), *The Deviant Imagination*, London: Macmillan.
- PETTTI, P. (2001), 'Is Criminal Justice Politically Feasible?', *Buffalo Criminal Law Review* 5: 427–50.
- RADAELLI, C. (1999), *Technocracy and the European Policy Process*, London: Longman.
- RADINOWICZ, L. (1961), *In Search of Criminology*, London: Heinemann.
- (1988), *The Cambridge Institute of Criminology*, London: Home Office.
- (1999), *Adventures in Criminology*, London: Routledge.
- RAFTER, N. (ed.) (2009), *The Origins of Criminology*, London: Routledge.
- REINER, R. (2006), 'Beyond Risk: A Lament for Social Democratic Criminology', in T. Newburn (ed.), *The Politics of Crime Control*, Oxford: Oxford University Press.
- (2007), *Law and Order: An Honest Citizen's Guide to Crime and Control*, Cambridge: Polity.
- REPKO, A. (2008), *Interdisciplinary Research: Process and Theory*, London: Sage.
- ROCK, P. (2005), 'Chronocentrism and British Criminology', *British Journal of Sociology*, 56(3): 473–791.
- RYAN, M. (1978), *The Acceptable Pressure Group: A Case Study of Radical Alternatives to Prison and the Howard League*, Farnborough: Saxon House.

- (2003), *Penal Policy and Political Culture in England and Wales*, London: Waterside Press.
- SAMPSON, R. and LAUB, J. (1993), *Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- and — (2003), *Shared Beginnings, Divergent Lives*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- SAVAGE, M. (2010), *Identities and Change in Britain since 1940*, Oxford: Oxford University Press.
- SAVELSBERG, J. (2011), *Crime and Human Rights*, London: Sage.
- and SAMPSON, R. (2002), 'Mutual Engagement: Criminology and Sociology?', *Crime, Law and Social Change*, 37: 99–105.
- and FLOOD, S. (2004), 'Criminological Knowledge: Period and Cohort Effects in Scholarship', *Criminology*, 42(4): 1009–41.
- , CLEVELAND, L., and KING, R. (2004), 'Institutional Environments and Scholarly Work: American Criminology, 1951–1993', *Social Forces*, 82/4: 1275–302.
- , KING, R., and CLEVELAND, L. (2002), 'Politicized Scholarship?: Science on Crime and the State', *Social Problems*, 49(3): 327–48.
- SCHÖN, D. (1983), *The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action*, London: Temple Smith.
- SHEARING, C. and WOOD, J. (2007), *Imagining Security*. Cullompton: Willan.
- SHERMAN, L. (2009), 'Evidence and Liberty: The Promise of Experimental Criminology', *Criminology & Criminal Justice*, 9(1): 5–28.
- SIMESTER, A. and VON HIRSCH, A. (2011), *Crimes, Harms and Wrongs*, Oxford: Hart.
- SIMON, J. (2007), *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, New York: Oxford University Press.
- SMART, C. (1977), *Women, Crime and Criminology*, London: RKP.

- SMITH, C., ZHANG, S., and BARBALET, R. (eds) (2011), *The Routledge Handbook of International Criminology*, London: Routledge.
- SOKOLOFF, N. and BURGESS-PROCTOR, A. (2011), 'Remembering Criminology's "Forgotten Theme": Seeking Justice in US Crime Policy Using an Intersectional Approach', in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- STEARNS, M. (2011), *Demanding Democracy: American Radicals in Search of a New Politics*, Princeton: Princeton University Press.
- SUMNER, C. (ed.) (1982), *Crime, Justice and Underdevelopment*, London: Heinemann.
- SUTHERLAND, E., CRESSEY, D., and LUCKENBILL, D. (1992), *Principles of Criminology*, 11th edn, Dix Hills, NY: General Hall.
- SWIFT, A. and WHITE, S. (2008), 'Political Theory, Social Science, and Real Politics', in D. Leopold and M. Stearns (eds), *Political Theory: Methods and Approaches*, Oxford: Oxford University Press.
- TAYLOR, I. and TAYLOR, L. (eds) (1975), *Politics and Deviance*, Harmondsworth: Penguin.
- , WALTON, P., and YOUNG, J. (1973), *The New Criminology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- , ——, and —— (eds) (1975), *Critical Criminology*. London: Routledge & Kegan Paul.
- TONRY, M. (ed.) (2007), *Crime, Punishment and Politics in Comparative Perspective*, Chicago: University of Chicago Press.
- UNGER, R. M. (1987), *Social Theory: Its Situation and Its Task*, Cambridge: Cambridge University Press.
- WACQUANT, L. (2009a), *Punishing the Poor*, Durham, NC: Duke University Press.
- (2009b), *Prisons of Poverty*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- WALTERS, R. (2003), *Deviant Knowledge: Criminology, Politics and Policy*, Cullompton: Willan.

- WELSH, B. and FARRINGTON, D. (2001), *Toward an Evidence- Based Approach to Preventing Crime*, The ANNALS of the American Academy of Social and Political Science, 578: 158– 73.
- WENGER, E. (1998), *Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity*, Cambridge: Cambridge University Press.
- WIKSTRÖM, P.-O. (2010), *Explaining Crime as Moral Actions*, in S. Hitlin and S. Vaisey (eds), *Handbook of the Sociology of Morality*, New York: Springer.
- (2010), *Situational Action Theory*, in B. Fisher and S. Lab (eds), *Encyclopaedia of Victimology and Crime Prevention*, Beverly Hills: Sage.
- and SAMPSON, R. (eds), (2006) *The Explanation of Crime: Context, Mechanisms and Development*, Cambridge: Cambridge University Press.
- WILES, P. (2002), *Criminology in the 21st Century: Public Good or Private Interest?*, The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 35(2): 238–52.
- WILLIAMS, R. (1983), *Towards 2000*, London: Chatto and Windus.
- WILSON, J. Q. (1985), *Thinking About Crime (rev edn)*, New York: Basic Books.
- and KELLING, G. (1982), *Broken Windows: The Police and Neighbourhood Safety*, Atlantic Monthly, 249(3): 29–38.
- WIMMER, A. and GLICK SCHILLER, N. (2002), *Methodological Nationalism and Beyond*, Global Networks, 2(4): 301–34.
- WINDLESHAM, L. (1996), *Responses to Crime—Volume 3: Legislating with the Tide*, Oxford: Clarendon.
- YEARLEY, S. (2005), *Making Sense of Science*, London: Sage.
- YOUNG, J. (1981), *Thinking Seriously about Crime: Some Models of Criminology*, in M. Fitzgerald, G. McLennan, and J. Pawson (eds), *Crime and Society: Readings in History and Theory*, London: Routledge/Open University.
- (1994), *Incessant Chatter: Recent Paradigms in Criminology*, in M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, 1st edn, Oxford: Oxford University Press.

- ZEDNER, L. (2003), *Useful Knowledge? Debating the Role of Criminology in Post-war Britain*, in L. Zedner and A. Ashworth (eds), *The Criminological Foundations of Penal Policy*, Oxford: Oxford University Press.
- (2007), *Pre-crime and Post-criminology*, *Theoretical Criminology*, 11(2): 261–81.
- (2011), *Putting Crime Back on the Criminological Agenda*, in M. Bosworth and C. Hoyle (eds), *What is Criminology?*, Oxford: Oxford University Press.
- ZIMRING, F. and JOHNSON, D. (2006), *Public Opinion and the Governance of Punishment in Democratic Political Systems*, *The ANNALS of the American Academy of Social and Political Science* 605(1): 265–80.
- ZYL SMIT, D. VAN and SNACKEN, S. (2009), *Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human Rights*, Oxford: Oxford University Press.

BAB 2

KRIMINOLOGI DALAM PANDANGAN TEORI SOSIOLOGI

2.1 Penyimpangan dan Aturan Sosial

Banyak teori yang menganggap bahwa kejahatan adalah konsekuensi dari regulasi sosial yang rusak. Orang dikatakan menyimpang karena disiplin dan otoritas masyarakat begitu cacat sehingga mereka hanya memberikan sedikit batasan atau arahan moral. Ide ini sangat kuno, mendahului kemunculan sosiologi itu sendiri, tetapi kelahiran formalnya menjadi teori terkait erat dengan anomie dan sosiolog Prancis, **Émile Durkheim**. Durkheim memberikan dua arti yang agak berbeda untuk anomie, atau ketidak normalan. Dalam *The Division of Labour in Society*, yang diterbitkan pada tahun 1893, dan dalam *Suicide*, yang diterbitkan pada tahun 1897, ia menegaskan bahwa masyarakat Prancis berada dalam transisi yang tidak mudah dari satu keadaan solidaritas atau integrasi sosial ke yang lain. Sebuah masyarakat tanpa pembagian kerja yang rumit bertumpu pada apa yang dia sebut (mungkin menyesatkan) solidaritas mekanis dari orang-orang yang tidak hanya bereaksi sama terhadap masalah, tetapi juga melihat bahwa setiap orang di sekitar mereka bereaksi sama terhadap masalah-masalah itu, dengan demikian meminjamkan objektivitas, skala, kebulatan suara, dan soliditas pada respon moral, dan membawa potensi ketidaksetujuan dan represi besar-besaran untuk membebani yang menyimpang.

Tatanan sosial seperti itu dianggap terletak pada masa lalu yang lebih sederhana dari masyarakat pra-industri yang kurang terdiferensiasi. Masa depan masyarakat industri akan dibedakan oleh keadaan solidaritas organik, solidaritas yang sesuai dengan pembagian kerja yang kompleks. Orang-orang kemudian akan dialokasikan berdasarkan prestasi dan usaha ke posisi yang sangat beragam, dan mereka tidak hanya akan mengakui keabsahan cara pemberian penghargaan, tetapi juga mengakui sangat diperlukannya apa yang masing-masing lakukan dalam pekerjaannya untuk orang lain dan untuk orang lain. kebaikan bersama. Solidaritas organik dengan demikian memiliki kontrol yang khas pada dirinya sendiri: 'Regulasi ekonomi belaka tidaklah cukup. . . harus ada regulasi moral, aturan moral yang menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu pekerjaan tertentu dalam kaitannya dengan mereka dalam pekerjaan lain' (*Giddens, 1972: 11*). Orang mungkin tidak lagi berpikir secara serempak, respon moral mereka mungkin tidak substansial dan tidak terbagi, tetapi mereka harus mampu menyusun perbedaan mereka secara damai melalui sistem keadilan restitutif yang menebus kerugian yang diderita.

Perbedaan Durkheim antara dua bentuk solidaritas dan mode kontrol yang menyertainya secara antropologis mencurigakan (lihat *Llewellyn dan Hoebel, 1941*), tetapi dalam analisisnya tentang keadaan liminal di antara keduanya itulah para kriminolog paling tertarik. Dalam transisi itu, di mana kapitalisme dianggap memberlakukan 'pembagian kerja paksa', orang-orang tidak menyetujui pembagian hadiah maupun dalam otoritas moral ekonomi atau negara. Mereka berkewajiban untuk bekerja dan bertindak dalam masyarakat yang tidak hanya menikmati sedikit legitimasi tetapi juga memiliki kendali yang tidak lengkap atas keinginan mereka. Dalam pengaturan seperti itu, dipegang, 'sifat manusia [adalah untuk] selamanya tidak puas, terus-menerus untuk maju, tanpa bantuan atau istirahat, menuju tujuan yang tidak pasti' (*Durkheim, 1952: 256*). Regulasi moral relatif tidak

efisien dan orang juga bebas untuk menyimpang, mungkin dengan cara yang menentang pengaturan politik dan sosial yang ada (*Sherman, 2010*). Inilah arti pertama yang diberikan Durkheim kepada anomie. Yang kedua akan dikunjungi di bawah.

Mengingat corak lain, yang khas Amerika, oleh **Robert Merton**, anomie menjadi keadaan ketidakpuasan dan deregulasi yang dipupuk secara sosial yang menghasilkan kejahatan dan penyimpangan sebagai bagian dari fungsi rutin masyarakat yang menjanjikan banyak hal kepada semua orang tetapi sebenarnya menolak mereka akses yang sama ke pencapaiannya (*Merton, 1938*). Orang mungkin termotivasi untuk mencapai kesuksesan di Amerika Serikat, masyarakat yang menjadi fokus Merton, tetapi mereka menghadapi perbedaan kelas, ras, dan sosial lainnya, yang secara nyata bertentangan dengan mitos keterbukaan. Tidaklah mudah bagi remaja miskin di kota untuk menerima sponsor untuk pekerjaan, meraih penghargaan akademis, atau memperoleh modal. Dalam masyarakat di mana kegagalan ditafsirkan sebagai tanda kelemahan pribadi daripada kelemahan sosial, di mana kegagalan cenderung mengarah pada rasa bersalah individu daripada kemarahan politik atau kolektif (*Newma, n 2006*), tekanan untuk sukses bisa begitu kuat sehingga mendorong oleh karena itu, orang-orang dirugikan untuk mengabaikan karier yang sah dan sebaliknya memilih karier yang tidak sah: 'budaya membuat tuntutan yang tidak sesuai. Dalam pengaturan ini, kebajikan utama Amerika—"ambisi"—mempromosikan wakil kardinal Amerika—"perilaku menyimpang" (*Merton, 1957: 145*). Merton memaparkan tipologi terkenal dari tipe-tipe penyimpangan yang ciri-ciri kritisnya adalah kesetiaan pada tujuan kolektif dan pada cara-cara kolektif untuk mencapai kesuksesan: yang paling utama di antara mereka adalah inovator (yang bisa jadi penjahat atau individu yang giat tetapi taat hukum); retret (yang mungkin menggunakan obat-obatan atau minuman); pemberontak; dan ahli ritual.

Teori anomie Merton harus dimodifikasi secara progresif selama sekitar 30 tahun. Dalam karya **Richard Cloward** dan **Lloyd Ohlin**, misalnya, modelnya dielaborasi untuk memasukkan rute tidak sah menuju sukses. *The Delinquency and Opportunity (1960)* menggambarkan konsekuensi dari para pemuda Amerika (pada 1950-an dan 1960-an pandangan kriminologis hampir seluruhnya tertuju pada perilaku pemuda Amerika) tidak hanya didorong ke dalam kejahatan oleh kesulitan memperoleh uang dan posisi. dengan cara konvensional, tetapi juga ditarik oleh iming-iming karir kriminal yang menguntungkan dan tidak konvensional. Akan ada orang-orang yang tersesat di jalur yang tidak lazim dalam kejahatan profesional atau terorganisir, dan mereka bisa menjadi pencuri, perampok, atau pemeras. Akan ada orang-orang yang jalannya tidak tersedia, dan mereka bisa menjadi anggota geng konflik. Dan ada orang-orang yang gagal untuk mendapatkan pengakuan baik ke kelompok yang taat hukum atau melanggar hukum, 'kegagalan ganda', yang akan, telah diduga, menyerah dan menjadi pengguna dan penipu narkoba. Masing-masing mode adaptasi tersebut, pada dasarnya, merupakan cara hidup, didukung oleh sistem makna atau subkultur, dan Cloward dan Ohlin menjadi salah satu jembatan antara model struktural dan interpretatif kejahatan yang akan dibahas menuju akhir bab ini. Selain itu, mode-mode tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai eksklusif satu sama lain: misalnya, Murphy dan *Robinson (2008)* berbicara tentang 'pemaksimal' yang mungkin mengadopsi kombinasi rute yang sah dan tidak sah menuju sukses.

Dalam karya *Albert Cohen (1957)*, anomie harus disintesis dengan ide **Freud** tentang 'pembentukan reaksi' dalam upaya untuk menjelaskan sifat nyata ekspresif dan 'non-rasional' dari banyak kenakalan. Prospek kegagalan digambarkan membawa penolakan psikologis yang besar terhadap apa yang dulunya dicari, sehingga remaja kelas pekerja yang dulu bercita-cita tinggi dengan tegas meninggalkan dunia kelas menengah yang menolaknya dan

mengadopsi gaya perilaku. itulah pembalikan sistematisnya. Kehidupan yang praktis dan bermanfaat dalam kehidupan kelas menengah diubah menjadi kenakalan non-utilitarian; kehormatan menjadi negativisme yang berbahaya; dan penanggungan kepuasan menjadi hedonisme jangka pendek. Sekali lagi, dalam karya **David Downes**, yang dilakukan di London pada awal 1960-an untuk mengeksplorasi seberapa jauh teori anomie Amerika dapat digeneralisasikan, ambisi remaja Inggris ditemukan begitu dimodulasi oleh kehadiran yang relatif melimpah, meskipun bergaji rendah., pekerjaan dan apa yang kemudian menjadi sistem stratifikasi sosial yang stabil dan sah sehingga kaum muda kelas pekerja tampaknya tidak mengalami rasa bersalah, malu, atau frustrasi yang membebani dalam kegagalan mereka mencapai tujuan kelas menengah. Mereka tidak mendambakan dunia kelas menengah atau menyangkalnya. Sebaliknya, tanggapan mereka adalah 'disosiasi'. Di mana mereka benar-benar mengalami ketidakpuasan yang kuat, bagaimanapun, adalah upaya mereka yang gagal untuk menikmati waktu luang, dan kenakalan mereka pada prinsipnya hedonistik, berfokus pada minuman keras, perkelahian, dan kerusakan properti yang berbahaya, daripada secara instrumental mengarah pada akumulasi kekayaan. Dan tema itu—dari peran yang dimainkan oleh 'pembuatan kegembiraan' remaja dan pacaran risiko—harus diulang berulang kali dalam karya empiris dan teoretis para kriminolog. Membuat 'sesuatu terjadi' di dunia tanpa sumber daya budaya atau material yang signifikan dapat dengan mudah membawa ke dalam kenakalan (lihat *Matza, 1964; Corrigan, 1979; Cusson, 1983; Katz, 1988; Presdee, 2000*). Memang, itu menjadi pembeda dari banyak kenakalan. Ferrell, Hayward, dan Young, misalnya, berbicara tentang berapa banyak orang muda yang 'mendorong diri mereka sendiri ke "tepi", dan terlibat di sana dalam "pekerjaan yang rumit", mencari "aliran adrenalin", identitas asli, dan kepastian eksistensial; mereka kehilangan kendali untuk mengambil kendali '(2008: 72).

Sebuah inkarnasi teori anomie dengan demikian dapat ditemukan dalam bentuk bisu dalam '**Realisme Kiri**' dan penggantinya, 'kriminologi budaya', di mana gagasan ketegangan struktural diintegrasikan dengan makna sosial dari tindakan tersebut untuk menghasilkan konsepsi kenakalan. sebagai tanggapan termotivasi terhadap ketidaksetaraan kapitalisme. 'Gagasan Mertonian tentang kontradiksi antara budaya dan struktur', tulis Jock Young, yang merupakan bapak dari 'Realisme Kiri' yang menjadi bapak 'kriminologi budaya', 'telah tersebar di seluruh pekerjaan saya, dari *The Drugtakers* dan seterusnya' (2004: 553). Saya akan kembali ke Realisme Kiri di bawah. Perubahan lain ditambahkan oleh Messner dan Rosenfeld yang menyatakan bahwa konfigurasi kelembagaan yang berbeda dalam masyarakat dapat mendorong atau mencegah anomi dari bentuk yang dijelaskan oleh Merton. 'Kelembagaan anomi', menurut mereka, adalah hasil yang mungkin dari masyarakat yang didominasi oleh tekanan ekonomi dan ekonomi dengan mengorbankan mode perilaku dan kontrol lainnya (Messner dan Rosenfeld 2009).

2.1.1 PENERAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang

barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. **Pasal 406 KUHP tentang Perusakan**

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

2.2 Anomi dan Teori Kontrol

Kelompok teori kedua yang besar, dan terkait berpusat secara longgar di sekitar anggapan bahwa orang—hampir semua orang—berusaha melakukan kejahatan karena itu menguntungkan, berguna, atau menyenangkan bagi mereka untuk melakukannya, dan bahwa mereka hampir pasti akan melanggar hukum jika mereka bisa. Ini tentunya salah satu tema dalam penjelasan kerusuhan perkotaan Agustus 2011 di Inggris (lihat <http://www.guardian.co.uk/uk/series/reading-the-riots>). Sekalipun anggapan itu, dengan citra terselubung pria liar (dan perempuan), tidak sepenuhnya '*valid*', ahli teori kontrol akan berpendapat bahwa hal itu tentu saja mengarahkan penyelidikan ke arah yang membantu. Mereka mengaku kurang tertarik pada kesetiaan deskripsi daripada hasil untuk intervensi kebijakan dan prediksi dalam situasi konkret. Ini adalah teori kebenaran praktis daripada kebenaran empiris, dan praktik dianggap menyarankan bahwa lebih banyak akan dipelajari dengan mengeksplorasi beberapa, faktor tidak rumit yang tampaknya mencegah orang dari akhir cerita daripada dengan menyelidiki semua motif rumit, makna, dan anteseden tindakan mereka. **Travis Hirschi** mengutarakan masalah ini dengan gamblang: 'Pertanyaan "Mengapa mereka melakukannya?" bukanlah pertanyaan yang dirancang untuk dijawab oleh teori. Pertanyaannya adalah, "Mengapa kita tidak melakukannya?"' (1969: 34).

Doktrin semacam itu adalah tetangga dekat yang dapat dikenali dari teori-teori anomie dalam fokusnya pada regulasi selera yang berpotensi tak terkendali; dan, memang, terkadang sangat sulit untuk membedakan satu kumpulan ide dari yang lain. Varian sebelumnya dari teori kontrol, yang disusun pada 1960-an dan 1970-an, dilanjutkan dengan menyusun daftar kendala yang dapat memeriksa calon pelanggar, pelaku yang, diasumsikan untuk tujuan analitik, bisa seperti Anda, saya, atau siapa saja. Dengan demikian, berdebat melawan teori subkultural, dan didasarkan pada konsepsi Freud tentang impuls manusia yang membutuhkan penjinakan, Hirschi mengklaim bahwa 'tindakan nakal terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat lemah atau rusak' (1969: 16).

Empat elemen utama dipegang oleh Hirschi untuk mendorong orang agar mematuhi aturan: keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan. Keterikatan mencerminkan kepekaan seseorang terhadap pendapat orang lain; komitmen mengalir dari investasi waktu, tenaga, dan reputasi yang sesuai; keterlibatan yang berasal dari keasyikan dalam aktivitas konvensional; dan keyakinan mencerminkan keyakinan seseorang bahwa dia harus mematuhi aturan hukum. Ada tautologi dan pengulangan dalam formulasi itu, namun dia tetap mengarahkan pikiran kriminologis untuk menjawab satu pertanyaan besarnya, 'Mengapa kita tidak melakukannya?'

Kemudian, bersama **Gottfredson, Hirschi** mengembangkan teori kendali dengan beralih ke pengendalian diri dan impulsif. Kejahatan, menurut mereka, mengalir dari pengendalian diri yang rendah: kejahatan memberikan pemuasan keinginan langsung dan sederhana yang menarik bagi mereka yang tidak dapat atau tidak akan menunda kesenangan. Pada dasarnya, ini membutuhkan sedikit keterampilan atau perencanaan. Hal itu bisa secara intrinsik menyenangkan karena melibatkan latihan kelicikan, kelincahan, penipuan, atau kekuasaan. Ini membutuhkan kurangnya simpati untuk korban. Tapi itu tidak memberikan manfaat jangka menengah atau

panjang yang setara dengan yang dapat diperoleh dari karir yang lebih ortodoks. Singkatnya, ini, kata mereka, cenderung dilakukan oleh mereka yang 'impulsif, tidak sensitif, fisik. . . Pengambilan risiko, cupet, dan non-verbal' (1990: 90).

David Matza hampir pasti tidak akan menyebut dirinya ahli teori kontrol, tetapi dalam *Delinquency and Drift* (1964) dia secara efektif menganggangi teori-teori kontrol, anomie, dan signifikansi, dan dia menggambarkan kenakalan dan kenakalan dengan cara yang akan ditemukan oleh ahli teori kontrol tepat. Berandalan tidak jauh berbeda dari kita, katanya. Sebagian besar waktu mereka cukup konvensional dalam kepercayaan dan perilaku, dan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menyesuaikan diri dan siapa yang tidak. Tetapi ada saat-saat ketika cengkeraman kendali mengendur, remaja secara fatal mengalami diri mereka sendiri (mungkin karena alasan oportunistik atau retorik) seolah-olah mereka adalah objek dan efek daripada sebagai subjek dan sebab, seolah-olah mereka tidak lagi bertanggung jawab secara moral atas tindakan mereka, dan mereka kemudian akan menemukan diri mereka dibebaskan untuk masuk dan keluar dari kenakalan. Apa yang memudahkan proses pelepasan itu adalah akurasi yang beredar luas atau 'teknik netralisasi' (ide yang sangat berpengaruh yang dia kembangkan sebelumnya dengan *Gresham Sykes* (Sykes dan Matza, 1957)) yang memungkinkan orang secara metodis untuk melawan rasa bersalah dan ketidaksetujuan. kecemasan yang mungkin mereka alami saat berakhir. **Matza** mengklaim bahwa para penjahat dapat diperkuat dalam tekad mereka dengan kemampuan mereka untuk mengutuk para pelakunya (dengan menyatakan bahwa polisi dan hakim sendiri adalah para koruptor dan pengkritik yang tidak sah, misalnya); untuk menyangkal cedera (dengan menyatakan bahwa tidak ada kerusakan signifikan yang dilakukan); untuk menyangkal korban (dengan menyatakan bahwa korban tidak memiliki konsekuensi, atau pantas

mendapatkan apa yang terjadi); atau untuk menarik kesetiaan yang lebih tinggi (motif yang mulia dapat dikutip untuk perbuatan tercela).

Steven Box mencoba untuk mengambil analisis lebih jauh dengan mempertemukan penekanan **Hirschi** pada ikatan sosial dengan konsep **Matza** tentang *drift*. Dia menyusun daftar aliteratif barunya sendiri dari variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi kontrol: kerahasiaan (kemungkinan pelanggar untuk menyembunyikannya); keterampilan (penguasaan pengetahuan dan teknik yang dibutuhkan untuk tindakan menyimpang); pasokan (akses ke peralatan yang sesuai); dukungan sosial (dukungan yang ditawarkan oleh teman sebaya dan lainnya); dan dukungan simbolik (dukungan yang ditawarkan oleh akun yang tersedia dalam budaya yang lebih luas) (1971: 150). Semakin besar akses ke keterampilan yang diperlukan, kerahasiaan, persediaan, dan dukungan sosial dan simbolis, menurutnya, semakin besar kemungkinan untuk berakhir.

Mungkin salah satu kontribusi paling jitu dan ekonomis untuk teori kontrol diberikan oleh **Harriet Wilson**. Meneliti keluarga yang 'terpinggirkan secara sosial' di Birmingham, Inggris, dia menyimpulkan bahwa apa yang paling membedakan keluarga dengan anak-anak nakal dari mereka yang tidak ada hanyalah apa yang dia sebut sebagai pelaksanaan 'pendamping' (1980). Orang tua yang bertindak sebagai pendamping secara efektif mencegah anak-anak mereka berakhir: mereka sangat yakin bahwa lingkungan tempat mereka tinggal berbahaya dan mencemari sehingga mereka berusaha melindungi anak-anak mereka dengan menjaga mereka di dalam ruangan atau di bawah pengawasan ketat, mengantar mereka ke sekolah, dan melarang mereka bermain dengan orang lain yang didefinisikan sebagai tidak diinginkan (dan lihat *Reckless*, 1957).

Teori kontrol juga telah diterapkan dengan efek pada masalah perbedaan gender dalam menyinggung. Terlepas dari usia, tidak ada fitur demografis lain saat ini yang begitu kuat membedakan antara pelanggar

dan non-off enders. Namun, pada suatu waktu, sedikit perhatian kriminologis diberikan pada kejahatan perempuan karena jumlahnya sangat sedikit (lihat *Innes, 2003: 54*). Seperti yang pernah dikatakan Lemert, seperti orang-orang Custer, para kriminolog mengikuti suara senjata, dan memang ada beberapa senjata api perempuan. Sebaliknya, apa yang membuat pelanggaran pria tampak begitu menarik adalah keseriusan dan skalanya.

Kriminolog feminis dan lainnya yang mengadopsi perspektif kontrol membalas bahwa itulah yang membuat perempuan begitu penting secara analitis (*Heidensohn, 1968*), dan mereka membalikkan masalah dengan mengajukan pertanyaan sentral **Travis Hirschi** (tanpa benar-benar mengutip Hirschi sendiri) tentang mengapa perempuan tidak menyinggung. Ada teka-teki yang baru secara akademis dan menarik dari perempuan penurut, dan teka-teki itu dijawab, sebagian, dengan mengacu pada pengaruh perbedaan yang dikendalikan. **John Hagan** dan rekan-rekannya menyatakan bahwa penyimpangan sebagai bentuk kesenangan dan kegembiraan di ruang publik lebih sering terbuka untuk pria daripada perempuan karena anak perempuan lebih sering menghindari risiko dan lebih sering tunduk pada kontrol keluarga yang intens, terus-menerus, dan berbeda-beda. di ranah privat dan domestik. Kontrol, secara lebih luas, tidak hanya memindahkan anak perempuan dari lingkup agen kontrol sosial formal, sistem peradilan pidana, dan kemungkinan identifikasi publik sebagai kriminal; itu juga bekerja lebih efektif karena bersandar pada manipulasi sanksi emosional daripada penerapan kontrol fisik atau kustodian. Strategi mempermalukan dan penarikan kasih sayang tampaknya lebih ampuh daripada akhir, masa percobaan, atau penjara. Selanjutnya, semakin terstruktur dan hierarkis keluarga, semakin tajam perbedaan yang ditarik antara peran pria dan perempuan, semakin banyak perempuan yang dibatasi pada ruang pribadi, semakin besar perbedaan

antara tingkat pelanggaran pria dan perempuan (lihat *Hagan et al., 1979, 1985, dan 1988*).

Pat Carlen memberikan analisis itu satu lagi pelintiran dengan mencatat bahwa penjahat perempuan kemungkinan besar muncul ketika kontrol keluarga domestik terkikis atau dihilangkan sama sekali, ketika apa yang disebutnya 'kesepakatan gender' dilanggar, perempuan muda meninggalkan rumah atau dirawat. negara, dan dengan demikian dihadapkan pada kontrol yang secara khas dialami oleh laki-laki (*1988*). Jawaban atas 'masalah kejahatan', **Frances Heidensohn** pernah menyimpulkan, lidah di pipi, harus terletak pada feminisasi kontrol.

Teori kontrol sekarang sangat populer, terutama di Amerika Serikat, di mana ia dikaitkan dengan teori 'jalan hidup' dalam karya penulis seperti **Sampson** dan **Laub**, yang *Crime in the Making of 1993* akan digantikan oleh **Laub**. dan *Sampson's Shared Beginnings, Divergent Lives of 2003*. Kedua karya mengeksplorasi asal-usul, dan penghentian dari, kenakalan dalam kehidupan manusia yang dipelajari selama beberapa dekade: dan mereka mencurahkan perhatian khusus pada cara di mana ikatan sosial keluarga, teman, pekerjaan, dan dinas militer bekerja sebagai kontrol informal yang menyaring pengaruh yang berasal dari struktur sosial yang lebih luas. Pernikahan, permulaan pekerjaan, dan dinas militer, menurut mereka, dapat bertindak sebagai titik balik kritis yang menyebabkan diskontinuitas dalam sejarah kehidupan; membuat rangkaian hubungan sosial, ketergantungan, dan tanggung jawab baru; memperkenalkan disiplin ilmu baru ke dalam kehidupan sosial; dan mengundang stock opname dan refleksi.

Sebaliknya, keterlibatan dengan sistem peradilan pidana dan pemenjaraan dapat mengganggu atau merusak partisipasi dalam menstabilkan lingkungan sosial; menstigmatisasi pelaku dan mencegah masuk kembali ke dunia yang 'lurus'; mendorong sinisme tentang peradilan pidana melalui kenalan dekat dengan fitur-fiturnya yang seperti permainan

dan pelihat; dan memperkenalkan pelanggar kepada pelanggar hukum lainnya yang membantu memperkuat penyimpangan melalui asosiasi diferensial. Dan, di sepanjang, dan mengikuti Matza, Katz, dan lainnya, Laub dan Sampson menggambarkan proses tersebut bukan sebagai perkembangan yang suram dan tak terhindarkan menjadi kriminalitas, tetapi sebagai rangkaian peristiwa dan tindakan yang selalu dipengaruhi oleh kapasitas orang untuk menafsirkan dan memilih. bagaimana mereka akan menanggapi. Peran yang dimainkan oleh agen manusia dan kemungkinan berulang kali digarisbawahi, membuat mereka mengamati betapa mustahilnya memprediksi kriminalitas masa depan dari keadaan sekarang.

2.2.1 PENERAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara

wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berikut rangkuman hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA:

1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA)

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

- terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. memperoleh advokasi sosial;
 - l. memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. memperoleh pendidikan;
 - o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan

sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [lihat Pasal 58 ayat (3) UU SPPA].

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut

adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

7. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

2.3 Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dalam Kriminologi

Landasan yang semakin penting, tetapi tidak sangat diperlukan, untuk teori kontrol adalah 'teori pilihan rasional', sebuah kebangkitan dari teori utilitarian lama yang mendahului sosiologi dan pernah dikaitkan dengan **Adam Smith, Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, dan James Mill**. Teori pilihan rasional diperkenalkan kembali ke kriminologi melalui media ekonomi kejahatan yang dihidupkan kembali, dan itu membawa serta fiksi yang nyaman tentang pria ekonomi (lihat *Becker, 1968*), sebuah fiksi yang memiliki hubungan langsung dengan penjahat pria (atau perempuan)) dari teori kontrol. Manusia ekonomi, dianggap terus-menerus mencari peluang darinya, membuat pilihan amoral dan asosial

untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, mungkin bukan entitas yang beralasan empiris atau terdokumentasi dengan baik, tetapi, dikatakan, ia membantu menyederhanakan pembuatan model, menghilangkan teori pilihan rasional membayangkan menjadi kekacauan teoritis dan deskriptif yang tidak penting, dan bertujuan langsung pada apa yang dipahami sebagai pertanyaan kebijakan praktis berguna (lihat *Clarke dan Cornish, 1985*). Manusia ekonomi dalam kedok kriminalnya tidak memiliki masa lalu, motif yang kompleks, kehidupan sosial yang kaya, atau, memang, identitas sosial yang dapat dikenali ('disposisi' adalah bagaimana *Ron Clarke* mengatakannya (*1992*)). Dia tidak perlu memiliki salah satu dari atribut tersebut.

Memang, dia mungkin tidak sepenuhnya rasional, mengacaukan atau 'memuaskan', seperti yang kita semua lakukan, atas dasar informasi yang tidak sempurna dan dengan adanya risiko dan ketidakpastian. Dia sangat mirip dengan siapa pun di antara kita atau, lebih baik lagi, seperti sebagian Orang Biasa yang berdiri secara abstrak dan gamblang untuk kita semua. Dia tidak memerlukan kerumitan seperti itu, karena yang membebani teori kontrol adalah analisis teoretis sedikit demi sedikit dari episode diskrit dari perilaku akhir yang tidak berwujud yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat keputusan seputar masalah risiko, usaha, dan penghargaan (*Clarke dan Cornish, 2000: 7*) dalam pengaturan di mana mereka terjadi (lihat pengantar *Clarke dan Felson, 1993*).

Dalam formulasi **Ron Clarke** yang sangat berpengaruh, tingkat kejahatan dianggap bervariasi dalam menanggapi tiga konfigurasi faktor yang luas. Pengelompokan pertama berkisar pada peningkatan upaya yang harus dikeluarkan **Everyman** dalam melakukan kejahatan, dan itu melibatkan apa yang disebut 'pengerasan target' (dengan mempertahankan objek dan orang dengan perisai dan perangkat lain); 'Kontrol akses' (dan itu membuat sulit bagi predator untuk mendekati target); membelokkan

pelaku (dengan mendorong mereka, misalnya, untuk bertindak dengan cara yang sah dan bukan tidak sah melalui penyediaan papan grafiti, tempat sampah, dan tempolong); dan 'mengendalikan fasilitator' (melalui kontrol senjata atau pemeriksaan penjualan kaleng semprot, misalnya). Yang kedua berkisar pada peningkatan risiko penghentian melalui penyaringan orang (melalui pencarian perbatasan, misalnya); pengawasan formal oleh polisi, satpam, dan lainnya; pengawasan oleh karyawan seperti kondektur bus, penjaga kereta api, petugas, dan petugas kebersihan; dan 'pengawasan alami' (dibantu dengan menurunkan atau menghilangkan hambatan seperti pagar tanaman dan semak belukar di sekitar tempat tinggal pribadi (lihat *Bennett dan Wright, 1984*), memasang kamera televisi sirkuit tertutup, menerangi interior toko, dan penerangan jalan yang ditingkatkan). Pengelompokan terakhir adalah 'mengurangi imbalan' dari kejahatan, yang terdiri dari 'penghapusan target' (menggunakan transaksi elektronik dan kartu bus dan 'tiram' untuk mengurangi jumlah pembayaran tunai, dan dengan demikian akumulasi uang tunai di satu tempat, misalnya); identifikasi properti; penghapusan bujukan (dengan pembersihan cepat grafiti atau perbaikan properti yang dirusak); dan penetapan aturan (melalui pengembalian pajak pendapatan, deklarasi bea cukai, dan sejenisnya) (diambil dari *Clarke, 1992: 13*).

Mengejar akal sehat, kadang-kadang tidak dapat dibedakan, tetapi ide-ide praktis memungkinkan petugas penelitian di **Home Office** pada tahun 1970-an dan awal 1980-an untuk melakukan serangkaian studi ilustratif, menemukan, misalnya, gedung sekolah tua yang padat di Lokasi kota kecil sepertiga lebih mungkin untuk dirampok sebagai bangunan besar, luas, modern dengan banyak titik akses dan kemungkinan pengawasan yang lemah (lihat *Hope, 1982*); atau bahwa ada sekitar 20 kali lebih banyak kerusakan berbahaya di bagian atas daripada di geladak bawah 'satu orang', bus tingkat dua yang kekuatan pengawasan pengemudinya terbatas pada satu tingkat saja (*Mayhew et al., 1976: 26*).

Tak satu pun dari variabel-variabel itu menyentuh pertanyaan sosiologis konvensional tentang siapa pelakunya, bagaimana mereka bernalar, dan bagaimana mereka bertindak (dan untuk itu para ahli teori pilihan rasional telah dikritik (lihat *Wright dan Decker 1997; Fukuyama 2004; dan Haggerty*, yang berkomentar sedikit) *astriingly* bahwa teori kontrol lebih mirip dengan 'konsultan keamanan *Wal-Mart* daripada kriminolog penelitian' (2004: 218)). Ahli teori kontrol berkonsentrasi pada dampak yang dibayangkan dari berbagai bentuk kontrol, dan dari situ itu hanyalah langkah singkat untuk memperluas teori kontrol ke analisis disiplin ilmu yang dibangun ke dalam praktik sosial sehari-hari, di satu sisi, dan ke dalam penggunaan ruang sosial, di sisi lain.

2.3.1 PENERAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

Secara ringkas, Pasal 362 jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menerangkan tentang pencurian ringan, bahwa:

Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Contoh lebih spesifiknya, yakni Pencurian dalam UU Perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Laban Perkebunan;*
- *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*
- *melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau*
- *memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.*

2.4 Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activities Theory*) dalam Kriminologi

Ron Clarke, ahli teori kontrol situasional, dan Marcus Felson, ahli teori kejahatan dan aktivitas rutin, setuju bahwa mereka berbagi ide yang sama (lihat *Clarke dan Felson, 1993*) serta ide-ide yang terpisah (dengan demikian teori kontrol situasional bersifat mikroskopis, aktivitas rutin. teori sebagian besar makroskopis dalam penerapannya (*Clarke dan Cornish, tak bertanggung: 25*)). Clarke dan rekan-rekannya telah menanyakan apa yang mencegah insiden kriminal tertentu terjadi dalam situasi tertentu. Felson bertanya bagaimana insiden tersebut berasal atau diperiksa dalam kegiatan rutin kehidupan sosial duniawi (1994). Sama seperti Clarke dan yang lainnya telah menekankan bagaimana, untuk tujuan penjelasan,

mudah untuk mengasumsikan bahwa pelanggar sedikit berbeda dari orang lain, jadi Felson dan rekan- rekannya berpendapat bahwa kebanyakan penjahat adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak terampil, kecil, dan tidak melakukan kekerasan seperti penulis. Sama seperti teori kontrol yang menggunakan versi diam-diam dari dosa asal, demikian pula teori aktivitas rutin mengadopsi serangkaian pengandaian tentang kelemahan dasar manusia, pentingnya godaan dan provokasi, dan peran yang dimainkan oleh kemalasan ('Kita semua dilahirkan lemah, tetapi ... kita diajari pengendalian diri', klaim *Felson (1994: 20)*).

Kriminolog kegiatan rutin akan berpendapat bahwa analisis kejahatan predator tidak selalu membutuhkan penyebab yang berat. Juga tidak menuntut ahli teori melakukan kekeliruan 'seperti-sebab- seperti' yang diam-diam menegaskan bahwa fenomena 'patologis' seperti kejahatan harus dijelaskan oleh kondisi patologis seperti keterasingan, kemiskinan, disfungsi keluarga, atau penindasan kelas atau rasial. Kejahatan dianggap terukir dalam arsitektur kehidupan sehari-hari. Lebih tepatnya, itu dapat ditemukan dalam konvergensi dalam ruang dan waktu dari apa yang disebut motivasi off enders, target yang sesuai, dan penjaga yang cakap (lihat Cohen dan Felson 1979): dipengaruhi oleh hal-hal seperti bobot, nilai, insiden, dan distribusi barang-barang yang dapat dicuri (pertumbuhan dalam jumlah barang portabel dan berbiaya tinggi seperti komputer lap-top, perekam DVD, dan telepon genggam (atau 'sel') akan mendorong lebih banyak pencurian, misalnya); dampak kendaraan bermotor (membantu penerbangan cepat, memungkinkan pengangkutan objek secara diam- diam, dan menyebabkan penyebaran geografis penduduk yang melemahkan pengawasan); kebiasaan waktu senggang (remaja sekarang memiliki petak waktu kosong yang lebih besar daripada pendahulunya, waktu di mana mereka dapat bangun untuk melakukan kerusakan); kebiasaan kerja (jika semua anggota rumah tangga sedang

bekerja, tidak akan ada wali yang mampu melindungi rumah); kebiasaan tinggal (orang lajang adalah penjaga properti yang kurang efektif dibandingkan rumah tangga yang lebih besar); pertumbuhan teknologi (telepon seluler modern, misalnya, memperkuat kemampuan publik untuk melaporkan dan mencatat kejahatan); dan seterusnya. Ini adalah teori yang cukup tidak rumit tetapi sekali lagi, seperti tetangga dekatnya, teori kontrol, ia mengajukan pertanyaan yang produktif secara empiris.

2.4.1 PENERAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2.5 Teori Pelabelan (*Labeling Theory*) dalam Kriminologi

Mungkin satu-satunya ide kriminologis besar lainnya yang menonjol adalah signifikansi, praktik interpretatif yang mengatur kehidupan sosial. Ada ketegangan analisis yang bertahan lama, terutama terkait dengan interaksionisme simbolik dan fenomenologi, yang menegaskan bahwa orang tidak, dan tidak dapat, menanggapi dengan segera, tanpa kritik, dan pasif terhadap dunia 'apa adanya'. Sebaliknya mereka perlu menanggapi ide-ide mereka tentang dunia, dan bisnis sosiologi adalah menangkap, memahami, dan mereproduksi ide-ide itu; memeriksa interaksi mereka satu sama lain; dan menganalisis proses dan struktur yang menghasilkannya. Sosiologi menjadi studi tentang orang, hubungan, dan praktik sebagai proses simbolik dan simbolisasi.

Inti dari ide itu adalah reflektivitas, kapasitas kesadaran untuk menghidupkan kembali dan menerjemahkan dirinya menjadi objeknya sendiri. Orang-orang dapat berpikir tentang diri mereka sendiri, mendefinisikan diri mereka sendiri dengan berbagai cara, bermain-main dengan identitas yang berbeda, dan memproyeksikan diri mereka secara imajinatif ke dalam berbagai macam situasi yang dibuat-buat. Mereka dapat melihat diri mereka sendiri secara perwakilan dengan menyimpulkan reaksi dari 'orang lain yang penting', dan, dalam 'mengambil peran orang lain', bergerak secara simbolis ke jarak di luar diri mereka sendiri untuk memeriksa bagaimana mereka mungkin muncul. Menguraikan tindakan melalui 'isyarat signifikan', proyeksi simbolik tindakan dan identitas, mereka dapat mengantisipasi kemungkinan tanggapan orang lain, dan menyesuaikan tindakan prospektif mereka sendiri untuk mengakomodasi mereka (*Mead 1934*). Dalam semua ini, dunia sosial dipadatkan secara simbolis ke dalam ungkapan tindakan, dan media yang memungkinkannya adalah bahasa.

Bahasa diadakan untuk merealisasikan, menstabilkan, dan memperluas makna. Digunakan secara percakapan untuk mengantisipasi suatu tindakan, ini memungkinkan orang untuk menjadi subjek dan objek mereka sendiri, pembicara dan hal yang dibicarakan, 'Saya' dan 'saya', membuka pikiran untuk tindakan reflektif. Memberikan nama, memungkinkan orang untuk menyampaikan makna moral dan sosial pada motif mereka sendiri dan orang lain (*Mills 1940; Sykes dan Matza 1957; Scott dan Lyman 1970*), niat, dan identitas. Akan sangat penting jika seseorang didefinisikan sebagai orang yang eksentrik, tidak menentu, atau gila; peminum, pemabuk, atau pecandu alkohol; pengagum yang sedang jatuh cinta atau penguntit; pejuang kemerdekaan atau teroris; sedikit anak laki-laki atau nakal. Konsekuensi akan mengalir dari penamaan, konsekuensi yang memengaruhi tidak hanya bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan posisinya di dunia, tetapi juga bagaimana seseorang dapat diperlakukan oleh orang lain. Penamaan bisa menciptakan diri sendiri.

Ditransposisikan ke studi kejahatan dan penyimpangan, interaksionisme simbolik dan fenomenologi memberi keunggulan pada proses di mana tindakan dan identitas menyimpang dibangun, ditafsirkan, dinilai, dan dikendalikan (*Katz 1988*). Sepasang artikel inti adalah **Howard Becker** 'Menjadi Pengguna Mariyuana' dan 'Penggunaan Marihuana dan Kontrol Sosial', keduanya dicetak ulang dalam *Outsiders (1963)*, dan keduanya menjelaskan urutan langkah-langkah berpola yang dapat membentuk pengalaman, karakter moral, dan nasib. dari orang yang mulai menghisap mariyuana. Menjadi pengguna mariyuana adalah proses tentatif, berkembang tahap demi tahap, yang menuntut pengguna dengan memuaskan untuk mempelajari, menguasai, dan menafsirkan teknik, menetralkan larangan gambar moral penggunaan dan pengguna, dan berhasil menyamarkan tanda-tanda penggunaan di hadapan mereka yang mungkin tidak setuju. Itu menjadi paradigmatis.

Deviance sendiri lebih umum disamakan dengan karir moral yang terdiri dari fase-fase yang saling terkait, yang masing-masing dimasukkan ke dalam dan membentuk fase berikutnya; masing-masing menyajikan masalah dan peluang eksistensial yang berbeda; yang masing-masing dihuni oleh konstelasi yang berbeda dari yang lain; dan yang masing-masing dapat secara khusus membentuk diri orang yang menyimpang. Tapi prosesnya bukannya tidak bisa dihindari, tetapi bergantung. Tidak setiap fase tidak dapat dihindari atau tidak dapat diubah, dan penyimpangan sering kali dapat memilih untuk mengubah arah.

Apa yang menandai karir seperti itu adalah tindakan penamaan, penyebaran bahasa untuk memberi dan memperbaiki makna perilaku, dan interaksionisme simbolik dan fenomenologi dikenal dalam kriminologi sebagai 'teori pelabelan'. Salah satu bagian yang paling sering dikutip dari semua bagian dalam kriminologi sosiologis adalah diktum Becker bahwa 'penyimpangan bukanlah kualitas tindakan yang dilakukan orang tersebut, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain kepada "pelanggar". Yang menyimpang adalah orang yang label itu telah berhasil diterapkan; perilaku menyimpang adalah perilaku yang begitu dicap orang' (1963: 9).

Pelabelan itu sendiri bergantung. Banyak perbuatan menyimpang tidak disaksikan dan sebagian besar tidak dilaporkan. Pelaporan mungkin tidak mengarah pada tindakan. Orang mungkin dapat menolak atau memodifikasi sebutan yang menyimpang ketika upaya dilakukan untuk menerapkannya: bagaimanapun juga, kita terus menerus dibombardir oleh upaya untuk memberi label kita dengan cara yang berbeda dan hanya sedikit yang berhasil. Tetapi ada saat-saat khusus ketika kemampuan diri untuk menolak definisi dibatasi; dan yang paling menentukan dari semuanya mungkin adalah pertemuan dengan agen-agen sistem peradilan pidana, karena mereka dapat bekerja dengan kekuasaan, kekuatan, dan

otoritas negara yang seringkali tampak tak tertahankan. Dalam pertemuan semacam itu, penjahat dan penyimpang diwajibkan untuk menghadapi tidak hanya reaksi mereka sendiri dan orang lain yang mungkin defensif, singkat, dan tidak penting terhadap apa yang telah mereka lakukan, 'penyimpangan utama' mereka, tetapi juga menentang secara terbuka reaksi formal orang lain, dan penyimpangan mereka kemudian dapat menjadi tanggapan terhadap tanggapan, 'penyimpangan sekunder': 'Ketika seseorang mulai menggunakan perilaku menyimpang atau peran yang didasarkan padanya sebagai alat pertahanan, serangan, atau penyesuaian terhadap masalah terbuka dan terselubung yang diciptakan oleh akibat reaksi masyarakat terhadapnya, penyimpangannya bersifat sekunder' (*Lemert 1951: 76*).

Yang penting tentang deviasi sekunder adalah bahwa ini mungkin merupakan sintesis simbolik lebih dari sekedar makna dan aktivitas deviasi primer. Ini juga dapat memasukkan mitos, pengetahuan profesional, stereotip, pengalaman, dan asumsi kerja orang awam, petugas polisi, hakim, praktisi medis, petugas penjara, narapidana, pembuat kebijakan, dan politisi. Pengguna narkoba (lihat *Schur, 1963*), pasien mental (*Goffman, 1968; Scheff, 1966*), homoseksual (*Hooker, 1963*), dan orang lain mungkin diwajibkan untuk mengatur gerakan dan karakter mereka yang signifikan di sekitar simbol publik dan interpretasi mereka. tingkah laku. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan kemudian dapat dijelaskan sebanyak mungkin dengan penggabungan simbolis dari tanggapan publik seperti dengan serangkaian kondisi asli, dan kontrol akan dituliskan ke dalam struktur diri mereka sendiri.

Penyimpangan sekunder juga dapat menyebabkan konfrontasi dengan rintangan baru yang menutup pilihan masa depan. Jadi, Gary Marx membuat daftar sejumlah konsekuensi ironis yang dapat mengalir dari bentuk-bentuk kontrol sosial terselubung seperti kepolisian yang menyamar dan pekerjaan para agen provokator: termasuk menghasilkan

pasar untuk barang-barang ilegal; penyediaan motif dan makna tindakan ilegal; menjebak orang dalam pelanggaran yang mungkin tidak mereka lakukan sebelumnya; penyediaan catatan yang salah atau menyesatkan; pembalasan tindakan terhadap informan, dan sejenisnya (Marx, 1988: 126–7). Lagi pula, begitu seseorang secara publik diidentifikasi sebagai seorang yang menyimpang, akan menjadi sulit baginya untuk kembali ke dunia konvensional, dan langkah-langkah diambil dengan frekuensi yang meningkat untuk memperbesar visibilitas para pelanggar aturan. Di Amerika Serikat, misalnya, 'Hukum Megan' mewajibkan di yurisdiksi tertentu nama-nama pelanggar seks diiklankan secara publik, mungkin mengurangi risiko bagi sebagian orang, tetapi tentu saja membekukan penjahat sebagai penyimpangan sekunder. Sheriff dikenal mempermalukan narapidana dengan membuat mereka mengenakan pakaian merah muda atau membawa plakat di depan umum.

Cukup disengaja dalam menanggapi masalah yang diperkuat secara berbahaya dari penyimpangan yang dilarang adalah peningkatan penerapan strategi keadilan restoratif oleh negara, sebagian besar didasarkan pada karya Braithwaite (1989), yang mencoba untuk menyatukan kontrol informal mempermalukan oleh orang lain yang signifikan dengan ritual reintegrasi yang bekerja melawan konsekuensi yang mengasingkan dari penyimpangan sekunder.

Meminjam ide-idenya dari Durkheim dan teori pelabelan dan prosedurnya dari sejumlah bentuk penyelesaian perselisihan, tetapi dari praktik Maori dan Jepang khususnya, mempermalukan bagi Braithwaite paling efektif jika dipraktikkan oleh mereka yang pendapatnya penting bagi yang menyimpang—Ini 'menandakan orang lain'; dan bahwa akan berhasil hanya untuk mengecualikan dan menjauhkan yang menyimpang kecuali jika hal itu disertai dengan ritual reparasi dan pemulihan, yang dipengaruhi, mungkin, oleh tender dan penerimaan permintaan maaf

publik. Mempermalukan reintegratif saat ini merupakan salah satu 'gagasan besar' yang mendasari gagasan (jika tidak selalu merupakan praktik) kebijakan peradilan pidana di seluruh dunia Barat, tetapi juga di Afrika Selatan dan di tempat lain, di mana hal itu dipandang sebagai kembalinya prosedur keadilan aborigin. Dan itu duduk sangat baik dengan studi menarik tentang *reoff* berakhir setelah penjara yang menyatakan bahwa variabel kritis dalam penghentian dari kejahatan adalah kapasitas mantan narapidana untuk membangun narasi baru tentang hidupnya yang membingkai diri baru yang sekarang sedang berjalan 'lurus' (*Maruna, 2001*).

Perubahan terbaru dalam evolusi kriminologi interaksionis adalah karya **Randall Collins**, seorang mahasiswa **Erving Goff**, yang mengadaptasinya untuk menganalisis detail transaksi kekerasan. Kekerasan, menurut pengamatannya, sebenarnya sulit dilakukan kebanyakan orang—bahkan tentara dan polisi yang secara profesional terlibat untuk mengerahkan kekuatan—enggan menyerang atau merugikan orang lain. Campuran ketegangan dan ketakutan menahan mereka. Semangat yang luar biasa dari apa yang dia sebut sebagai 'kepanikan ke depan' yang dapat mengatasi campuran itu, dan mungkin sebagian difasilitasi oleh kelemahan yang jelas dari sebuah potensi.

Korban yang mundur atau mengalah—membuat aksi kekerasan lebih mudah dilakukan—sebagian karena penyesalan penonton. Kemudian 'ketegangan perjuangan [bisa] berubah menjadi *hot rush and vicious overkill*' (*2008: 135*). Collins menggambarkan bagaimana para korban sendiri dapat masuk ke dalam apa yang dia sebut, mengikuti **Goffman**, rantai ritual interaksi '*entrainment emosional*', rangkaian koreografi di mana penyerang mereka juga terlibat, di mana keduanya secara progresif menjadi terseret dalam tindakan dan reaksi satu sama lain, pelaku. mengatasi hambatannya dan korban mendominasi, dikemudikan, dan dilumpuhkan oleh pelaku. Melihat, katakanlah, pada episode kekerasan dalam rumah tangga atau

gangguan kerumunan, dia kemudian dapat menceritakan bagaimana, selangkah demi selangkah, orang datang secara kolaboratif dan hampir secara kolusif untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.

2.5.1 PENERAPAN DALAM HUKUM DI INDONESIA

Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Selain itu, dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis, pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (“PP 31/1980”). Di dalam PP 31/1980 diatur definisi gelandangan dan pengemis.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum (Pasal 1 angka 1 PP 31/1980).

Sedangkan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Pasal 1 angka 2 PP 31/1980). Meski demikian, PP 31/1980 tidak memuat mengenai sanksi terhadap gelandangan dan pengemis. Hal-hal yang diatur dalam PP 31/1980 di antaranya soal usaha preventif dan usaha represif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis.

Pengaturan lain terhadap gelandangan dan pengemis juga terdapat dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (“Perkapolri 14/2007”). Perkapolri 14/2007 antara lain

mengatur tentang cara preventif dan penegakan hukum dalam menangani gelandangan dan pengemis.

Jadi, mengemis dan menggelandang merupakan tindak pidana pelanggaran. Larangan mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP maupun di dalam Perda, seperti halnya di wilayah DKI Jakarta, yaitu dengan Perda DKI 8/2007. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan menggelandang dan mengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan soal larangan mengemis dan menggelandang. Untuk DKI Jakarta, sanksi pidana untuk mengemis diatur dalam Perda DKI 8/2007, bahkan orang yang memberikan uang kepada pengemis juga diancam dengan hukuman pidana.

2.6 Bahan Diskusi

1. Carilah contoh kasus di Indonesia yang menurut anda menarik, lalu kaitkan dengan salah satu teori Kriminologi yang cocok dan manifestasi hukum positifnya!
2. Menurut anda, adakah implementasi hukum positif dari berbagai teori di atas yang sarat terhadap diskriminasi?

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. and Yellen, J. (1994), *'Gang Behavior, Law Enforcement, and Community Values'*, in H. Aaron et al. (eds), *Values and Public Policy*, Washington DC: Brookings Institute.
- Aldana-Pindell, R. (2002), *'In Vindication of Justiciable Victims' Rights to Truth and Justice for State-Sponsored Crimes'*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, November, 35: 5.
- Anderson, E. (1976), *A Place on the Corner*, Chicago: University of Chicago Press.
- (1990), *Streetwise*, Chicago: University of Chicago Press.
- (1999), *Code of the Street*, New York: W.W Norton.
- Arrigo, B. and Bernard, T. (2002), *'Postmodern Criminology in Relation to Radical and Conflict Criminology'*, in S. Cote (ed.), *Criminological Theories: Bridging the Past to the Future*, Thousand Oaks: Sage.
- Baldwin, J. and Bottoms, A. (1976), *The Urban Criminal*, London: Tavistock.
- Bankowski, Z., Mungham, G., and Young, P. (1977), *'Radical Criminology or Radical Criminologist?'*, *Contemporary Crises*, 1(1): 37–51.
- Bauman, Z. (1989), *Modernity and the Holocaust*, Cambridge: Polity Press.
- Bayart, J.-F., ELLIS, S., and HIBOU, B. (1999), *The Criminalization of the State in Africa*, Bloomington: Indiana University Press.
- Beck, U. (1992), *Risk Society*, London: Sage.
- Becker, G. (1968), *'Crime and Punishment: An Economic Approach'*, *The Journal of Political Economy*, 76.
- Becker, H. (1963), *Outsiders*, New York: Free Press.
- and McCall, M. (eds) (1990), *Symbolic Interaction and Cultural Studies*, Chicago: University of Chicago Press.
- Beirne, P. (ed.) (1994), *introduction to The Origins and Growth of Criminology*, Aldershot: Dartmouth.
- Bell, D. (1960), *'The Racket-Ridden Longshoremen'*, in *The End of Ideology*, New York: Collier.

- Bennett, T. and Wright, R. (1984), *Burglars on Burglary: Prevention and the Offender*, Aldershot: Gower.
- Bernard, T. (1990), 'Twenty Years of Testing Theories', *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 27.
- Bottoms, A. et al. (1989), 'A Tale of Two Estates', in D. Downes (ed.), *Crime and the City*, Macmillan: Basingstoke.
- and WILES, P. (1996), 'Crime and Insecurity in the City', in C. Fijnaut et al. (eds), *Changes in Society, Crime and Criminal Justice in Europe*, The Hague: Kluwer.
- Bourgois, P. (1995), *In Search of Respect*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Box, S. (1971), *Deviance, Reality and Society*, London: Holt, Rinehart, and Winston.
- (1983), *Power, Crime and Mystification*, London: Tavistock.
- BRAITHWAITE, J. (1989), *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press.
- BRANTINGHAM, P. and BRANTINGHAM, P. (1981–2), 'Mobility, Notoriety, and Crime', *Journal of Environmental Systems*, 11(1).
- CAMPBELL, B. (1993), *Goliath: Britain's Dangerous Places*, London: Methuen.
- CARLEN, P. (1988), *Women, Crime and Poverty*, Milton Keynes: Open University Press.
- (1996), *Jigsaw: A Political Criminology of Youth Homelessness*, Buckingham: Open University Press.
- CHAMBLISS, W. (1976), 'The State and Criminal Law', in W. Chambliss and M. Mankoff (eds), *Whose Law, What Order?*, New York: Wiley.
- CHAPMAN, D. (1967), *Sociology and the Stereotype of the Criminal*, London: Tavistock.
- CHEVALIER, L. (1973), *Labouring Classes and Dangerous Classes in Paris During the First Half of the Nineteenth Century*, London: Routledge & Kegan Paul.

- CLARKE, R. (1980), *'Situational Crime Prevention: Theory and Practice'*, British Journal of Criminology, 20.
- (1992), *Situational Crime Prevention*, New York: Harrow and Heston.
- (1999), *'Situational Prevention'*, paper delivered at the Cambridge Workshop on Situational Crime Prevention—Ethics and Social Context, 14–16 October.
- and CORNISH, D. (undated), *'Rational Choice'*, unpublished.
- and — (1985), *'Modeling Offenders' Decisions'*, in M. Tonry and N. Morris (eds), *Crime and Justice*, 6, Chicago: University of Chicago Press.
- and — (2000), *'Analyzing Organized Crime'*, unpublished.
- and FELSON, M. (eds) (1993), *Routine Activity and Rational Choice*, New Brunswick: Transaction.
- CLEAR, T. (2010), *'Policy and Evidence: The Challenge to the American Society of Criminology: 2009 Presidential Address the American Society of Criminology'*, *Criminology*, 48: 701– 25.
- CLEAVER, E. (1969), *Post-Prison Writings and Speeches*, London: Cape.
- CLOWARD, R., and OHLIN, L. (1960), *Delinquency and Opportunity*, New York: Free Press.
- COHEN, A. (1957), *Delinquent Boys*, Glencoe: Free Press.
- COHEN, L., and FELSON, M. (1979), *'Social Change and Crime Rate Trends'*, *American Sociological Review*, 44.
- COHEN, P. (1972), *'Working-Class Youth Cultures in East London'*, *Working Papers in Cultural Studies*, Birmingham, 2.
- COHEN, S. (1971), *Images of Deviance*, London: Penguin.
- (1972), *Folk Devils and Moral Panics*, London: Paladin.
- (1979a), *'The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control'*, *Contemporary Crises*, 3.
- (1979b) *'Guilt, Justice and Tolerance'*, in D. Downes and P. Rock (eds), *Deviant Interpretations*, Oxford: Martin Robertson.
- (1985), *Visions of Social Control*, Cambridge: Polity.

- (1996), *Crime and Politics: Spot the Difference*, *British Journal of Sociology*, 47.
- COLEMAN, A. (1985), *Utopia on Trial*, London: Hilary Shipman.
- (1986), *Dangerous Dreams*, *Landscape Design*, 163.
- COLLINS, R. (2008), *Violence: A Micro-Sociological Theory*, Princeton: Princeton University Press.
- COLQUHOUN, P. (1797), *A Treatise on the Police of the Metropolis*, London: H. Fry.
- CONDY, R. (2010), *Appreciating the Broad Reach of Serious Crime and the Interpretive Power of Claims to Secondary Victimization*, in D. Downes, D. Hobbs, and T. Newburn (eds), *The Eternal Recurrence of Crime and Control*, Oxford: Oxford University Press.
- CONNELL, R. (1987), *Gender and Power*, Cambridge: Polity.
- CORRIGAN, P. (1979), *Schooling the Smash Street Kids*, London: Macmillan.
- COTTERRELL, R. (1999), *Émile Durkheim: Law in a Moral Domain*, Stanford: Stanford University Press.
- CUSSON, M. (1983), *Why Delinquency?*, Toronto: University of Toronto Press.
- DAMER, S. (1974), *Wine Alley: The Sociology of a Dreadful Enclosure*, *Sociological Review*, 22.
- DAVIES, N. (1998), *Dark Heart: The Shocking Truth about Hidden Britain*, London: Vintage.
- DAVIS, K. (1937), *The Sociology of Prostitution*, *American Sociological Review*, 2.
- (1959), *The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology*, *American Sociological Review*, 24.
- DAVIS, M. (1992a), *Beyond Blade Runner*, Open Magazine Pamphlet, New Jersey.
- (1992b), *City of Quartz*, New York: Vintage.
- DOUGLAS, J. (1971), *American Social Order*, London: Collier-Macmillan.
- DOUGLAS, M. (1966), *Purity and Danger*, London: Pelican.

- DOWNES, D. (1966), *The Delinquent Solution*, London: Routledge & Kegan Paul.
- (1988), 'The Sociology of Crime and Social Control in Britain, 1960–1987', in P. Rock (ed.), *A History of British Criminology*, Oxford: Clarendon Press.
- and ROCK, P. (eds) (1979), *Deviant Interpretations*, Oxford: Martin Robertson.
- and — (2011), *Understanding Deviance*, Oxford: Oxford University Press.
- DUNEIER, M. (2001), *Sidewalk*, New York: Farrar, Straus and Giroux.
- DURKHEIM, É. (1952), *Suicide*, London: Routledge & Kegan Paul.
- (1964), *The Division of Labour in Society*, New York: Free Press.
- EISNER, M. (2003), 'Long-Term Historical Trends in Violent Crime', in M. Tonry (ed.), *Crime and Justice*, University of Chicago Press: Chicago.
- ERIKSON, K. (1966), *Wayward Puritans*, New York: Wiley.
- (1994), *A New Species of Trouble*, New York: Norton.
- FARIS, R. and DUNHAM, H. (1939), *Mental Disorders in Urban Areas*, Chicago: University of Chicago Press.
- FEELEY, M. (1996), 'The Decline of Women in the Criminal Process', in *Criminal Justice History*, 15, Westport, Ct.: Greenwood Press.
- and SIMON, J. (1992), 'The New Penology', *Criminology*, 30.
- FELSON, M. (1994), *Crime and Everyday Life*, California: Pine Forge.
- and CLARKE, R. (1998), *Opportunity Makes the Thief*, Police Research Series Paper, London: Home Office.
- FERRELL, J. (1993), *Crimes of Style*, Boston, Mass.: Northeastern University Press.
- and SANDERS, C. (1995), *Cultural Criminology*, Boston, Mass.: Northeastern University Press.
- , HAYWARD, K., MORRISON, W., and PRESDEE, M. (eds) (2004), *Cultural Criminology Unleashed*, London: Glasshouse.
- , HAYWARD, K., and YOUNG, J. (2008), *Cultural Criminology*, London: Sage.

- FITZGERALD, M. (1977), *Prisoners in Revolt*, Harmondsworth: Penguin.
- FLEISHER, M. (1995), *Beggars and Thieves*, Madison, Wis.: University of Wisconsin Press.
- FLETCHER, J. (1850), *Summary of the Moral (and Educational) Statistics of England and Wales*, London: privately printed.
- FOUCAULT, M. (1977), *Discipline and Punish*, Harmondsworth: Penguin.
- FUKUYAMA, F. (2004), *State Building*, London: Profile Books.
- GARLAND, D. (1988), 'British Criminology before 1935', in P. Rock (ed.), *A History of British Criminology*, Oxford: Clarendon Press.
- (2002), 'Of Crimes and Criminals: The Development of Criminology in Britain', in M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, 3rd edn, Oxford: Oxford University Press.
- GELSTHORPE, L. and MORRIS, A. (1988), 'Feminism and Criminology in Britain', *British Journal of Criminology*, 28.
- GENN, H. (1988), 'Multiple Victimisation', in M. Maguire and J. Pointing (eds), *Victims of Crime: a New Deal?*, Milton Keynes: Open University Press.
- GIDDENS, A. (1972), *Émile Durkheim: Selected Writings*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (1991), *Modernity and Self-Identity*, Cambridge: Polity Press.
- GILL, O. (1977), *Luke Street: Housing Policy, Conflict and the Creation of the Delinquent Area*, London: Macmillan.
- GLUCKMAN, M. (1955), *The Judicial Process Among the Barotse of Northern Rhodesia*, Manchester: Manchester University Press.
- GODWIN, P. (2006), *When a Crocodile Eats the Sun*, New York: Back Bay Books.
- GOFFMAN, E. (1968), *Asylums*, Harmondsworth: Penguin.
- GORDON, C. (ed.) (1972), *Power/Knowledge*, Brighton: Harvester Press.
- GORDON, D. (1986–7), 'The Electronic Panopticon', *Politics and Society*, 15.
- GOTTFREDSON, M. and HIRSCHI, T. (1990), *A General Theory of Crime*, Stanford, Cal.: Stanford University Press.

- GUERRY, A. (1864), *Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France*, Paris: J. B. Bailliere et Fils.
- HAGAN, J. (1985), 'The Class Structure of Gender and Delinquency: Toward a Power-Control Theory of Common Delinquent Behavior', *American Journal of Sociology*, 90.
- (1988), *Structural Criminology*, Cambridge: Polity Press.
- (1977), *The Disreputable Pleasures*, New York: McGraw-Hill Ryerson.
- and MCCARTHY, B. (1998), *Mean Streets: Youth Crime and Homelessness*, Cambridge: Cambridge University Press.
- , SIMPSON, J. H., and GILLIS, A. R. (1979), 'The Sexual Stratification of Social Control', *British Journal of Sociology*, 30.
- HAGGERTY, K. (2004), 'Displaced Expertise', *Theoretical Criminology*, 8, 2.
- HALL, S., CRITCHER, C., JEFFERSON, T., CLARKE, J., and ROBERTS, B. (1978), *Policing the Crisis*, London: Macmillan.
- HALLSWORTH, S. (2005), *Street Crime*, Cullompton: Willan.
- HEIDENSOHN, F. (1968), 'The Deviance of Women: A Critique and an Enquiry', *British Journal of Sociology*, 19.
- HENRY, S. and MILOVANOVIC, D. (1996), *Constitutive Criminology: Beyond Postmodernism*, London: Sage.
- HILLIER, W. (1973), 'In Defence of Space', *RIBA Journal*, November.
- (1986), 'City of Alice's Dreams', *Architecture Journal*, 9.
- HILLYARD, P., SIM, J., TOMBS, S., and WHYTE, D. (2004), 'Leaving a "Stain upon the Silence": Contemporary Criminology and the Politics of Dissent', *British Journal of Criminology*, 44: 369–90.
- HIRSCHI, T. (1969), *The Causes of Delinquency*, Berkeley, Cal.: University of California Press.
- HIRST, P. (1975), 'Marx and Engels on Law, Crime and Morality', in I. Taylor et al. (eds), *Critical Criminology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- HOOD, R. (2004), 'Hermann Mannheim and Max Grünbut: Criminological Pioneers in London and Oxford', *British Journal of Criminology*, July, 44(4): 469–95.

- HOOKER, E. (1963), *Male Homosexuality*, in N. Farberow (ed.), *Taboo Topics*, New York: Prentice- Hall.
- HOPE, T. (1982), *Burglary in Schools*, London: Home Office.
- HOUGH, M. and MAYHEW, P. (1983), *The British Crime Survey*, London: HMSO.
- HOWARD, J. (1784), *The State of the Prisons*, London: Cadell, Johnson, and Dilly.
- INCIARDI, J. (ed.) (1980), *Radical Criminology: the Coming Crises*, Beverly Hills, Cal.: Sage.
- INNES, M. (2003), *Understanding Social Control: Deviance, Crime And Social Order*, Maidenhead: Open University Press.
- JACOBS, J. (1965), *The Death and Life of Great American Cities*, Harmondsworth: Penguin.
- JONES, T., MACLEAN, B., and YOUNG, J. (1986), *The Islington Crime Survey*, Aldershot: Gower.
- KAPLAN, R. (1994), *The Coming Anarchy*, *The Atlantic Monthly*, February.
- KATZ, J. (1988), *Seductions of Crime*, New York: Basic Books.
- (1997), *Ethnography's Warrants*, *Sociological Methods and Research*, 25: 4.
- KENNY, C. (1910), *untitled piece* in *Journal of the Society of Comparative Legislation*, 10: 2.
- KITTRIE, N. (1971), *The Right to be Different*, Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press.
- KORNHAUSER, R. (1978), *Social Sources of Delinquency: An Appraisal of Analytic Models*, Chicago: University of Chicago Press.
- KUMAR, R. (1993), *The History of Doing*, New Delhi: Kali for Women.
- LACEY, N., *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Societies*, Cambridge: Cambridge University Press.
- LANDESCO, J. (rep. 1968), *Organized Crime in Chicago*, Chicago: University of Chicago Press.

- LAUB, J. and SAMPSON, R. (2003), *Shared Beginnings: Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- LEA, J. and YOUNG, J. (1984), *What is to be Done about Law and Order?*, London: Penguin Books.
- LEMERT, E. (1951), *Social Pathology*, New York: McGraw-Hill.
- LIANOS, M. with DOUGLAS, M. (2000), 'Dangerisation and the End of Deviance: The Institutional Environment', *British Journal of Criminology*, Spring, 40: 2.
- LLEWELLYN, K. and HOEBEL, A. (1941), *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, Norman, Okla.: University of Oklahoma Press.
- LOADER, I. and SPARKS, R. (2010), *Public Criminology?*, London: Routledge.
- LOMBROSO, C. (1895), *The Female Offender*, London: T. Fisher Unwin.
- LUCKENBILL, D. and BEST, J. (1981), 'Careers in Deviance and Respectability', *Social Problems*, 29.
- LUKES, S. (1967), 'Alienation and Anomie', in P. Laslett and W. Runciman (eds), *Philosophy, Politics and Society*, Oxford: Blackwell.
- LYON, D. (1994), *The Electronic Eye*, Cambridge: Polity Press.
- MCROBBIE, A. and GARBER, J. (1976), 'Girls and Subcultures', in S. Hall and T. Jefferson (eds), *Resistance through Ritual*, London: Hutchinson.
- MANNHEIM, H. (1965), *Comparative Criminology*, London: Routledge and Kegan Paul.
- MARSHALL, I. (2002), 'The Criminological Enterprise in Europe and America', in S. Cote (ed.), *Criminological Theories: Bridging the Past to the Future*, Thousand Oaks, Cal.: Sage.
- MARTINSON, R. (1974), 'What Works? Questions and Answers about Penal Reform', *Public Interest*, 35.
- MARUNA, S. (2001), *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild their Lives*, Washington DC: American Psychological Association.

- MARX, G. (1988), *Under Cover*, Berkeley, Cal.: University of California Press.
- MATHIESEN, T. (1974), *The Politics of Abolition*, London: Martin Robertson.
- MATTHEWS, R. and YOUNG, J. (eds) (1992), *Rethinking Criminology: The Realist Debate*, London: Sage.
- MATZA, D. (1964), *Delinquency and Drift*, New York: Wiley.
- (1969), *Becoming Deviant*, New Jersey: Prentice-Hall.
- MAUDSLEY, H. (1888), 'Remarks on Crime and Criminals,' *Journal of Mental Science*, July.
- MAYHEW, P., CLARKE, R. V. G., SHURMAN, A., and HOUGH, J. M. (1976), *Crime as Opportunity*, Home Office Research Study No. 34, London: Home Office.
- MEAD, G. (1918), 'The Psychology of Punitive Justice', *American Journal of Sociology*, 23.
- (1934), *Mind Self and Society*, Chicago: University of Chicago Press.
- MERTON, R. (1938), 'Social Structure and Anomie', *American Sociological Review*, 3.
- (1957), *Social Theory and Social Structure*, Glencoe, Ill.: Free Press.
- (1995), 'Opportunity Structure: The Emergence, Diffusion and Differentiation of a Sociological Concept, 1930s–1950s', in F. Adler and W. Laufer (eds), *The Legacy of Anomie Theory*, New Brunswick: Transaction.
- MESSERSCHMIDT, J. (1997), *Crime as Structured Action: Gender, Race, Class, and Crime in the Making*, Thousand Oaks, Cal.: Sage.
- MESSNER, S. and ROSENFELD, R. (2009), 'Institutional Anomie Theory: A Macro-sociological Explanation of Crime', in M. Krohn, A. Lizotte, and G. Hall (eds), *Handbook on Crime and Deviance*, New York: Springer.
- MILL, J. (originally published 1838, republished 1950), *Bentham and Coleridge*, London: Chatto and Windus.
- MILLS, C. (1940), 'Situating Actions and Vocabularies of Motive', *American Sociological Review*, 5.

- MORRIS, T. (1957), *The Criminal Area*, London: Routledge & Kegan Paul.
- (1988), 'British Criminology: 1935–48', in P. Rock (ed.), *A History of British Criminology*, Oxford: Clarendon Press.
- MORRISON, W. (1891), *Crime and its Causes*, London: Swan Sonnenschein.
- (1896), *Juvenile Offenders*, London: Swan Sonnenschein.
- MURPHY, D. and ROBINSON, M. (2008), 'The Maximizer: Clarifying Merton's Theories of Anomie and Strain', *Theoretical Criminology*, November, 12.
- NEWBURN, T. and STANKO, E. (eds) (1994), *Just Boys Doing Business: Masculinity and Crime*, London: Routledge.
- NEWMAN, K. (2006), *Chutes and Ladders: Navigating the Low-Wage Labor Market*, New York: Russell Sage Foundation.
- NEWMAN, O. (1972), *Defensible Space: People and Design in the Violent City*, London: Architectural Press.
- NORRIS, C. and ARMSTRONG, G. (1999), *The Maximum Surveillance Society*, Oxford: Berg.
- O'MALLEY, P. (1992), 'Risk, Power and Crime Prevention', *Economy and Society*, August, 21.
- (2010), *Crime and Risk*, London: Sage.
- PARK, R. (1915), 'The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment', *American Journal of Sociology*, 20.
- (1925), 'Community Organization and Juvenile Delinquency', in R. Park and R. Burgess (eds), *The City*, Chicago: University of Chicago Press.
- PARSONS, T. (1951), *The Social System*, London: Routledge & Kegan Paul.
- PEARCE, F. (1976), *Crimes of the Powerful*, London: Pluto.
- and TOMBS, S. (1998), *Toxic Capitalism: Corporate Crime and the Chemical Industry*, Aldershot: Dartmouth.
- PHILLIPSON, M. (1974), 'Thinking Out of Deviance', unpublished paper.
- POLK, K. (1994), *When Men Kill*, Cambridge: Cambridge University Press.
- POLSKY, N. (1967), *Hustlers, Beats and Others*, Chicago: Aldine.

- POWER, A. (1997), *Estates on the Edge: The Social Consequences of Mass Housing in Northern Europe*, New York: St. Martin's Press.
- PRESDEE, M. (2000), *Cultural Criminology and the Carnival of Crime*, London: Routledge.
- QUETELET, L. (1848), *Du système social et des lois qui le régissent*, Paris: np.
- QUINNEY, R. (1970), *The Social Reality of Crime*, Boston, Mass.: Little Brown.
- RADZINOWICZ, L. and HOOD, R. (1990), *The Emergence of Penal Policy in Victorian and Edwardian England*, Oxford: Clarendon Press.
- RAINWATER, L. (1970), *Behind Ghetto Walls*, Chicago: Aldine.
- RECKLESS, W. (1933), *Vice in Chicago*, Chicago: University of Chicago Press.
- et al. (1957), 'The Good Boy in a High Delinquency Area', *Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 48.
- REIMAN, J. (1990), *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*, New York: Macmillan.
- REINER, R. (2007), *Law and Order: An Honest Citizen's Guide to Crime and Control*, Cambridge: Polity Press.
- ROCK, P. (1988), 'The Present State of British Criminology', in P. Rock (ed.), *A History of British Criminology*, Oxford: Clarendon Press.
- (2007), 'Caesare Lombroso as a Signal Criminologist', *Criminology and Criminal Justice*, 7.
- 'Comment', *Criminology & Policy*, November 2010.
- (2011), 'What have we done?', *Acta Criminologica*, 24(1): 19-43.
- ROMILLY, S. (1811), *Observations on the Criminal Law of England*, London.
- RONCEK, D. and MAIER, P. (1991), 'Bars, Blocks, and Crimes Revisited: Linking the Theory of Routine Activities to the Empiricism of "Hot Spots"', *Criminology*, 29.
- RORTY, R. (1991), *Objectivity, Relativism, and Truth*, Cambridge: Cambridge University Press.

- SAMPSON, R. and LAUB, J. (1993), *Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- SCHEFF, T. (1966), *Being Mentally Ill*, London: Weidenfeld & Nicolson.
- SCHUR, E. (1963), *Narcotic Addiction in Britain and America*, London: Tavistock.
- SCOTT, M. and LYMAN, S. (1970), 'Accounts, Deviance and Social Order', in J. Douglas (ed.), *Deviance and Respectability*, New York: Basic Books.
- SCOTT, R. (1972), 'A Proposed Framework for Analyzing Deviance as a Property of Social Order', in R. Scott and J. Douglas (eds), *Theoretical Perspectives on Deviance*, New York: Basic Books.
- SCOTTISH CENTRAL RESEARCH UNIT (1999), *The Effect of Closed Circuit Television on Recorded Crime Rates and Public Concern about Crime in Glasgow*, Edinburgh: The Scottish Office.
- SCRATON, P. (ed.) (1987), *Law, Order, and the Authoritarian State: Readings in Critical Criminology*, Milton Keynes: Open University Press.
- SCULL, A. (1977), *Decarceration: Community Treatment and the Deviant*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- (1979), *Museums of Madness: The Social Organization of Insanity in Nineteenth-Century England*, New York: Allen Lane.
- SEMPLE, J. (1993), *Bentham's Prison: A Study of the Panopticon Penitentiary*, Oxford: Clarendon Press.
- SHAPLAND, J. and VAGG, J. (1988), *Policing by the Public*, Oxford: Clarendon Press.
- SHAW, C. (1971), 'Male Juvenile Delinquency and Group Behavior', in J. Short (ed.), *The Social Fabric of the Metropolis*, Chicago: University of Chicago Press.
- and MCKAY, H. (1942), *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago: University of Chicago Press.
- SHEARING, C. and STENNING, P. (1985), 'From the Panopticon to Disney World: The Development of Discipline', in A. Doob and E. Greenspan

- (eds), *Perspectives in Criminal Law*, Aurora: Canada Law Book.
- SHERMAN, L. (2010), 'Defiance, Compliance and Consilience: A General Theory of Criminology', in E. McLaughlin and T. Newburn (eds), *Sage Handbook of Criminological Theory*, London: Sage.
- , GARTIN, P., and BUERGER, M. (1989), 'Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology of Place', *Criminology*, 27.
- SHORT, E. and DITTON, J. (1998), 'Seen and Now Heard: Talking to the Targets of Open Street CCTV', *British Journal of Criminology*, 38: 3.
- SHORT, J. and STRODBECK, F. (1967), *Group Process and Gang Delinquency*, Chicago: University of Chicago Press.
- SIM, J. (1990), *Medical Power in Prisons: The Prison Medical Service in England 1774–1989*, Milton Keynes: Open University Press.
- SIMON, J. (1987), 'The Emergence of a Risk Society', *Socialist Review*.
- (1993), *Poor Discipline: Parole and the Social Control of the Underclass*, Chicago: University of Chicago Press.
- (2007), *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, New York: Oxford University Press.
- and FEELEY, M. (1995), 'True Crime: The New Penology and Public Discourse on Crime', in T. Blomberg and S. Cohen (eds), *Punishment and Social Control*, New York: Aldine de Gruyter.
- SLAPPER, G. and TOMBS, S. (1999), *Corporate Crime*, London: Longman.
- SMART, C. (1977), *Women, Crime and Criminology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- (1989), *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge.
- SMITH, D. (2000), 'Changing Situations and Changing People', in A. von Hirsh, D. Garland, and A. Wakefield (eds), *Ethical and Social Perspectives on Situational Crime Prevention*, Oxford: Hart Publishing.
- SPIERENBURG, P. (2008), *A History of Murder*, Cambridge: Polity.
- STEPHENS, J. (1976), *Loners, Losers and Lovers*, Seattle: University of Washington Press.

- STINCHCOMBE, A. (1968), *Constructing Social Theories*, New York: Harcourt Brace and World.
- SUMNER, C. (1994), *The Sociology of Deviance: An Obituary*, Buckingham: Open University Press.
- (ed.) (2004), *Introduction to The Blackwell Companion to Criminology*, Oxford: Blackwell.
- SUTHERLAND, E. and CRESSEY, D. (1955), *Principles of Criminology*, Chicago: Lippincott.
- SUTTLES, G. (1972), *The Social Construction of Communities*, Chicago: University of Chicago Press.
- SYKES, G. and MATZA, D. (1957), 'Techniques of Neutralization', *American Sociological Review*, 22.
- TAYLOR, I. (1999), *Crime in Context: A Critical Criminology of Market Societies*, Cambridge: Polity Press.
- TAYLOR, I., WALTON, P., and YOUNG, J. (1973), *The New Criminology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- THRASHER, F. (1927), *The Gang*, Chicago: University of Chicago Press.
- TIERNEY, J. (1996), *Criminology: Theory and Context, 2nd edn 2005*, London: Prentice-Hall.
- TURNBULL, C. (1973), *The Mountain People*, London: Paladin.
- VALIÉR, C. (1995), 'Psychoanalysis and crime in Britain During the Inter-War Years', *The British Criminology Conferences: Selected Proceedings. Volume 1: Emerging Themes in Criminology. Papers from the British Criminology Conference*, Loughborough University, 18–21 July.
- VALVERDE, M. (1991), 'Feminist Perspectives on Criminology', in J. Gladstone, R. Ericson, and C. Shearing (eds.), *Criminology: A Reader's Guide*, Toronto: Centre of Criminology, University of Toronto.
- VAN CREVELD, M. (1991), *The Transformation of War*, New York: Free Press.
- WACQUANT, L. (2008), *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge: Polity.

- WALKLATE, S. and EVANS, K. (1999), *Zero Tolerance or Community Tolerance*, Aldershot: Ashgate.
- WELSH, B. and FARRINGTON, D. (2002), *Crime Prevention Effects of Closed Circuit Television: A Systematic Review*, London: Home Office.
- WHITTEN, M. (2002), *Protection, Prevention, Reformation: A History of the Philanthropic Society*, PhD dissertation, London School of Economics.
- WHYTE, W. (1942), *Street Corner Society*, Chicago: University of Chicago Press.
- WIKSTROM, P-O. (2007), *The Social Ecology of Crime: The Role of the Environment in Crime Causation*, in H. Schneider (ed.), *Internationales Handbuch der Kriminologie*, Berlin: De Gruyter,
- Wilkins, L. (1964), *Social Deviance*, London: Tavistock.
- WILKINSON, R. and PICKETT, K., (2009), *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always do Better*, London: Allen Lane.
- WILLIS, P. (1977), *Learning to Labour*, Farnborough, Hants: Gower.
- WILSON, H. (1980), *Parental Supervision: A Neglected Aspect of Delinquency*, *British Journal of Criminology*, 20.
- WILSON, W. (1996), *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*, New York: Alfred Knopf.
- WIRTH, L. (1964), *Culture Conflict and Misconduct*, in *On Cities and Social Life*, Chicago: University of Chicago Press.
- WRIGHT, R. and DECKER, S. (1997), *Armed Robbers in Action: Stickups and Street Culture*, Boston: Northeastern University Press.
- YABLONSKY, L. (1962), *The Violent Gang*, London: Pelican. YOUNG, J. (1971), *The Drugtakers*, London: Paladin.
- (1997), *Left Realist Criminology*, in M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner (eds), *The Oxford Handbook of Criminology*, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
- (1998), *From Inclusive to Exclusive Society: Nightmares in the European Dream*, in V. Ruggiero, N. South, and I. Taylor (eds), *The New European Criminology*, London: Routledge.

- (1999), *The Exclusive Society*, London: Sage.
- (2004), 'Crime and the Dialectics of Inclusion/Exclusion', *British Journal of Criminology*, July, 44: 44.
- (2007), *The Vertigo of Late Modernity*, London: Sage.
- ZIMRING, F. (2007), *The Great American Crime Decline*, New York: Oxford University Press.

BAB 3

BENTUK-BENTUK KRIMINALITAS DALAM KRIMINOLOGI

3.1 Kejahatan dengan Tindak Kekerasan (*Violent Crimes*)

Kekerasan adalah topik yang kontroversial dan sangat emosional, yang menimbulkan rasa takut dan terpesona, kutukan, dan belasungkawa. Kita bisa tertarik pada tindakan kekerasan atau kekerasan individu dalam satu konteks, ditolak di konteks lain. Persepsi kita tentang individu yang terlibat—kebrutalan mereka, kerentanan mereka, kesalahan mereka—juga menginformasikan penilaian kita tentang perilaku mereka. Di satu sisi, serangan kekerasan yang tidak beralasan dapat memicu gelombang kemarahan dan kebencian publik. Di sisi lain, penulis mungkin bersimpati dengan individu yang membalas pelecehan jangka panjang dengan tindakan kekerasan yang direncanakan. Sikap publik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti liputan media (itu sendiri dipengaruhi oleh agenda pemerintah, polisi, dan perusahaan) dan pengalaman kejahatan pribadi orang itu sendiri (dan teman serta tetangga mereka).

Kekerasan adalah konsep yang sangat diperdebatkan dan bergantung pada konteks. Elastisitas perbatasannya, sementara sebagian membebaskan (dalam memungkinkan seseorang untuk melemparkan jaring lebar-lebar ketika mengeksplorasi kekerasan) juga membuat tugas untuk menangkap

tingkat dan sifat fenomena, apalagi penyebab atau cakupannya untuk pencegahan—sangat menantang, jika tidak mustahil. Pertama-tama, tidak ada definisi yang disepakati secara umum untuk memandu pengukurannya. Kebanyakan ilmuwan sosial akan setuju bahwa definisi seperti itu harus mencakup kerusakan psikologis dan fisik dan tidak boleh dibatasi pada kategori pelanggaran kekerasan yang ditentukan secara hukum; namun, ini masih bisa diperdebatkan. Misalnya, *Henry (2000: 13)* mendefinisikan kekerasan sebagai 'penggunaan kekuasaan untuk menyakiti orang lain, apapun bentuknya' dengan memperhatikan bahwa kekerasan dapat mencakup banyak aspek di luar fisik (misalnya psikologis, emosional, ekonomi, identitas, etika, dll.). Beberapa kritikus menunjukkan, bagaimanapun, bahwa definisi bisa menjadi 'begitu luas sehingga hampir semua situasi yang seseorang temukan tidak menyenangkan akan memenuhi syarat sebagai bentuk kekerasan' (*Waddington et al. 2004: 158*).

Kedua, jenis kekerasan tertentu cenderung mendapat perhatian yang jauh lebih besar daripada yang lain oleh pemerintah, media, dan kriminolog, dan karenanya jumlah informasi yang dapat diandalkan yang tersedia sangat bervariasi di antara mereka. Khususnya, kekerasan korporasi atau kekerasan negara secara umum gagal memicu tingkat keprihatinan atau liputan yang berkelanjutan yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk kekerasan jalanan atau, baru-baru ini, kekerasan dalam rumah tangga dan terorisme. Bahkan, dalam kategori kejahatan yang menarik perhatian, beberapa jenis korban atau aspek kekerasan cenderung terabaikan. Misalnya, baru-baru ini perhatian diberikan pada kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan sesama jenis (*Ristock, 2009*) atau terhadap laki-laki oleh perempuan (*Dobash dan Dobash, 2004*) dan terus terjadi pengabaian kekerasan yang dilakukan terhadap individu-individu di dalamnya. institusi seperti rumah anak, rumah sakit, penjara, dan panti jompo (*Cooper et al., 2008*). Ada juga pengabaian umum kejahatan yang

dilakukan oleh dan terhadap orang tua dibandingkan dengan keasyikan abadi dengan 'masalah' kejahatan pemuda (*Estrada, 2001*). Terakhir, bahasa yang secara rutin digunakan untuk mendeskripsikan tindakan kekerasan tertentu—seperti 'pelecehan' terhadap anak, seksual, atau orang tua—gagal untuk mewakili realitas kekerasan yang pada dasarnya adalah tindakan yang terlibat dan dampaknya terhadap korban. Bahasa yang sering diadopsi untuk mendeskripsikan kekerasan masa perang juga sama dilutif (misalnya istilah seperti konflik, skirmish, dan korban).

3.1.1 TINDAK KEKERASAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN NEGARA

Kekerasan negara dan politik mengacu pada tindakan kekerasan yang mematikan dan tidak mematikan yang dilakukan oleh pemerintah formal dan entitas kuasi pemerintah. Sementara upaya untuk mengukur kekerasan yang dilakukan oleh negara penuh dengan kesulitan (karena kesulitan nyata dalam mencatat kematian tersebut ditambah dengan keinginan pejabat negara untuk menyembunyikan luasnya), terlihat bahwa kekerasan yang diakibatkan oleh tindakan atau kelambanan oleh pemerintah merupakan masalah yang signifikan. Banyak bentuk kekerasan lainnya, baik yang mematikan maupun yang tidak mematikan, menyertai perang. Misalnya, diperkirakan hingga 60.000 perempuan diperkosa di Bosnia dan Herzegovina selama konflik antara tahun 1992 dan 1995 (*Randall dan Haskell 1995*) dengan dampak fisik dan psikologis jangka panjang yang tak terelakkan. Peperkosan massal sebagai elemen peperangan juga telah ditemukan di Kongo, Darfur, Rwanda, dan Liberia dan dalam kasus yang sama terus berlanjut setelah perang berakhir (*Kristof, 2009*).

Penyiksaan terus dilakukan di sebagian besar negara anggota PBB, termasuk beberapa yang terkaya dan paling demokratis (*Morgan, 2010*). Misalnya, laporan tahun 2011 menyimpulkan bahwa 98 dari 157 negara

yang diperiksa telah menyiksa atau memperlakukan orang dengan buruk, meskipun sebagian besar dari mereka adalah anggota Konvensi PBB tentang penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya (Amnesty International, 2011). Tingkat penyiksaan yang sebenarnya sulit untuk diuraikan mengingat kerahasiaan seputar 'interogasi' yang dipimpin keamanan. Terakhir, efek tidak langsung dari kekerasan yang direstui negara juga sangat besar. Misalnya, penderitaan yang tak terduga dialami oleh individu yang mungkin harus meninggalkan kampung halamannya sebagai pengungsi, kematian bayi umumnya meningkat selama masa konflik, dan penyakit menular dapat meningkat menjadi epidemi. Kelaparan sendiri terkait dengan konflik atau genosida di abad kedua puluh menewaskan sekitar 40 juta orang (*WHO, 2002*).

Meskipun penulis telah memfokuskan pada beberapa contoh kekerasan negara yang lebih ekstrem, penting untuk menyadari bahwa kejahatan negara menyebar dan tidak terbatas pada beberapa negara 'nakal' atau negara dengan rezim otoriter (*Williams, 2010*). Penulis menyarankan bahwa negara-negara modern melakukan atau menghasut sebagian besar kekerasan tidak sah yang serius di dunia sementara secara bersamaan mengklaim monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Mungkin lebih dari kategori kekerasan lainnya, kekerasan negara masih kurang diteliti oleh para ilmuwan sosial dan fokusnya hanya sedikit perhatian oleh pembuat kebijakan.

3.1.2 TINDAK KEKERASAN DALAM PERUSAHAAN (CORPORATE VIOLENCE)

Secara umum, kejahatan kekerasan perusahaan terbagi dalam tiga kategori: (i) yang dilakukan terhadap konsumen (misalnya, penjualan barang yang tidak layak atau penyediaan layanan yang tidak aman); (ii) yang muncul dari hubungan kerja (misalnya kesehatan dan keselamatan di tempat kerja); dan (iii) kejahatan terhadap lingkungan (misalnya polusi udara) (Tombs,

2008). Jika kita hanya mengambil satu contoh dari setiap kategori, skala kekerasan perusahaan dengan cepat menjadi jelas. Barang dan jasa tidak layak adalah kategori luas yang mencakup sistem transportasi yang tidak aman, makanan yang tidak layak, air yang terkontaminasi, obat-obatan yang tidak aman, dan sebagainya. Penulis hanya akan mempertimbangkan keamanan transportasi secara singkat. Kecelakaan udara saja membunuh rata-rata

1.178 orang setiap tahun di seluruh dunia dan telah menewaskan lebih dari 11.000 orang dalam dekade terakhir. Sementara banyak yang pada akhirnya dianggap terjadi karena kesalahan pilot, juga jelas bahwa industri itu sendiri menciptakan kondisi di mana keselamatan dikompromikan termasuk saat-saat ketika manajer bersikeras bahwa pesawat terbang sesuai jadwal meskipun ada kekurangan dalam keselamatan (*Tombs, 2008*).

Akhirnya, WHO memperkirakan bahwa polusi udara menyebabkan kematian dini tahunan dua juta orang di seluruh dunia (*WHO, 2008*) sementara di Inggris diperkirakan 24.000 orang meninggal secara prematur setiap tahun karena polusi udara (*Thornton dan Beckwith, 2004: 291*). Terlepas dari jumlah kematian yang sangat besar dan kerugian yang lebih luas yang disebabkan oleh entitas perusahaan, banyak yang berpendapat bahwa aktivitas merugikan mereka selalu tidak dianggap sebagai 'kejahatan nyata' atau dihukum seperti itu (*Snell and Tombs, 2011*). Di Inggris, hukuman pertama yang berhasil untuk pembunuhan perusahaan dibawa pada Februari 2011, sekitar tiga tahun setelah *Corporate Homicide and Manslaughter Act 2007* diberlakukan. Namun demikian, munculnya undang-undang baru ini menandai perubahan penting dari posisi sebelumnya di mana perusahaan jatuh jauh di bawah radar penuntutan.

3.1.3 TINDAK KEKERASAN ANTARPRIBADI (INTERPERSONAL VIOLENCE)

Terlepas dari skala dan pentingnya kekerasan negara, politik dan

perusahaan, bentuk kekerasan yang paling sering diukur oleh pemerintah dan organisasi lain adalah kekerasan antarpribadi. Keasyikan masyarakat dengan jenis kekerasan tertentu tercermin dalam dua set data yang sekarang diterbitkan bersama setiap tahun di *Crime in England dan Wales (Flatley et al., 2010)*, statistik kejahatan yang dicatat oleh polisi, dan hasil *British Crime Survey (BCS)*. Keduanya adalah produk dari persepsi dan definisi khusus tentang kekerasan, dan tidak dapat diandalkan karena sejumlah alasan. Mereka juga sering tidak dipercaya oleh publik (*Bailey et al., 2010*). Terlepas dari keterbatasan mereka, mereka memberi penulis gambaran tentang jumlah orang yang bersedia melaporkan telah menjadi korban setiap tahun, dan tingkat cedera yang mereka alami. Angka-angka ini juga dapat diterjemahkan ke dalam 'risiko' diserang, dibandingkan dengan, misalnya, dirampok.

Statistik kejahatan yang tercatat tentang kekerasan mencakup kumpulan pelanggaran yang berbeda yang telah mencapai buku undang-undang selama bertahun-tahun, mulai dari pembunuhan hingga pelecehan, dan termasuk bentuk-bentuk kekerasan 'baru' (misalnya pembunuhan perusahaan) dan beberapa anomali sejarah (misalnya membahayakan nyawa di laut). Mereka saat ini membagi kejahatan kekerasan secara luas menjadi tiga kategori utama: kekerasan terhadap seseorang, pelanggaran seksual, dan perampokan. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi pelanggaran yang mengakibatkan cedera dan yang tidak. BCS membuat perbedaan serupa antara kekerasan yang merugikan dan tidak merugikan. Pelanggaran yang tercakup dalam perkiraan BCS tidak langsung dipetakan ke dalam angka polisi. Melihat keduanya bersama-sama, bagaimanapun, memberikan indikasi luas sejauh mana kejahatan kekerasan antarpribadi tetap tersembunyi dari pemberitahuan resmi. Dalam wawancara BCS 2009/10, dalam 55 persen dari insiden kekerasan yang diingat oleh korban, polisi tidak mengetahui tentang masalah tersebut (*Hall and Innes, 2010: 47*).

3.2 Kejahatan Terorganisasi di Masyarakat

Sifat dan tingkat ancaman kejahatan terorganisir tetap menjadi medan yang diperdebatkan. Ada kontroversi mengenai (i) skala bahaya relatif dari kegiatan ilegal, termasuk tetapi tidak terbatas pada obat-obatan (Nutt et al., 2010) dan pekerja seks, dan (ii) sejauh mana kesehatan pengguna dan kerusakan kriminogenik dari beberapa obat diperburuk daripada dikurangi oleh penegakan hukum dan kebijakan kesehatan. Semakin dipertanyakan apakah selain mengecualikan perusahaan yang sah untuk menawarkan persaingan, penindasan oleh penegak hukum dan metode paramiliter memang dan dapat berdampak besar pada pasokan, ketersediaan, dan harga barang dan jasa yang melanggar hukum. Data—beralasan kuat atau spekulatif—berperan dalam proses advokasi kerugian (*Andreas dan Greenbill, 2010*). Dalam pergulatan budaya atas prioritas kerugian, terminologi bisa menjadi kabur. Jika perempuan di titik transportasi mengetahui bahwa mereka akan menjadi pekerja seks, istilah yang tepat adalah 'penyelundupan'; jika mereka tidak mengetahui hal ini, itu adalah 'perdagangan' atau bahkan (ketika dijual oleh kerabat mereka) 'perbudakan'.

Dalam praktiknya, orang dewasa yang mencari masa depan ekonomi yang lebih baik sering kali diberi tahu kebohongan tentang sifat pekerjaan masa depan mereka, padahal kenyataannya demikian sulit untuk memverifikasi *ex post facto* apa yang diberitahukan kepada mereka. Beberapa kelompok feminis dan fundamentalis agama menganggap bahwa perempuan tidak dapat secara sah menyetujui untuk menjadi pekerja seks dan oleh karena itu semua transportasi tersebut adalah 'perdagangan'; orang lain yang (meski bukan pekerjaan ideal) menjual seks secara sukarela adalah hak. Banyak pekerja seks migran dan pekerjaan lain melibatkan eksploitasi, tetapi tidak mungkin jaringan transportasi apa pun akan bertahan lama jika sebagian besar dari mereka yang keluarganya dibayar untuk beremigrasi gagal mencapai tujuan hidup-hidup atau mengirim dana

kembali untuk membayar kembali dan membantu keluarga mereka. *Davies (2009)* telah mengkritik pernyataan yang berlebihan dalam perkiraan kelompok advokasi tentang pekerja seks yang diperdagangkan ke Inggris. Perkiraan pencucian uang global dalam triliunan dolar (*Walker dan Unger, 2009*) memiliki basis analitis dan bukti yang sangat buruk tetapi menjadi 'fakta demi pengulangan' (*van Duyne dan Levi, 2005*). Di seluruh dunia, pasar kriminal sangat besar dan menghasilkan keuntungan (jika bukan keuntungan) miliaran. Kesalahannya adalah beralih dari proposisi yang dapat dipertahankan bahwa dampak berbahaya cukup besar, ke proposisi yang tidak dapat dipertahankan bahwa dampak ini dapat ditentukan dengan pasti (atau bahkan dengan masuk akal yang masuk akal) dan bahwa dampak tersebut muncul dari mekanisme penyampaian yang koheren umum yang disebut 'kejahatan terorganisir'.

Berbagai bentuk kejahatan terorganisir melibatkan pasokan produk yang diinginkan tetapi ilegal, baik itu:

1. sepenuhnya ilegal (seperti obat-obatan terlarang);
2. palsu (pada spektrum dari obat-obatan berkualitas buruk seperti antibiotik atau 'pil stamina' yang tidak berfungsi seperti yang diiklankan—rokok super-karsinogenik, dan film yang direkam dengan buruk di bioskop hingga DVD digital berkualitas tinggi dan obat-obatan generik yang disalin dengan ahli yang berfungsi sebagai serta aslinya); atau
3. menghindari pajak tetapi sebaliknya legal (minuman keras asli yang diselundupkan, bahan bakar minyak, atau tembakau).

Jumlah dan pengorganisasian kejahatan dalam masyarakat tertentu dipengaruhi oleh bagaimana pengawasan yang kompeten/keras dilaksanakan dan/atau dipersepsikan oleh pelanggar yang termotivasi. Wawasan sederhana ini ditangkap dalam kegiatan rutin dan model

pengecahan kejahatan situasional (lihat kontribusi berharga untuk *Bullock et al., 2010; Levi dan Maguire, 2004*). 'Kontrol' di sini tidak hanya mencakup norma hukum dan penegakannya, tetapi serangkaian aktivitas yang lebih luas yang membentuk peluang kejahatan, sebagian besar di negara maju yang terjadi di sektor swasta. Contohnya termasuk faktor teknologi seperti pengenalan yang efektif di Eropa (dan di tempat lain, kecuali AS) dari Chip dan PIN untuk menetralkan skimming data dari strip magnetik pada kartu kredit dan debit penulis; atau mengukur seperti sandi sekali pakai untuk mencegah phishing, 'pencatatan log kunci', dan virus sejenis Trojan lainnya sebagai cara untuk menangkap sandi penulis untuk perbankan online. Yang lebih sulit untuk ditangani adalah cara-cara di mana praktik peradilan pidana (serta sejarah, motivasi, dan keterampilan) membentuk tingkat dan organisasi pelanggaran: kecuali untuk dampak korupsi dalam sistem peradilan pidana pada peningkatan impunitas pelanggar, bukti penelitian sampai saat ini buruk.

3.3 Kejahatan Ekonomi dan Bisnis: Kejahatan Keraf Putih dan Korporat

Meskipun sebagian besar literatur tentang kejahatan keraf putih adalah orang Amerika, kontribusi besar telah dibuat oleh sarjana berbahasa Inggris lainnya, seperti *Braithwaite, Carson, dan Levi*. Istilah yang setara untuk 'kejahatan keraf putih' juga banyak ditemukan dalam bahasa lain, dan bahkan digunakan dalam proses pengadilan asing. Ada juga kontribusi menarik, terkadang dalam bahasa asing, yang dapat berfungsi sebagai titik awal yang berguna untuk penelitian komparatif. Namun penggunaan umum istilah tersebut bisa menyesatkan. Terlepas dari kesamaan ekonomi industri modern, ada perbedaan penting dalam budaya umum dan hukum yang memengaruhi makna dan tanggapan terhadap kejahatan keraf putih (dan kategori kontrasnya sebagai kejahatan biasa). Kontras ini belum

cukup dieksplorasi (lihat *Nelken 1994a; Levi dan Nelken 1996*). Di negara-negara hukum perdata seperti Italia, hanya sedikit lembaga penegakan hukum khusus yang digunakan untuk menangani pelanggaran kerja yang ditemukan, misalnya, di Amerika, Inggris, dan Australia. Sebaliknya, pasukan polisi biasa, sering kali dipelopori oleh polisi keuangan khusus, melakukan penyelidikan kejahatan ekonomi, dan pengusaha atau politisi berkerah putih secara teratur melihat-lihat bagian dalam penjara (meskipun hanya sedikit yang tampaknya tinggal di sana lama).

Kemarahan Amerika atas kelakuan buruk bisnis mungkin terkait dengan apa yang dilihat *Wright-Mills (1943/1963)* sebagai nilai-nilai kota kecil dari reformis sosial Amerika, serta hubungan cinta-benci Amerika yang aneh dengan bisnis besar (apakah mereka bukti kesuksesan kapitalis, atau ancaman bagi pasar dan individu?). Di negara-negara dengan warisan Katolik yang kuat, rasa hormat yang melekat pada pengambilan keuntungan kapitalis mungkin kurang aman dibandingkan di negara-negara Protestan (*Ruggiero, 1996*).

Banyak literatur tentang kejahatan kerah putih terus prihatin untuk menunjukkan keseriusan dan ketidakterbukaan pelanggaran tersebut, dan untuk menunjukkan bahwa biaya dan kerusakannya lebih kecil daripada kejahatan konvensional, atau biasa, (untuk ringkasan terbaru dari upaya untuk mengukur dampak kejahatan kerah putih, lihat *Slapper and Tombs, 1999: 37–41, 54–84*). Lebih dari jenis kejahatan lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh perilaku para bankir baru-baru ini, pelanggaran kerah putih merusak dasar kepercayaan yang menyatukan masyarakat dengan mendiskreditkan mereka yang memiliki otoritas atau posisi istimewa yang seharusnya menjadi model kehormatan.

Studi Carson tentang hilangnya nyawa dalam eksplorasi minyak di Laut Utara (dikonfirmasi oleh peristiwa selanjutnya seperti peledakan rig minyak Piper Alpha pada tahun 1988 dengan hilangnya 168 nyawa),

misalnya, menunjukkan bahwa banyak nyawa dapat telah diselamatkan dengan perhatian dasar pada pertimbangan keselamatan (*Carson, 1982*). Konsekuensi yang menghancurkan dari bencana nuklir di Chernobyl, ledakan kimia di Bhopal, penderitaan yang disebabkan oleh penjualan obat thalidomide, atau kontrasepsi yang dikenal sebagai perisai **Dalkon**, adalah contoh terkenal lainnya. Tetapi bahkan korban pelanggaran ekonomi dan bisnis yang melibatkan penipuan dan penipuan menderita sejumlah besar konsekuensi fisik dan ekonomi (*Croall, 2009*). Antara 20 dan 30 persen investor yang kehilangan uang sebagai akibat dari runtuhnya Enron juga melaporkan kerusakan ekstrim atau besar pada hubungan perkawinan, persahabatan, dan kesehatan fisik mereka, biasanya konsekuensi yang serupa atau lebih besar daripada yang disebabkan oleh kejahatan dengan kekerasan (*Boyd, 2006*).

Terlepas dari bukti seperti itu, kejahatan kerah putih masih mengalami interpretasi yang sangat berbeda. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat menganggap berbahaya perilaku yang mereka tanggapi sebagai kriminal, bukan sebaliknya. Tetapi banyak penulis bersikeras bahwa itu adalah tingkat kerusakan sosial yang seharusnya menjadi masalah (*Hilyard, Pantazis, Tombs, dan Gordon, 2004*). Menunjukkan bahwa kejahatan kerah putih menyebabkan konsekuensi yang lebih berbahaya daripada kejahatan jalanan dipandang sebagai cara untuk mempengaruhi definisi sosial dari perilaku semacam itu—dan perdebatan mengenai penyebab dan pengendalian kejahatan kerah putih sering kali berhubungan dengan evaluasi politik yang berbeda tentang kesalahan bisnis atau kapitalisme. Kaum konservatif politik cenderung lebih menyukai penjelasan struktural tentang malpraktek bisnis daripada kesalahan pribadi—sehingga bertukar tempat dengan kaum liberal dibandingkan dengan posisi mereka dalam kejahatan biasa (seperti dicatat oleh *Zimring dan Hawkins, 1993*). Di sisi lain, bahkan beberapa penulis yang mengkritik kapitalisme berpendapat bahwa

kejahatan korporasi memerlukan 'pergeseran dari humanis ke strukturalis bermasalah'—meskipun mereka tetap menerapkan label kriminal pada perilaku yang dihasilkan dari masalah struktural seperti itu (*Slapper dan Tombs, 1999: 17*). Sementara banyak penulis akan menekankan kerugian yang ditimbulkan pada pekerja, investor, penabung, dan pensiunan melalui kegagalan perusahaan terkemuka atau bank, orang lain akan lebih khawatir dengan biaya sosial dari 'kesuksesan' ekonomi mereka yang berkelanjutan (*Prashad, 2002*).

3.4 Penerapan dalam Hukum di Indonesia

Ruang lingkup tindak pidana	Undang-undang yang memuat ketentuan pidana	Pengaturannya di RKUHP
Terorisme	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7). • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana • Pemberantasan Terorisme (Pasal 4,5,6) • Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 14 huruf c dan d tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 249 dan Pasal 250 RKUHP • Pasal 254, 255, dan 256 RKUHP
Pelanggaran HAM Berat	Genosida dalam No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Kejahatan Terhadap Kemanusia dalam UU No 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM	Genosida: Pasal 400 ayat (1) dan (2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (semua ketentuan pidananya dimasukkan ke dalam RKUHP) • UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (semua ketentuannya pidananya ditarik, namun yang dimasukkan hanya lex generalisnya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 507 sampai dengan Pasal 525 untuk UU nomor 35 Tahun 2009 • Pasal 526 sampai dengan 534 untuk UU Nomor 5 Tahun 1997
Tindak Pidana Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Memasukkan semua pasal dalam BAB II tentang “Tindak Pidana korupsi” ke RKUHP. Namun untuk BAB III tentang “Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi” tidak dimasukkan	BAB XXXIII “Tindak Pidana Korupsi” Pasal 687 sampai dengan Pasal 706
Tindak Pidana Pencucian Uang	UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemebrantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Memasukkan semua ketentuan dalam BAB II “Tindak Pidana Pencucian Uang“ ke dalam RKUHP.	Pasal 760 sampai dengan Pasal 767 RKUHP

3.5 Bahan Diskusi

1. Sejauh mana RKUHP mampu merevisi hukum positif dari berbagai jenis tindak pidana di atas? Jelaskan pendapat anda!
2. Menurut anda, tindak pidana apa yang belum memiliki payung hukum yang kuat di Indonesia? Tolong jabarkan jawaban anda.

DAFTAR PUSTAKA

- AMNESTY INTERNATIONAL (2011), *Annual International Report 2011: The State of the World's Human Rights*, London: Amnesty.
- ANDREAS, P. and GREENHILL, K. (eds) (2010), *Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict*, Ithaca: Cornell University Press.
- BAILEY, R., ROFIQUE, J., and HUMPHREY, A. (2010), *Public Confidence in Official Statistics 2009*, London: National Centre for Social Research.
- BOYD, N. (2006), *Investment Fraud: The Victims of Enron Mortgage*, Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology, Los Angeles, CA, 1 November 2006.
- BULLOCK, K., MANN, D., STREET, R., and COXON, C (2010), *Examining attrition in confiscating the proceeds of crime*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate Research Report 17.
- CARSON, W. G. (1970), *White-collar Crime and the Enforcement of Factory Legislation*, *British Journal of Criminology*, 10: 383–98.
- COOPER, C., SELWOOD, A., and LIVINGSON, G. (2008), *The Prevalence of Elder Abuse and Neglect: A Systematic Review*, *Age and Ageing*, 37: 151–60.
- CROALL (2009), *Community safety and economic crime*, *Criminology and Criminal Justice*, 9(2): 165–185.
- DAVIES, N. (2009), *Prostitution and trafficking—the anatomy of a moral panic*, *The Guardian*, 20 October 2009.
- DOBASH, R.E. and DOBASH, R.P. (2004), *Women's Violence to Men in Intimate Relationships*, *British Journal of Criminology*, 44(3): 324–49.
- ESTRADA, S. (2001), *Juvenile Violence as a Social Problem: Trends, Media Attention and Societal Response*, *British Journal of Criminology*, 41: 639–55.
- FLATLEY, J., KERSHAW, C., SMITH, K., CHAPLIN, R., and MOON, D. (eds) (2010), *Crime in England and Wales 2009/10*, Findings from

- the British Crime Survey and police recorded crime, HOSB 12/10, London: Home Office.
- HALL, P. and INNES, J. (2010), *Violent and Sexual Crime*, in J. Flatley et al. (eds), *Crime in England and Wales 2009/10, Findings from the British Crime Survey and police recorded crime*. HOSB 12/10, London: Home Office.
- HENRY, S (2000), *What's the Scope of Violence in School Violence*, *The Critical Criminologist*, 10(2):13–16.
- HILLYARD, P., PANZATIS, C., TOMBS, S., and GORDON, D. (2004), *Beyond Criminology: Taking Harm Seriously*, London: Pluto Press.
- KRISTOF, N. D. (2009), *After Wars, Mass Rapes Persist*, *New York Times*.
- LEVI, M. and MAGUIRE, M. (2004), *Reducing and preventing organised crime: An evidence-based critique*, *Crime, Law and Social Change*, 41(5): 397–469.
- LEVI, M. and NELKEN, D. (eds) (1996), *The Corruption of Politics and the Politics of Corruption*, special issue of the *Journal of Law and Society*, 23: 1.
- MORGAN, R. (2010), *Torture*, in F. Brookman, M. Maguire, H. Pierpoint, and T. Bennett (eds), *Handbook on Crime*, Devon: Willan.
- NELKEN, D. (1994a), *Whom can you Trust? The Future of Comparative Criminology*, in D. Nelken (ed.), *The Futures of Criminology*, 220–44, London: Sage.
- NUTT, D., KING, L., and PHILLIPS, L. (2010), *Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis*, *The Lancet*, 376: 1558–65.
- PRASHAD, V. (2002), *Fat Cats and Running Dogs: the Enron Stage of Capitalism*, London: Zed Books.
- RANDALL, M. and HASKELL, H. (1995), *Sexual violence in women's lives: findings from the women's safety project, a community-based survey*, *Violence Against Women*, 1:6–31.
- RISTOCK, J. L. (2009), *Understanding violence in lesbian relationships*, in E. Stark and E. S. Buzawa (eds), *Violence against women in families*

- and relationships: Vol.1: Victimization and the community response, Santa Barbara, CA: Praeger.
- RUGGIERO, V. (1996), *Organised Crime and Corporate Crime in Europe*, Aldershot: Dartmouth.
- SLAPPER and TOMBS, S. (1999), *Corporate Crime*, Harlow: Longman.
- SNELL, K. and TOMBS, S. (2011), 'How do you get your voice heard when no-one will let you?' *Victimization at Work*, *Criminology and Criminal Justice*, 11(3):207–23.
- THORNTON, J. and BECKWITH, S. (2004), *Environmental Law, 2nd edn*, London: Sweet and Maxwell.
- TOMBS, S. (2008), 'Corporations and Health and Safety', in J. Minkes and L. Minkes (eds), *Corporate and White Collar Crime*, London: Sage.
- VAN DUYN, P. and LEVI, M. (2005), *Drugs and Money: Managing the Drug Trade and Crime-Money in Europe*, London: Routledge.
- WADDINGTON, P.A.J., BADGER, D., and BULL, R (2004), 'Appraising the Inclusive Definition of Workplace "Violence"', *British Journal of Criminology*, 45(2): 141–64.
- WALKER, J. and UNGER, B. (2009), 'Measuring Global Money Laundering: "The Walker Gravity Model"', *Review of Law & Economics*, 5(2).
- WILLIAMS, K. S. (2010), 'State Crime', in F. Brookman, M. Maguire, H. Pierpoint, and T. Bennett (eds), *The Handbook on Crime*, Devon: Willan.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002), *World Report on Violence and Health* (edited by E. G. Krug., L. L. Dahlberg., J. A. Mercy., A. B. Zwi, and R. Lozano), Geneva: WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION (2008), *World Health Organisation Air Quality and Health*, Fact Sheet No. 313. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html.
- ZIMRING, F. and HAWKINS, G. (1993), 'Crime, Justice and the Savings and Loans Crisis', in M. Tonry and A. Reiss Jnr (eds), *Beyond the Law: Crime in Complex Organizations*, Chicago: University of Chicago Press.

BAB 4

TINDAK KEJAHATAN DARING ATAU HIBRIDA DAN DAMPAK TERHADAP KORBAN

Kejahatan adalah aspek penting dari masyarakat. Kejahatan sering didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau penipuan yang dikejar seseorang untuk kepentingan mereka (*Gottfredson & Hirschi, 1990*). Tindakan kekerasan atau penipuan dapat memiliki jangkauan luas. Misalnya, beberapa perilaku kriminal mungkin termasuk tindakan kekerasan serta pencurian. Kejahatan juga dapat mencakup kegiatan seperti pornografi (mis., Pornografi anak), intimidasi, penguntitan, dan pencurian identitas. Kejahatan tradisional berlaku dalam beberapa cara. Secara umum, kejahatan membutuhkan pihak pertama, dan ini adalah seseorang yang memiliki niat dan akhirnya melakukan tindakan. Selanjutnya, kejahatan sering membutuhkan pihak kedua, dan ini sering merupakan objek kejahatan yang bisa berupa seseorang atau benda berwujud apa pun. Ketika individu yang menyembunyikan niat untuk melakukan kejahatan menemukan objek yang diinginkan untuk kejahatan, tindakan kejahatan kemungkinan akan terjadi. Ini menciptakan masalah kriminologis yang menarik.

Yang paling relevan dengan buku ini, masalah kriminologis yang menarik adalah pihak kedua kejahatan—khususnya, objek atau orang yang

telah menjadi korban kejahatan. Dalam banyak contoh, objek dari perilaku kriminal adalah komputer. Informasi yang disimpan di komputer serta make-up fisik komputer dapat dikompromikan. Ini adalah masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Orang tersebut dapat menjadi korban dalam berbagai cara. Viktimisasi dapat terjadi di banyak lokasi. Ini adalah inti dari kejahatan hibrida. Untuk memperjelas: kejahatan hibrida dapat terjadi di dunia cyber (*cybercrime*), atau mereka dapat terjadi di dunia nyata. Dalam bentuk lain, orang tersebut adalah objek dari kegiatan kriminal, dan selanjutnya adalah korban. Kejahatan campuran dan kejahatan dunia maya yang mengarah pada viktimisasi tidak terbatas. Jenis kegiatan ini dapat memiliki pelaku di satu negara dan menjadi korban di negara lain. Internet menyediakan jalur yang jelas untuk jenis interaksi ini. Jenis kegiatan yang sama dapat terjadi antara orang-orang yang berada dalam jarak yang lebih dekat. Sejumlah tindakan kriminal dapat mencakup kejahatan hibrida. Dalam bab ini, perilaku spesifik digunakan untuk memberikan contoh kejahatan hibrida. Perilaku-perilaku ini meliputi yang berikut: *sexting*, *cyberstalking*, dan pornografi anak.

4.1 Pesan Seks (*Sexting*)

Perilaku pengasingan relatif baru bagi dunia cyber. Pengantar sexting baru-baru ini membuat sulit untuk memahami definisi lengkap dari perilaku ini. Sebagai contoh, beberapa mengindikasikan bahwa sexting adalah transmisi gambar termasuk foto telanjang atau setengah telanjang. Lainnya mengindikasikan bahwa sexting adalah transmisi pesan teks yang menyertakan foto telanjang atau semi telanjang. Walaupun kedua definisi ini tampak sangat mirip satu sama lain, perbedaannya sangat besar. Untuk memahami perbedaan-perbedaan ini, kita harus mempertimbangkan medium dan istilah telanjang. Definisi pertama tentang sexting—transmisi gambar termasuk foto telanjang dan seminude—menyiratkan transmisi

gambar menggunakan beberapa perangkat selain ponsel. Beberapa perangkat ini mungkin termasuk komputer—ini termasuk perangkat tablet. Mentransmisikan tipe-tipe gambar ini menggunakan perangkat-perangkat ini melibatkan penggunaan Internet. Penggunaan Internet memiliki implikasi besar yang akan dibahas nanti. Definisi kedua sexting menekankan pada penggunaan ponsel dan transmisi yang terjadi melalui pesan teks. Penularan memiliki implikasi penting. Internet dan pesan teks menggunakan mekanisme berbeda untuk mengirimkan data apa pun. Misalnya, Internet menggunakan *World Wide Web* untuk memindahkan data antara komputer dan perangkat lain. Pesan teks tidak memerlukan Internet untuk mengirimkan data. Data dalam pesan teks bergerak seperti data suara, melalui saluran telepon.

Lebih lanjut mempersulit masalah sexting adalah gagasan istilah telanjang, karena sebagian besar definisi sexting termasuk "hampir telanjang" atau "semi telanjang". Istilah-istilah ini memerlukan interpretasi subyektif oleh peneliti, responden, dan lembaga pemerintah, dan subjektivitas ini membuat perbandingan antara beberapa studi dan subjek penelitian menjadi sulit. Kesulitan menghasilkan ketidakmampuan untuk memberikan perkiraan akurat dari tingkat sexting. Dengan kata lain, definisi sexting tidak menyediakan metode untuk memahami prevalensi perilaku.

Sementara definisi tersebut menghalangi pemahaman yang akurat tentang sexting, beberapa perkiraan sexting tersedia. Pusat Penelitian Pew menunjukkan bahwa hampir 4% remaja di AS telah mengirim pesan seks (*Lenhart, 2009*). Peneliti lain telah menunjukkan hasil yang serupa dalam studi sexting mereka (*Reyns, Henson, & Fisher, 2014*). Namun, beberapa telah memperkirakan prevalensi perilaku seks dari 7 hingga 27% (*Dake, Price, Maziarz, & Ward, 2012; Ricketts, Maloney, Marcum, & Higgins, 2014*). Perkiraan ini tidak konklusif, tetapi mereka mengindikasikan bahwa perilaku tersebut memang terjadi.

Kegunaan definisi yang berbeda telah menyebabkan sejumlah masalah dalam literatur penelitian, tetapi sebagian besar literatur tampaknya menunjukkan hasil yang beragam, terutama di bidang demografi. Pertama, peneliti cenderung menunjukkan hubungan antara perilaku seks dan usia (*Mitchell, Finkelhor, Jones, & Wolak, 2012; Strassberg, McKinnon, Sustaita, Rullo, 2013*). Secara khusus, para peneliti menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku sexting dan bertambahnya usia (*Rickettset al., 2014*). Dalam konteks gender, penelitian tentang sexting beragam. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensi sexting adalah sama antara jenis kelamin (*Dakeet al., 2012*), tetapi penelitian lain menunjukkan tingkat prevalensi yang lebih tinggi untuk laki-laki, dan yang lain lagi, menunjukkan tingkat prevalensi yang lebih tinggi untuk perempuan (*Jonsson, Priebe, Bladh, & Svedin, 2014*). Ini menunjukkan kurangnya kejelasan di antara peneliti dalam prevalensi perilaku seks.

Sexting tampaknya bervariasi di antara ras dan etnis minoritas. Ketika mempelajari remaja (mis. Usia 12 hingga 17 tahun), peneliti menunjukkan bahwa perilaku seks cenderung lebih tinggi di antara orang Afrika-Amerika dan Hispanik (*Dakeet al., 2012*). Untuk mahasiswa, peneliti mengungkapkan bahwa kulit putih lebih sering terjadi (*Reynset al., 2014*). Ini menunjukkan bahwa literatur penelitian tidak konklusif pada perilaku seks di antara kelompok ras dan etnis.

Meskipun penting untuk mengetahui siapa yang melakukan hubungan seks, penting juga untuk memahami mengapa individu terlibat dalam aktivitas tersebut. Misalnya, beberapa orang akan menganggap seks sebagai bentuk godaan atau untuk mendapatkan perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa ini umumnya terjadi di kalangan remaja (*Baumgartner, Sumter, Peter, Valkenburg, & Livingstone, 2014*). Mereka yang terlibat dalam jenis kegiatan ini cenderung merasa seolah-olah mereka seksi, atau bercinta dapat memberikan sensasi, atau bercinta dapat memberikan rasa bermain

(*Strassburger et al., 2013*). Dalam setiap kasus, perilaku seks memberikan manfaat psikologis yang mendorong perilaku tersebut.

Sexting mungkin tidak hanya memberikan manfaat psikologis yang mendorong perilaku, tetapi juga dapat memberikan manfaat fisik, seperti ketika bercinta dapat mengakibatkan hubungan seksual atau romantis (*Lenhart, 2009*). Misalnya, beberapa mungkin menggunakan sexting untuk memulai suatu hubungan, dan yang lain mungkin menggunakan sexting untuk memperkaya hubungan seksual atau romantis. Para peneliti telah menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari wacana normal dalam hubungan (*Renfrow & Rollo, 2014*). Beberapa orang telah menunjukkan bahwa orang yang melakukan seks dengan berbagai alasan yang dapat memperkaya hubungan mereka (mis., Pasangan menginginkan foto, untuk menutup kesenjangan jarak geografis antara pasangan, atau sebagai hadiah seks; *Reynset et al., 2014*).

Meskipun ini mungkin memiliki manfaat positif, perilaku seks biasanya penuh dengan sejumlah masalah. Beberapa mungkin berhubungan seks untuk memperkaya hubungan mereka, tetapi seringkali individu melaporkan bahwa mereka melakukan hubungan seks ketika mereka tidak ingin berhubungan seks. Ketika orang-orang ini tidak ingin berhubungan seks, mereka merasakan sejumlah besar tekanan dari pasangan atau teman-teman mereka untuk memproduksi sendiri atau menghasilkan setidaknya satu gambar. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa menunjukkan mereka diberi ultimatum: menghasilkan gambar atau kehilangan hubungan (*Walgrave, Heirman, & Hallman, 2013*). Jenis viktimisasi ini dikenal sebagai pelecehan emosional.

Individu yang merasa tertekan untuk menghasilkan gambar ditempatkan dalam situasi "tidak menang". Mereka baik menghasilkan gambar yang tidak ingin mereka hasilkan atau mereka kehilangan hubungan mereka. Hilangnya hubungan untuk beberapa orang lebih penting daripada biaya martabat mereka. Lebih buruk lagi, penelitian telah menunjukkan

dalam situasi ini bahwa banyak gambar yang diberikan kepada pasangan tidak bersifat pribadi (*Ringrose, Harvey, Gille, & Livingstone, 2013*). Gambar-gambar ini sering ditandai, dikirim, dan dibagikan dengan orang lain sebagai ungkapan aktivitas seksual. Ini lebih lanjut mengorbankan peserta yang tidak mau: tidak hanya individu tidak ingin berpartisipasi, tetapi mereka sekarang dipermalukan di depan orang lain untuk siapa gambar itu tidak dimaksudkan.

Ada komplikasi dengan penandaan, pengiriman, dan berbagi gambar yang menciptakan konsekuensi jangka panjang (*Ringrose et al., 2013*). Salah satu komplikasi adalah keabadian gambar. Gambar yang dibagikan satu kali antara mitra dapat berlanjut untuk dibagikan ratusan dan terkadang ribuan kali. Dengan kata lain, adalah mungkin bagi sebuah gambar untuk menjalani kehidupannya sendiri dan hidup di dunia cyber dalam kekejaman. *Lenhart (2009)* melaporkan sejumlah kekhawatiran untuk perilaku sexting. Beberapa masalah ini termasuk berbagi gambar di luar hubungan konsensual. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai cara. Misalnya, beberapa orang mungkin membagikan gambar untuk kesenangan atau penerimaan. Gambar juga dapat dibagikan jika perangkat seluler atau komputer diretas dan gambar diambil.

Sejumlah besar tekanan psikologis dan bahaya berasal dari jenis perilaku ini. Salah satu cara ini terjadi adalah bahwa gambar diambil secara konsensus; namun, distribusi gambar terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang yang digambarkan. Seringkali distribusi terjadi setelah putusnya hubungan. Ini adalah distribusi gambar-gambar seksual non-konsensual. Dalam literatur penelitian, ini telah disebut sebagai "porno balas dendam" (*Bates, 2017*). Revenge porn berbahaya karena distribusinya terjadi dalam berbagai format (mis., Ponsel dan media sosial) (*Bates, 2017; Lippman & Campbell, 2014*). Bagi sebagian orang, balas dendam mungkin tidak pernah berakhir karena gambar mungkin muncul kembali

di kemudian hari, merusak peluang (mis., Pencarian kerja atau hubungan romantis) (Wolak & Finkelhor, 2011).

Balas dendam porno (*revenge porn*) bukan satu-satunya bentuk viktimisasi yang terkait dengan sexting. *Cyberbullying*, yang akan dibahas pada bab selanjutnya, adalah salah satu mekanisme yang mungkin terjadi. Bentuk lain dari viktimisasi adalah *sextortion*. *Sextortion* adalah tempat individu dilecehkan secara *online* atau *offline* sebagai akibat dari perilaku seksnya. Misalnya objek dari *sextortion* dapat mengalami ancaman atau pemerasan karena perilaku *sexting* mereka. Jenis kegiatan ini telah menyebabkan sejumlah masalah psikologis yang meliputi kecemasan, kesedihan, atau depresi (Livingstone & Smith, 2014). Secara keseluruhan, sexting adalah perilaku kompleks yang dapat menciptakan sejumlah masalah viktimisasi. Sifat viktimisasi mungkin sangat bervariasi, dan hasil viktimisasi mungkin masih lebih luas.

4.2 Korban Kejahatan pada Penguntitan di Dunia Maya (*Cyberstalking*)

Perilaku sexting bukan satu-satunya bentuk kegiatan kriminal yang dapat mengakibatkan viktimisasi menggunakan perangkat elektronik. Perilaku menguntit dapat terjadi secara *offline* maupun *online*. Versi online dikenal sebagai *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah kegiatan kriminal lain yang mengakibatkan viktimisasi. *Cyberstalking* adalah perilaku yang mendapatkan minat akademis. Sama seperti *sexting*, *cyberstalking* terjadi menggunakan komputer, tablet, atau perangkat seluler lainnya. Yang diperlukan agar *cyberstalking* dapat terjadi adalah akses ke informasi kontak pribadi orang lain (mis., Akun email atau nomor telepon). Informasi ini memungkinkan pelaku untuk secara konsisten mengkomunikasikan pesan ancaman kepada orang lain dari waktu ke waktu (Durkin & Patterson, 2011). Meskipun ini adalah inti dari *cyberstalking*, tidak ada definisi *universal cyberstalking*.

Saat ini ada beberapa keprihatinan dalam literatur tentang definisi cyberstalking yang tidak jelas. Kurangnya kejelasan menciptakan masalah karena tidak memiliki definisi yang disepakati memberikan ruang untuk perdebatan apakah cyberstalking berbeda dari penguntitan *offline* (mis., Penguntitan fisik). Dua bentuk menguntit berbagi sejumlah karakteristik. Salah satu karakteristik tersebut adalah pengulangan tindakan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, seorang individu dapat menyerang privasi orang lain berulang kali sepanjang waktu dalam "kehidupan nyata" dengan mengikuti mereka, atau secara virtual melalui email yang tidak diinginkan. Karakteristik lain yang dibagikan adalah bahwa pengulangan tindakan menciptakan persepsi ancaman. Karakteristik terakhir yang dibagikan adalah bahwa kedua bentuk pengintaian tidak menuntut korban dan pelaku untuk saling mengenal. Persepsi ancaman menciptakan rasa kerentanan. Kerentanan membuat mereka yang telah menjadi korban trauma psikologis dan berpotensi takut secara fisik untuk keselamatan mereka.

Cyberstalking memang memiliki beberapa karakteristik yang dapat dibedakan dari penguntit fisik. Salah satu karakteristik unik *cyberstalking* adalah bahwa perilaku tidak dibatasi oleh geografi. Ini berarti bahwa korban dan pelaku dapat dipisahkan oleh ribuan mil atau beberapa negara. Sifat Internet berarti korban dan pelaku tidak perlu berada dalam jarak dekat. Karakteristik unik lain dari *cyberstalking* adalah motivasi ganda. Para peneliti telah mengindikasikan bahwa motivasi *cyberstalkers* berbeda dari motivasi penguntit *offline*. Sebagai contoh, *cyberstalkers* dimotivasi oleh lebih dari kekuasaan dan kontrol atas korban (Navarro, Marcum, Higgins, & Ricketts, 2016).

Literatur penelitian menunjukkan bahwa tingkat cyberstalking meningkat. Survei Korban Kejahatan Nasional (NCVS) menunjukkan bahwa 21,5% dari orang-orang yang melaporkan bahwa mereka diuntit juga melaporkan bahwa mereka *cyberstalked* (Reyns, Henson, & Fisher, 2012).

Orang-orang yang melaporkan *cyberstalked* menunjukkan sejumlah metode yang digunakan. Ada dua level utama: lebih rendah dan lebih tinggi. Metode tingkat yang lebih rendah termasuk blog, email, pesan instan, dan pesan teks. Metode tingkat yang lebih tinggi termasuk spyware, perangkat mendengarkan, dan kamera digital.

Sementara angka-angka nasional ini memberikan beberapa wawasan tentang *cyberstalking*, tidak ada tingkat nasional lain pada populasi lain. Sebagian besar penelitian tentang *cyberstalking* telah dilakukan menggunakan mahasiswa, sebagian karena mereka adalah kelompok usia yang mengerti teknologi. Banyak mahasiswa yang tumbuh dewasa di era Internet, dan mereka telah menggunakan Internet secara luas untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, mahasiswa secara rutin mengambil tindakan yang menempatkan mereka pada risiko *cyberstalking*. Peneliti melaporkan bahwa mahasiswa memberikan informasi yang dapat digunakan untuk *cyberstalking* melalui media sosial dan cara lain (Reynset *et al.*, 2012). Peneliti menunjukkan bahwa 1% hingga 40% mahasiswa pernah mengalami *cyberstalking* (Reynset *et al.*, 2012), tetapi penting untuk dicatat bahwa studi ini tidak mencakup seluruh Amerika Serikat tetapi merupakan sampel siswa dari masing-masing universitas. Penelitian tentang *cyberstalking* menunjukkan sejumlah perbedaan demografis.

Sebagai contoh, perempuan telah terbukti lebih berisiko, dan laki-laki lebih cenderung menjadi pelaku (Bates, 2017).

4.3 Korban Kejahatan Peretasan/Penyalahgunaan Jaringan Komputer (*Hacking Victimization*)

Peretasan adalah bentuk penting dari penyalahgunaan komputer. Mendapatkan pemahaman tentang peretasan melibatkan pendefinisian istilah. Ada banyak definisi peretasan. Taylor *et al.* (2010) berpendapat bahwa peretasan adalah memperoleh akses tidak sah ke dan menggunakan

sistem komputer untuk tujuan kriminal. Masalah utama dengan definisi ini adalah gagasan bahwa kejahatan terlibat. Banyak peretas tidak menganggap diri mereka penjahat karena tingkat keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas peretasan (Holt, 2007; Jordan & Taylor, 1998; Loper, 2000). Selain itu, banyak peretas juga melihat perilaku mereka sebagai penjelajahan karena mereka sering membaca sistem operasi yang berbeda untuk belajar; dengan demikian, peretasan dipandang sebagai sebuah pencapaian daripada sebuah label (Wadeet al., 2008).

Peretasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: membobol sistem komputer, mengembangkan atau menggunakan virus (mis., *Malware*), menghancurkan atau mengubah file, pencurian layanan, penipuan kartu kredit, dan perangkat lunak infiltrasi (Rogers et al., 2005, seperti dikutip dalam Wadeet al., 2008). Rogers et al. (2005) mengemukakan argumen bahwa tidak semua perilaku peretasan adalah kriminal, menunjukkan bahwa definisi yang mencakup kejahatan seharusnya digunakan untuk individu yang berbeda yang dikenal sebagai *cracker*. Dengan ini, seorang *hacker* adalah seseorang yang semata-mata berusaha mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau file komputer (Meyer, 1989; Holt, 2007).

Karena kurangnya ilmu sosial atau definisi hukum peretasan, beberapa telah mendefinisikan peretasan berdasarkan metode yang digunakan peretas untuk mengakses sistem komputer. Sebagai contoh, sejumlah metode sering digunakan untuk meretas ke dalam sistem komputer yang berkisar dari teknologi rendah ke teknologi tinggi. Teknik teknologi rendah termasuk "serangan *brute-force*," "selancar bahu," atau "rekayasa sosial." Serangan *Bruteforce* melibatkan akses sistem murni dengan mencoba menebak kata sandi, sementara berselancar bahu dilakukan dengan menonton korban peretasan menggunakan nomor identifikasi pribadi (PIN) (Marcum, Higgins, Ricketts, & Wolfe, 2014). Teknologi rendah lainnya yakni metode menggunakan rekayasa sosial, dan melibatkan pelaku yang

menyamar sebagai profesional dan meminta informasi tentang sistem komputer korban (McDowell, 2009; Taylor et al., 2010). Metode teknologi yang lebih tinggi termasuk teknik *key-logging* (Holt, 2007).

Memahami profil seorang peretas itu sulit karena kerahasiaan yang terjadi dalam subkultur peretasan. Ini telah membatasi basis pengetahuan peretas, dan sampai batas tertentu telah membatasi basis pengetahuan peretasan viktimisasi. Untuk memberikan beberapa perspektif tentang peretas, **Skinner** dan **Fream** (1997) menggunakan sampel mahasiswa Amerika dari departemen akademik tertentu yang terkait dengan tingkat keterampilan komputer yang lebih tinggi (yaitu, teknik, bisnis, dan sains). Studi mereka mencakup sejumlah perilaku kejahatan komputer yang meliputi peretasan. **Skinner** dan **Fream** (1997) menunjukkan bahwa laki-laki lebih mungkin berpartisipasi daripada perempuan perilaku peretasan. Secara rasial, mereka menemukan orang kulit putih dan orang Asia lebih mungkin melakukan aktivitas peretasan daripada ras atau etnis lain. Yang lain juga memeriksa perilaku peretasan. Mayoritas penelitian ini adalah kuantitatif dan termasuk mahasiswa dan sampel remaja (Bossler & Burruss, 2011; Holt et al., 2010; Holt & Kilger, 2008; Morris, 2011; Rogers et al., 2005; Skinner and Fream, 1997). Masih peneliti lain telah mengambil pendekatan kualitatif untuk memahami sikap terhadap peretasan dan norma-norma dan nilai-nilai subkultur ini berdasarkan sampel kecil peretas aktif atau dipenjara (Holt, 2007; Meyer, 1989; Thomas, 2002; Turgeman-Goldschmidt, 2008).

Sementara sebagian besar literatur penelitian telah difokuskan pada mahasiswa dan sampel remaja, kelangkaan penelitian ada di tingkat nasional atau internasional. *National Institute of Justice* mensponsori sebuah studi penelitian terhadap para petugas penegak hukum. Studi ini diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang pengalaman mereka dengan kejahatan komputer yang termasuk peretas (Stambaugh et al., 2001). Stambaugh et al.

(2001) melaporkan bahwa pelaku peretasan sangat berpengetahuan tentang semua aspek kejahatan komputer, dan mereka berbeda dari penjahat properti dan penjahat kejam dalam memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari rata-rata. Secara keseluruhan, profil pelaku peretasan lebih dekat dengan penjahat kerah putih, tetapi mayoritas pelanggar dalam studi NIJ adalah mahasiswa laki-laki berusia antara 15 dan 25 tahun. Memahami peretas penting untuk mendapatkan perspektif tentang korban peretasan. Peretasan viktimisasi memang terjadi. *Van Wilsem (2013)* meneliti data dari lebih dari 5.000 orang dari Belanda. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 3,1% dari individu dalam sampel telah menjadi korban peretasan. Lebih lanjut, *van Wilsem (2013)* melaporkan bahwa peretasan viktimisasi tumpang tindih dengan bentuk-bentuk lain dari *cybervictimization*. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang melaporkan menjadi korban peretasan.

Beberapa penilaian peneliti berasal dari perspektif perlindungan privasi digital. Perspektif perlindungan privasi digital adalah tempat seseorang menggunakan berbagai teknik (mis., Meminimalkan informasi yang disimpan secara elektronik atau menggunakan berbagai bentuk perangkat lunak antivirus dan spyware untuk perlindungan). Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa sejumlah besar kecemasan berasal dari menjadi korban peretasan dan mengantisipasi peristiwa peretasan di masa depan. *Chai, Bagchi-Sen, Morrell, Rao, dan Upadhyaya (2009)* memeriksa 285 remaja untuk memahami kecemasan mereka tentang menjadi korban peretasan. *Chai et al. (2009)* menemukan kecemasan terkait dengan kemungkinan peretasan di masa depan. *Elbai and Hall (2016)* menemukan kecemasan yang tinggi tentang peretasan data di masa depan.

Peretasan data terjadi tidak hanya di tingkat individu tetapi juga di tingkat makro (mis., Organisasi atau lingkungan). Organisasi adalah target khusus karena sejumlah besar data yang mereka simpan, dan potensi kompleksitas sistem komputer mereka dapat menghadirkan tantangan

bagi seorang peretas. Secara anekdot, banyak organisasi telah mengalami peretasan. Beberapa telah kehilangan miliaran dolar karena peretasan, dan yang lain telah kehilangan sejumlah besar data dalam situasi ini (*Marcum et al., 2014*).

4.4 Korban Kejahatan Pencurian Identitas (*Identity Theft*)

Sejak 1950-an, para kriminolog telah tertarik pada penggelapan dan memeriksa pemalsuan (*Cressey, 1953; Lemert, 1958*). Ketertarikan ini memulai studi dan pengembangan pengetahuan dalam kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih cenderung melibatkan beberapa bentuk penipuan. Pada abad ke-21, dengan perkembangan komputer bersama dengan Internet, pencurian dengan bantuan komputer juga menjadi minat, seperti halnya para korban pencurian identitas. Pencurian identitas memiliki sejumlah definisi. Secara umum, pencurian identitas termasuk kejahatan di mana seseorang mengidentifikasi informasi (mis., SIM, kartu kredit, atau nomor Jaminan Sosial) dicuri (*Navarro & Higgins, 2017*).

Beberapa mendefinisikan pencurian identitas sebagai penggunaan identitas orang lain untuk terlibat dalam perilaku kriminal (*Navarro & Higgins, 2017*). Perlu dicatat bahwa pencurian identitas untuk terlibat dalam perilaku kriminal juga dapat didefinisikan sebagai penipuan identitas. Namun, apakah penggunaan identitas orang lain untuk melakukan perilaku kriminal adalah pencurian identitas atau penipuan, sejumlah perilaku dapat terjadi akibat pencurian identitas orang lain. Satu perilaku umum adalah pembelian barang menggunakan informasi kartu kredit orang lain.

Pencurian identitas dapat dianggap sebagai kejahatan campuran karena termasuk pelanggaran "lama" dan "baru". Aktivitas kriminal "Baru" dimungkinkan oleh kemajuan teknologi (mis., Komputer berjaringan). Selain itu, kemajuan teknologi baru ini kadang-kadang mencakup sejumlah

besar data pengidentifikasi yang disimpan dalam database publik atau pribadi. Sebagai contoh, database publik dan pribadi termasuk perbankan online, informasi kredit, dan catatan e- bisnis. Berbagai kemajuan teknologi telah secara tidak sengaja menciptakan lingkungan untuk pencurian identitas melalui peretasan atau peretasan ke dalam basis data publik dan pribadi. Kegiatan kriminal “Lama” juga dapat diklasifikasikan sebagai pencurian identitas karena kemajuan teknologi. Kemajuan ini memberikan jalan baru bagi pelaku untuk melakukan penipuan cek, kejahatan keuangan, pemalsuan, pemalsuan, pencurian mobil menggunakan dokumentasi palsu, perdagangan manusia, dan terorisme. Penting untuk dicatat bahwa bentuk-bentuk perilaku ini ada sebagai kejahatan sebelum konsep pencurian identitas dikembangkan dan ditetapkan secara hukum (*Cole & Pontell, 2006*). Kegiatan-kegiatan ini berdampak pada tidak hanya organisasi tetapi juga pada individu.

Tidak ada yang akan menyangkal bahwa pencurian identitas sedang meningkat. Komisi Perdagangan Federal (FTC) menunjukkan bahwa pencurian identitas telah memengaruhi lebih dari 30 juta orang. *Pontell dan Brown (2011)* melaporkan bahwa FTC melakukan survei yang menunjukkan bahwa 7,88% responden melaporkan menjadi korban pencurian identitas. Survei FTC juga menunjukkan minoritas tertentu tampaknya secara konsisten menjadi korban pencurian identitas. Misalnya, orang-orang Hispanik dan Afrika-Amerika dibandingkan dengan orang Asia dan Kaukasia lebih mungkin menjadi korban dari jenis penipuan yang serius. Selain perbedaan minoritas ras dalam viktimisasi pencurian identitas, perbedaan usia juga ada. Secara khusus, individu paruh baya lebih cenderung menjadi korban daripada kelompok umur lainnya. Menurut *FTC (2005)*, korban pencurian identitas kehilangan sejumlah besar uang. Jumlah uang yang besar ini termasuk lebih dari \$ 40 miliar dalam kerugian, dan individu kehilangan total lebih dari \$5 miliar dolar (*FTC, 2005*).

Banyak pelaku dan korban memiliki kesamaan. Survei *FTC (2005)* menunjukkan pelaku paling umum adalah anggota keluarga. Lebih lanjut, lebih dari separuh korban memiliki pengetahuan sebelumnya tentang korban mereka. Sebagian besar waktu, anak-anak menjadi korban, dan, yang mengejutkan, anak-anak tidak tahu bahwa identitas mereka telah dicuri dan digunakan sampai mereka berusaha untuk menetapkan kredit mereka sendiri sebagai orang dewasa muda. Survei *FTC (2005)* menunjukkan sebagian besar korban memberikan informasi penting tentang identitas mereka yang dicuri. Banyak yang melaporkan dompet atau dompet mereka telah dicuri atau perubahan drastis telah ditemukan pada laporan untuk akun keuangan (mis., rekening giro atau kartu kredit). Sayangnya, informasi identitas telah ditemukan digunakan selama lebih dari enam bulan sebelum ditemukannya pencurian identitas/penipuan identitas.

Survei Korban Kejahatan Nasional juga mencakup informasi tingkat nasional mengenai pencurian identitas. Sebagai contoh, lebih dari 3% responden survei menunjukkan bahwa rumah tangga di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu anggota yang telah menjadi korban pencurian identitas dalam enam bulan sebelumnya (*Baum, 2006*). Hasil ini menunjukkan secara konsisten bahwa pencurian identitas terjadi di tingkat individu. *Anderson (2006)* menganalisis data survei *FTC (2003)* untuk menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, dan pendapatan adalah prediktor pencurian identitas pada tingkat individu, tetapi pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa wanita dewasa muda dan yang lebih kaya cenderung menjadi korban.

Federal Trade Commission (FTC) (2015) melaporkan bahwa keluhan nomor satu adalah pencurian identitas. Lebih lanjut, *Harrell dan Langton (2013)* menunjukkan bahwa 17,6 juta orang telah menjadi korban pencurian identitas, dan mereka memiliki total perkiraan kerugian lebih

dari \$ 15 miliar. *Harrell (2015)* menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan lebih dari \$ 75.000 cenderung memiliki korban pencurian identitas. **Higgins, Hughes, Ricketts, dan Wolfe (2008)** meneliti korelasi tingkat negara bagian dari pencurian identitas. Studi mereka memanfaatkan laporan FTC dan data sensus. Hasilnya menunjukkan bahwa keluhan pencurian identitas lebih tinggi di negara-negara dengan populasi laki-laki yang lebih rendah, tetapi populasi yang lebih tinggi dari Afrika-Amerika, mobilitas perumahan yang lebih besar, lebih banyak penduduk yang menerima bantuan publik, dan banyak tempat rekreasi dan hiburan. Pencurian identitas tidak berakhir dengan ditemukannya tindakan tersebut. Korban pencurian identitas menghabiskan ratusan jam untuk mendapatkan kembali identitas mereka. Banyak korban akan menghabiskan hampir 200 jam bekerja dengan berbagai lembaga keuangan. Jumlah waktu ini dapat menyebabkan korban kehilangan waktu di tempat kerja dan bersama keluarga, menciptakan rasa viktimisasi dan trauma psikologis tambahan.

Sejauh ini, pencurian identitas telah disajikan sebagai tindakan yang hanya terjadi di Amerika Serikat. Karena komponen teknologi potensial pencurian identitas, perilaku dapat terjadi secara internasional. Para peneliti telah menunjukkan bahwa pencurian identitas di Inggris menyumbang lebih dari sepersepuluh dari semua penipuan, dan itu juga terjadi di Australia di mana lebih dari 3% dari mereka yang berusia di atas 15 tahun adalah korban pencurian identitas (*Roberts, Indermaur, & Spiranovic, 2013*). Yang penting, pencurian identitas tidak terbatas pada satu negara. Misalnya, pencurian identitas dapat dimulai di satu negara dan memengaruhi organisasi atau individu di negara lain.

4.5 Risiko Kredibilitas pada Kejahatan Perangkat Lunak Berbahaya (*Malware Victimization*)

Seiring perkembangan dan penggunaan teknologi meningkat, demikian juga risiko menggunakan informasi digital dan jaringan komputer. Penyebab utama yang menciptakan risiko ini adalah perangkat lunak berbahaya, yang lebih dikenal sebagai *malware* (Symantec Corporation, 2012; Wall, 2007). Penjahat menggunakan program-program ini untuk membantu mereka dalam kejahatan mereka. *Malware* adalah "tenaga kerja" digital yang mengotomatiskan berbagai fungsi, di antaranya serangan cyber seperti pencurian data atau pemasangan *spyware* (Chu, Holt, & Abn, 2010).

Contoh malware sangat banyak. *Keylogging* adalah salah satu contohnya. *Keylogging* memungkinkan penjahat melacak penekanan tombol di komputer. Program-program ini dapat menangkap informasi sensitif (mis., Nama pengguna dan kata sandi) tanpa sepengetahuan pemilik atau operator (Holt & Turner, 2012). Bentuk lain dari malware adalah *virus* dan *worm*. *Virus* dan *worm* memiliki kemampuan untuk mengganggu dan juga jahat (mis., Menghapus dan merusak file, perangkat keras, dan perangkat lunak) (Chuet al., 2010). Contoh *malware* lainnya disebut botnet. *Malware botnet* memungkinkan penjahat untuk mengontrol komputer orang lain dari jarak jauh. Saat mengendalikan komputer orang lain, penjahat dapat melakukan sejumlah kejahatan (Cooke, Jabanian, & McPherson, 2005).

Di banyak negara, penggunaan malware adalah ilegal. Ini berarti bahwa menyerang, berkompromi, dan mencuri informasi adalah ilegal, bahkan menggunakan perangkat lunak. Kegiatan ini tidak datang tanpa harga. *Survei Pew Internet* dan *American Life* (2005) menunjukkan bahwa jenis malware ini menimbulkan biaya tinggi untuk dihapus. Penghapusan ini memiliki biaya berwujud dan tidak berwujud yang tinggi bagi individu dan perusahaan. Misalnya, individu dan perusahaan akan kehilangan banyak waktu dan potensi kredibilitas karena infeksi malware. Contoh lain adalah bahwa infeksi *malware* yang cukup serius akan memaksa individu atau perusahaan untuk membeli atau membangun kembali seluruh sistem.

Survei Computer Security Institute (2009) memperkirakan bahwa biaya *malware* berkisar antara \$ 40.000 hingga \$ 400.000.

Individu dan perusahaan juga menanggung sejumlah besar biaya untuk mencegah infeksi *malware*. Perangkat lunak antivirus dan *spyware* adalah dua jenis perangkat lunak pencegahan *malware*, yang memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko infeksi. Masalah dengan perangkat lunak jenis ini adalah mereka hanya mengurangi risiko; mereka tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menghilangkan risiko viktimisasi. *PandaLabs (2007)* menunjukkan bahwa 25% komputer pribadi memiliki beberapa bentuk *malware*, dan lebih dari sepertiga komputer pribadi tidak memiliki bentuk perangkat lunak pencegahan *malware*. **Bossler** dan **Holt (2009)** melaporkan bahwa ini terjadi karena korban tidak tahu kapan sistem mereka telah dikompromikan. Dengan kata lain, sistem mungkin terinfeksi dan tindakan jahat terjadi tanpa sepengetahuan korban. Infeksi *malware* yang berhasil menuntut tindakan untuk disembunyikan dan mengatasi perangkat lunak pencegahan *malware* (*Symantec Corporation, 2012*). Infeksi *malware* cenderung menunjukkan diri mereka dalam bentuk kesalahan sistem (*Pew Internet dan American Life, 2005*). Sayangnya, korban biasanya tidak mengenali kesalahan sistem sebagai infeksi *malware*; sebaliknya, mereka melihatnya sebagai masalah komputer umum. Hal ini membuat mereka sangat rentan dan cenderung menimbulkan masalah tambahan.

Kelangkaan penelitian empiris ada di bidang ini. **Holt** dan **Bossler (2013)** menunjukkan bahwa mahasiswa, dosen, dan staf secara rutin melakukan banyak hal yang membuat mereka berisiko menjadi korban *malware*. **Ngo** dan **Paternoster (2011)** menggunakan data dari mahasiswa untuk menunjukkan bahwa defisit dalam tingkat kontrol diri individu membuat mereka rentan terhadap viktimisasi *malware*. **Bossler** dan **Holt (2009)** menggunakan data dari mahasiswa untuk menunjukkan bahwa karakteristik individu terkait dengan viktimisasi *malware*. Selain studi **Ngo**

dan *Paternoster* (2011), sisanya menunjukkan bahwa kegiatan sehari-hari di Internet menciptakan lingkungan di mana *viktимisasi malware* dimungkinkan.

4.6 Eksploitasi Seksual pada Korban Pornografi Anak (*Child Pornography Victimization*)

Pornografi anak (CP) adalah bentuk penting dari perilaku kriminal, dan itu melibatkan pemangsaaan, eksploitasi, dan viktimisasi anak muda. CP melibatkan berbagai bentuk voyeurisme dan esibisionisme. Ketika bentuk-bentuk voyeurisme dan esibisionisme muncul menggunakan Internet, mereka dikenal sebagai *cybervoyeurism* dan *cyberexhibitionism*. *Cybervoyeurism* melibatkan penggunaan webcam anak untuk melihatnya saat mereka membuka pakaian atau ketika mereka terlibat dalam aktivitas seksual (*Bourke & Hernandez, 2009*). *Cyberexhibitionism* merujuk pada seorang anak yang memperlihatkan alat kelamin mereka melalui Internet (*Bourke & Hernandez, 2009*).

Teknologi telah membantu dalam pengembangan, distribusi, dan kepemilikan CP. Teknologi juga membantu pelaku melakukan perilaku ini dan menghindari deteksi oleh penegak hukum. Secara khusus, perangkat lunak telah dikembangkan yang memungkinkan pelaku untuk menghapus sidik jari elektronik, mengakses jaringan yang berbeda untuk mendapatkan, mendistribusikan, dan memiliki CP, dan menemukan area khusus untuk menyimpan CP.

Beberapa perangkat lunak telah digunakan untuk membantu pelanggar bekerja di sekitar *hard drive* untuk menyembunyikan aktivitas mereka. CP telah meningkat selama beberapa tahun. Karena sulitnya perilaku, sedikit statistik nasional atau internasional yang tersedia tentang pelanggar atau korban CP. Namun, beberapa data memang ada di beberapa area. Misalnya, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) telah mengembangkan unit khusus—Inisiatif Gambar Innosensius—untuk menangani kasus-kasus

seperti ini. Antara 1996 dan 2005, ada peningkatan substansial dalam kasus-kasus ini—lebih dari 2.000%. Ini karena peningkatan kehadiran penegakan hukum di Internet. Misalnya, gugus tugas multijurisdiksi—*Internet Crimes Against Children (ICAC)*—telah memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi para petugas dan anggota peradilan. Dengan jenis-jenis lembaga penegak hukum ini, sejumlah undang-undang telah diberlakukan untuk membantu penuntutan para pelanggar hukum. Meskipun upaya ini penting, mereka tidak cukup untuk sepenuhnya menghentikan CP. Beberapa melaporkan bahwa CP adalah industri multi-miliar dolar (**Bourke & Hernandez, 2009**). Industri multi-miliar dolar telah didorong oleh Internet. Meskipun ini menunjukkan bahwa ada masalah besar, sedikit yang diketahui tentang korban CP.

4.7 Rangkuman

Sebelum Internet, prospek dikejar melalui dunia maya dan dibombardir dengan pesan yang tidak diinginkan tidak ada. Ketika potensi pelecehan pertama kali diketahui—bahwa penyerang obsesif dan predator seksual memiliki cara baru untuk menemukan dan mengejar target mereka—tidak ada ungkapan yang memadai untuk menggambarkan situasi yang mengganggu ini. Pada awalnya, masalah itu disebut sebagai "Penyalahgunaan *online*," "pelecehan *online*," atau bahkan "pelecehan *cyber*." Mereka yang menjadi khawatir tentang komunikasi yang tidak pantas dan mengkhawatirkan yang mereka terima melalui pesan instan, di akun email mereka, di ruang obrolan, dan di situs web jejaring sosial yang diakses secara luas menghadapi masalah khusus. Pihak berwenang yang mereka minta bantuan pada saat-saat putus asa hanya menyarankan mereka untuk mematikan komputer mereka. Seringkali mereka diberitahu bahwa saran jahat dan ancaman tidak menyenangkan menunggu mereka ketika mereka masuk, atau yang diposting tentang mereka di halaman web orang lain, tidak naik ke tingkat aktivitas kriminal.

Para pengadu yang menderita pertama kali mendapatkan alasan dari pejabat penegak hukum karena tidak jelas lembaga mana, jika ada, yang memiliki yurisdiksi—polisi setempat, polisi negara bagian, jaksa penuntut lokal, kantor jaksa agung negara bagian, atau cabang pemerintah federal. Secara geografis, pertanyaan yurisdiksi adalah apakah kejahatan terjadi di dalam area pengirim atau di dalam area penerima. Penyedia layanan internet umumnya tidak kooperatif dengan penyelidik karena kekhawatiran tentang menghormati privasi pelanggan mereka.

Pada pergantian abad, istilah *cyberstalking* diciptakan untuk menggambarkan perilaku yang berpotensi berbahaya ini. Dalam beberapa tahun, sebagian besar negara bagian menambahkan ketentuan pada statuta penguntit dan pelecehan mereka untuk melarang penyalahgunaan komputer dan komunikasi elektronik untuk menyampaikan ancaman. Sistem peradilan pidana menjadi lebih responsif ketika departemen kepolisian membentuk unit untuk menginvestigasi kejahatan komputer (seperti yang dilakukan NYPD pada 1995), dan jaksa *county* membentuk biro penjakakan yang mengintai dan mengancam (seperti di Los Angeles) atau menggunakan staf kejahatan seksual yang ada divisi.

Namun, banyak lembaga penegak hukum tidak memiliki petugas dan jaksa yang cukup terlatih dan cukup teknologi canggih untuk berhasil mengejar kasus-kasus semacam ini. Lebih lanjut, ancaman itu mungkin tidak ditanggapi dengan serius jika pihak berwenang menilai kemungkinan konfrontasi fisik yang sebenarnya terjadi di tempat terpencil, terutama jika pelaku pelecehan tinggal jauh di wilayah lain atau di negara lain. Kelompok swadaya dan dukungan telah bermunculan di Internet untuk membantu dan memberi nasihat kepada mereka yang merasa tertekan, frustrasi, dan tidak berdaya untuk menghentikan komunikasi yang tidak diinginkan.

Survei online sukarela yang diisi di situs web ini menunjukkan bahwa mayoritas korban *cyberstalking* adalah perempuan, terutama remaja

perempuan dan perempuan muda, dan sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Banyak pelanggar tampaknya benar-benar orang asing, yang bisa sangat menakutkan karena penampilan dan keberadaan mereka, serta kredibilitas ancaman mereka, tidak diketahui.

Teori telah diterapkan pada masalah yang dikejar melalui dunia maya. tampaknya menambahkan orang asing sebagai teman di situs media sosial, melecehkan orang lain secara *online*, mencoba meretas akun jejaring sosial orang lain, dan bergaul dengan "rekan sesat" secara *online* (misalnya, terlibat dalam pengiriman gambar atau kemajuan seksual eksplisit) terkait dengan peluang lebih tinggi untuk menjadi korban *cyberstalking*, menurut survei berbasis web tentang pengalaman mahasiswa.

Beberapa kriminolog pertama yang tertarik pada studi tentang para korban sangat antusias dengan konsep tanggung jawab bersama sebagai penjelasan yang memungkinkan mengapa seseorang tertentu dirugikan oleh orang tertentu sebagai pelanggar. Dengan mengajukan pertanyaan yang sebelumnya diabaikan oleh para peneliti tentang kerentanan korban, kerentanan individu, dan pertanggungjawaban pribadi atas ketidakberuntungan seseorang, mereka percaya mereka sedang mengembangkan penjelasan yang lebih lengkap tentang mengapa hukum dilanggar dan orang-orang terluka. Tetapi mereka juga menyulut kontroversi di dalam viktimologi dan juga di arena opini publik yang masih berkecamuk hingga saat ini.

Sampai viktimologi muncul, kriminologi arus utama secara konsisten mengabaikan peran yang mungkin dimainkan oleh pihak-pihak yang terluka dalam menetapkan panggung bagi perilaku tanpa hukum. Para korban telah berjanji untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dengan secara objektif memeriksa semua jenis situasi untuk menentukan apakah orang-orang yang dirugikan mungkin berperan dalam kejatuhan mereka sendiri. Dengan demikian, para korbanologis telah melampaui

penjelasan yang berorientasi pada pelaku kejahatan yang mengaitkan pelanggaran hukum semata-mata dengan pelaksanaan kehendak bebas oleh pelaku kesalahan. Para korban mengatakan bahwa insiden kriminal tertentu dipandang sebagai hasil dari proses interaksi antara dua pihak. Apa yang muncul adalah model dinamis yang memperhitungkan inisiatif dan tanggapan, tindakan dan reaksi, serta motif dan niat masing-masing peserta.

Jalur penyelidikan yang terkenal (meskipun kontroversial) dalam pusat-pusat kriminologi tentang perbedaan, jika ada, antara pelanggar hukum dan orang-orang yang taat hukum. Kriminolog bertanya, "Apa yang salah dengan mereka? Apakah ada perbedaan fisik, mental, atau budaya yang membedakan pelaku dari kita semua?" Dalam nada yang sama, para ahli korban bertanya, "Apa yang membedakan korban dari yang bukan korban? Apakah individu yang ditargetkan berpikir atau bertindak berbeda dari mereka yang tidak?" Hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini segera meningkatkan kemungkinan tanggung jawab bersama.

Para korban telah meminjam terminologi sistem hukum, secara tradisional digunakan untuk menggambarkan perilaku kriminal, untuk menggambarkan motif dan tindakan para pihak yang terluka juga. Kata-kata tanggung jawab, kesalahan, rasa bersalah, dan kesalahan muncul secara rutin dalam diskusi berdasarkan dinamika, laporan situasional dari interaksi antara dua orang. Dalam arti luas, konsep tanggung jawab bersama menyiratkan bahwa orang-orang tertentu—bukan hanya pelanggar mereka—melakukan sesuatu yang "salah." Mengadopsi kerangka kerja ini mengarah pada proposisi bahwa beberapa—tapi tentu saja tidak semua—individu yang terluka atau mengalami kerugian tidak melakukan semua yang dapat mereka lakukan untuk membatasi paparan mereka kepada orang-orang berbahaya atau situasi yang mengancam, atau untuk membatalkan konfrontasi yang meningkat.

4.8 Pertanyaan Diskusi

1. Bentuk infeksi malware apa yang paling banyak muncul di benak Anda? Bagaimana Anda melindungi terhadap bentuk infeksi malware ini?
2. Apakah Anda percaya bahwa ada cara untuk mengakhiri cybervictimization?
3. Pernahkah Anda mengalami atau melihat perilaku bercinta? Apakah itu ditangani dengan benar?
4. Jelaskan berbagai metode yang Anda gunakan untuk melindungi identitas Anda.
5. Rancang beberapa skenario di mana seseorang mungkin merasa terancam dan salah menuduh seseorang menguntit ketika tidak ada kerugian nyata yang dimaksudkan oleh penguntit yang dituduhkan.
6. Seberapa serius masalah cyberstalking, menurut Anda?
7. Mengapa orang yang taat hukum peduli dengan kekerasan narapidana?
8. Apa perbedaan antara pembunuhan atau pemboman yang dilakukan oleh kelompok kebencian terorganisir dan serangan teroris domestik?
9. Rancang beberapa skenario di mana seorang individu mungkin merasa terancam dan salah menuduh seseorang menguntit ketika tidak ada kerusakan nyata dimaksud oleh penguntit yang dituduhkan.
10. Jika departemen kepolisian dapat menyelesaikan hampir semua pembunuhan terhadap perwira, maka mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan proporsi pembunuhan "warga sipil" yang hampir sama tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K. B. (2006). *Who are the victims of identity theft? The effect of demographics*. Journal of Public Policy and Marketing, 25, 160–171.
- Bates, S. (2017). *Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors*. Feminist Criminology, 12, 22–42.
- Baum, K. (2006). Identity theft, 2004: *First estimates from the National Crime Victimization Survey*. Bureau of Justice Statistics Bulletin. Retrieved June 12, 2017, from www.ojp.gov/bjs/pub/pdf/it04.pdf
- Baumgartner, S. E., Sumter, S. R., Peter, J., Valkenburg, P. M., & Livingstone, S. (2014). *Does country context matter? Investigating the predictors of teen sexting across Europe*. Computers in Human Behavior, 33, 157–164.
- Bossler, A. M., & Burruss, G. W. (2011). *The general theory of crime and computer hacking: Low self-control hackers?* In T. J. Holt & B. H. Schell (Eds.), Corporate hacking and technology-driven crime: Social dynamics and implications (pp. 38–67). Hershey, PA: IGI Global.
- Bossler, A. M., & Holt, T. J. (2009). *On-line activities, guardianship, and malware infection: An examination of routine activities theory*. The International Journal of Cyber Criminology, 3, 400–420.
- Bourke, M. L., & Hernandez, A. E. (2009). *The “Butner Study” Redux: A report of the incidence of hands-on child victimization by child pornography offenders*. Journal of Family Violence, 24, 183–191.
- Chai, S., Bagchi-Sen, S., Morrell, C., Rao, H. R., & Upadhyaya, S. J. (2009). *Internet and online information privacy: An exploratory study of preteens and early teens*. IEEE Transactions on Professional Communication, 52(2), 167–182.
- Chu, B., Holt, T. J., & Ahn, G. J. (2010). *Examining the creation, distribution, and function of malware on-line (NIJ Grant No. 2007-IJ-CX-0018)*. Washington, DC: National Institute of Justice.

- Cole, S. A., & Pontell, H. N. (2006). *Don't be low hanging fruit: Identity theft as moral panic*. In T. Monahan (Ed.), *Surveillance and security*. London: Routledge.
- Computer Security Institute. (2009). *Computer crime and security survey*. Retrieved from <http://gocsi.com/sites/default/files/uploads/CSIsurvey2008.pdf>
- Cooke, E., Jahanian, F., & McPherson, D. (2005). *The zombie roundup: Understanding, detecting, and disrupting botnets*. In SRUTI '05 Workshop Proceedings (pp. 35–44). Berkeley, CA: USENIX Association.
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study of the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Dake, J. A., Price, J. H., Maziarz, L., & Ward, B. (2012). *Prevalence and correlates of sexting behavior in adolescents*. *American Journal of Sexuality Education*, 7, 1–15.
- Durkin, K., & Patterson, D. (2011). *Cyberbullying, cyberharassing, and cyberstalking*. In C. Bryant (Ed.), *Routledge handbook of deviant behavior* (pp. 450–455). New York: Taylor and Francis.
- Elhai, J. D., & Hall, B. J. (2016). *Anxiety about internet hacking: Results from a community sample*. *Computers in Human Behavior*, 54, 180–185.
- Federal Trade Commission (FTC). (2003, January). *Identity fraud survey, report presented at the Identity Theft Research Group*. Washington, DC: National Institute of Justice.
- Federal Trade Commission (FTC). (2005, January 27). *Identity fraud survey, report presented at the Identity Theft Research Group*. Washington, DC: National Institute of Justice.
- Federal Trade Commission. (2015). *Consumer Sentinel Network Data Book for January — December 2014*. Retrieved from www.ftc.gov/system/files/documents/reports/consumer-sentinel-network-databook-january-december-2014/sentinel-cy2014-1.pdf
- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A general theory of crime*. Stanford, CA: Stanford University Press.

- Harrell, E. (2015). *Victims of identity theft, 2014 (NCJ 248991)*. Retrieved from www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit14.pdf
- Harrell, E., & Langton, L. (2013). *Victims of identity theft, 2012 (NCJ 243779)*. Retrieved from www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
- Higgins, G. E., Hughes, T., Ricketts, M. L., & Wolfe, S. E. (2008). *Identity theft complaints: Exploring state-level correlates*. *Journal of Financial Crime*, 15, 295–307.
- Holt, T. J. (2007). *Subcultural evolution? Examining the influence of on-and off-line experiences on deviant subcultures*. *Deviant Behavior*, 28, 171–198.
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2009). *Examining the applicability of lifestyle-routine activities theory for cybercrime victimization*. *Deviant Behavior*, 30, 1–25.
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2013). *Examining the relationship between routine activities and malware infection indicators*. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 29, 420–436.
- Holt, T. J., Burruss, G. W., & Bossler, A. M. (2010). *Social learning and cyber deviance: Examining the importance of a full social learning model in the virtual world*. *Journal of Crime and Justice*, 33, 15–30.
- Holt, T. J., & Kilger, M. (2008). *Techcrafters and makecrafters: A comparison of two populations of hackers*. *WOMBAT Workshop on Information Security Threats, Data Collection and Sharing*, 67–78.
- Holt, T. J., & Turner, M. G. (2012). *Examining risks and protective factors of on line identity theft*. *Deviant Behavior*, 33, 308–323.
- Jonsson, L. S., Priebe, G., Bladh, M., & Svedin, C. G. (2014). *Voluntary sexual exposure online among Swedish youth—social background, internet behavior and psychosocial health*. *Computers in Human Behavior*, 30, 181–190.
- Jordan, T., & Taylor, P. (1998). *A sociology of hackers*. *Sociological Review*, 46, 757–780.
- Lemert, E. M. (1958). *The behavior of the systematic check forger*. *Social Problems*, 6, 141–149.
- Lenhart, A. (2009, December 15). *Teens and sexting: How and why minor teens*

- are sending sexually suggestive nude or nearly nude images via text messaging.*
Pew Internet and American Life Project Research, 1–6. www.pewinternet.org/Reports/2009/Teens-and-Sexting.aspx
- Lippman, J. R., & Campbell, S. W. (2014). *Damned if you do, damned if you don't . . . if you're a girl: Relational and normative contexts of adolescent sexting in the United States.* *Journal of Children and Media*, 8, 371–386.
- Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). *Annual Research Review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age.* *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55, 635–654.
- Loper, K. (2000). *The criminology of computer hackers: A qualitative and quantitative analysis.* Ph.D. Dissertation, Michigan State University.
- Marcum, C., Higgins, G. E., Ricketts, M. L., & Wolfe, S. E. (2014). *Hacking in high school: Cybercrime perpetration by juveniles.* *Deviant Behavior*, 35, 581–591.
- McDowell, M. (2009). *National cyber alert system. Cyber security tip ST04–014.* Avoiding social engineering and phishing attacks. Retrieved April 30, 2013, from www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-014.html
- Meyer, G. (1989). *“The social organization of the computer underground.”* Master’s thesis, Northern Illinois University.
- Mitchell, K. J., Finkelhor, D., Jones, L. M., & Wolak, J. (2012). *Prevalence and characteristics of youth sexting: A national study.* *Pediatrics*, 129, 13–20.
- Morris, R. G. (2011). *Computer hacking and the techniques of neutralization: An empirical assessment.* In *Corporate hacking and technology-driven crime: Social dynamics and implications (pp. 1–17)*, edited by T. J. Holt and B. Schell. Hershey, PA: IGI- Global Press.
- Navarro, J. C., & Higgins, G. E. (2017). *Familial identity theft.* *American Journal of Criminal Justice*, 42, 218–230.
- Navarro, J. N., Marcum, C. D., Higgins, G. E., & Ricketts, M. L. (2016). *Addicted to the thrill of the virtual hunt: Examining the effects of Internet*

- addiction on cyberstalking behaviors of juveniles*. *Deviant Behavior*, 37, 893–903.
- Ngo, F. T., & Paternoster, R. (2011). *Cybercrime victimization: An examination of individual and situational-level factors*. *International Journal of Cyber Criminology*, 5, 773–793.
- PandaLabs. (2007). *Malware infections in protected systems*. Retrieved from http://research.pandasecurity.com/blogs/images/wp_pb_malware_infections_in_protected_systems.pdf
- Pastrikos, C. (2004). *Identity theft statutes: Which will protect Americans the most?* *Albany Law Review*, 67, 1137–1157.
- Pew Internet and American Life Project. (2005). *Spyware: The threat of unwanted software programs is changing the way people use the Internet*. Pew Internet and American Life Project. Retrieved from www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2005/PIP_Spyware_Report_July_05.pdf
- Pontell, H. N., & Brown, G. C. (2011). *Identity theft*. In C. Bryant (Ed.), *Routledge handbook of deviant behavior* (pp. 427–433). New York: Taylor and Francis.
- Renfrow, D. G., & Rollo, E. A. (2014). *Sexting on campus: Minimizing perceived risks and neutralizing behaviors*. *Deviant Behavior*, 35, 903–920.
- Reyns, B. W., Henson, B., & Fisher, B. S. (2012). *Stalking in the twilight zone: Extent of cyberstalking victimization and offending among college students*. *Deviant Behavior*, 33, 1–25.
- Reyns, B. W., Henson, B., & Fisher, B. (2014). *Digital deviance: Low self-control and opportunity as explanations of sexting among college students*. *Sociological Spectrum*, 34, 273–292.
- Ricketts, M. L., Maloney, C., Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2014). *The effect of internet related problems on the sexting behaviors of juveniles*. *American Journal of Criminal Justice*, 40, 270. doi:10.1007/s12103-014-9247-5.
- Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., & Livingstone, S. (2013). *Teen girls,*

- sexual double standards and sexting: Gendered value in digital image exchange.* *Feminist Theory*, 14, 305–323.
- Roberts, L. D., Indermaur, D., & Spiranovic, C. (2013). *Fear of cyber-identity theft and related fraudulent activity.* *Psychiatry, Psychology, and Law*, 20, 315–328.
- Rogers, M., Smoak, N., & Liu, J. (2005). *Self-reported deviant computer behavior: A Big-5, moral choice, and manipulative exploitive behavior analysis.* *Deviant Behavior*, 27, 245–268.
- Skinner, W., & Fream, A. (1997). *A social learning theory analysis of computer crime among college students.* *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 34, 495–518.
- Stambaugh, H., Beaupre, D. S., Icovc, D. J., Baker, R., Cassady, W., & Williams, W. P. (2001). *Electronic Crime Needs Assessment for State and Local Law Enforcement*, NCJ 186276, National Institute of Justice, Washington, DC.
- Strassberg, D. S., McKinnon, R. K., Sustaita, M. A., & Rullo, J. (2013). *Sexting by high school students: An exploratory and descriptive study.* *Archives of Sexual Behavior*, 42, 15–21.
- Symantec Corporation. (2012). *Symantec Internet security threat report (Vol. 17)*. Retrieved from www.symantec.com/threatreport/
- Taylor, R. W., Fritsch, E. J., Liederbach, J., & Holt, T. J. (2010). *Digital crime and digital terrorism (2nd ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Thomas, D. (2002). *Hacker culture*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Turgeman-Goldschmidt, O. (2008). *Meanings that hackers assign to their being a hacker.* *International Journal of Cyber Criminology*, 2, 382–396.
- van Wilsem, J. (2013). *Hacking and harassment: Do they have something in common? Comparing risk factors for online victimization.* *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 29, 437–453.
- Wade, H., Hylender, D., & Valentine, A. (2008). *Verizon business 2008*

- data breach investigation report*. Retrieved September 26, 2013, www.verizonbusiness.com/resources/security/databreachreport.pdf
- Walgrave, M., Heirman, W., & Hallman, L. (2013). *Under pressure to sext? Applying theory of planned behavior to adolescent sexting*. *Behavior and Information Technology*, 33, 86–98.
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Wolak, J., & Finkelhor, D. (2011, March). *Sexting: A typology*. Durham, NH: Crimes Against Children Research Centre, University of New Hampshire.

BAB 5

OBJEK KRIMINALITAS PADA KEJAHATAN PERSONAL DAN PROPERTI

Kejahatan pribadi dan properti adalah kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang di mana orang tersebut sering mengalami cedera fisik, serta trauma emosional dan psikologis. Ini termasuk pembunuhan, penyerangan, dan perampokan, serta penculikan dan pemerkosaan.

5.1 Penghilangan Nyawa Orang Lain

Menurut **Uniform Crime Report (UCR) FBI (2017)**, pembunuhan dan pembunuhan yang tidak tergesa-gesa adalah pembunuhan yang disengaja dan tidak tergesa-gesa dari satu orang oleh orang lain. UCR tidak termasuk mereka yang terbunuh karena kecelakaan, kelalaian, bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan yang dapat dibenarkan, yang merupakan pembunuhan seseorang dalam menjalankan tugas ketika seseorang diizinkan secara hukum untuk membunuh orang lain (seorang polisi yang membunuh seorang yang kejam, tersangka atau orang militer yang membunuh musuh selama masa perang). Pada 2015, ada 15.696 pembunuhan di Amerika Serikat, meningkat 10,8% dari 2014. Namun, tingkat pembunuhan masih relatif rendah. Dalam hal lokasi, 45,9% terjadi di Selatan, 21,5% di Midwest, 20,2% di Barat, dan 12,4% di Timur Laut (FBI, 2015).

Seperti yang dilaporkan oleh FBI (2015), keadaan pembunuhan termasuk bahwa 45,6% dari semua pembunuhan melibatkan satu korban dan pelaku. Dari para korban, 89% adalah laki-laki. Ketika ras korban diketahui (tidak diketahui 196 korban), 53,1% berkulit hitam atau Afrika-Amerika, 44,2% berkulit putih, dan 2,8% dari ras lain. Senjata yang digunakan adalah senjata api di 71,5% dari pembunuhan.

Sebagian besar korban mengetahui pelaku, dengan 29,2% korban pembunuhan dibunuh oleh seseorang yang mereka kenal yang bukan anggota keluarga: teman, pacar, tetangga, kenalan, dan sejenisnya. Ini diikuti oleh korban yang dibunuh oleh keluarga sebesar 12,8% dan 10,2% dibunuh oleh orang asing. Konteks pembunuhan, ketika diketahui (dalam 60,1% kasus) melibatkan argumen tentang segitiga romantis sebesar 39,9%, diikuti oleh 24,9% pembunuhan yang terjadi bersamaan dengan melakukan tindak pidana kejahatan lain (pemeriksaan, perampokan, perampokan). Ada 770 kasus pembunuhan yang dapat dibenarkan pada tahun 2014. Penegakan hukum secara sah menewaskan 442 individu dan warga negara membunuh 328 (*FBI, 2015*).

Dampak ke Korban

Pembunuhan mempengaruhi mereka yang peduli pada korban. Kematian orang yang dicintai sebagai akibat dari pembunuhan dapat memiliki efek yang menghancurkan karena seringkali sangat tiba-tiba, tak terduga, dan sulit dipahami. Ini membuat orang yang dicintai dari korban berurusan dengan viktimisasi untuk waktu yang lama. Awalnya mendengar berita bahwa orang yang mereka cintai telah dibunuh dapat menyebabkan kejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Meskipun notifikasi tidak pernah mudah, cara orang yang berduka diberitahu dapat membuat mendengar berita lebih traumatis. Mendapatkan berita di telepon, mendengar informasi yang tidak

lengkap atau tidak akurat, atau mencari tahu melalui media dapat menyebabkan rasa sakit tambahan (*Parents of Murdered Children, 2017*). Setelah mengetahui berita tersebut, seringkali ada tugas yang sensitif terhadap waktu dan tidak diinginkan yang harus dilakukan oleh orang yang dicintai yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan trauma. Ini termasuk mengidentifikasi mayat korban, mengklaim barang-barang pribadi mereka, berbicara dengan petugas peradilan pidana, memberi tahu keluarga dan teman-teman lain, membayar tagihan medis atau biaya ambulans, dan membuat pengaturan pemakaman.

Mereka juga mungkin harus berurusan dengan media jika kasusnya menjadi terkenal. Ada juga kesedihan tambahan bagi orang-orang terkasih dari para korban yang pembunuhnya tidak pernah ditemukan karena tidak ada orang yang memusatkan kemarahan mereka. Sebaliknya, keluarga dapat mengarahkannya pada penegakan hukum untuk kegagalan menemukan orang yang bertanggung jawab (*Lord, 1987*). Bahkan ketika pelanggar telah diidentifikasi, proses peradilan pidana seringkali sulit bagi orang yang dicintai untuk bertahan. Mereka mungkin mengalami frustrasi, merasa bahwa terdakwa memiliki lebih banyak hak daripada mereka. Mereka mungkin merasa terisolasi dan dikeluarkan dari proses. Anggota keluarga mungkin tidak diberitahu tentang proses pengadilan dalam kasus ini atau jika tawaran pembelaan telah ditawarkan dan diterima. Mereka juga mungkin percaya bahwa rasa sakit yang mereka rasakan pada kehilangan akan berkurang ketika si pembunuh telah dihukum, tetapi menemukan bahwa seringkali tidak demikian dan mereka merasa tidak berbeda (*Schlusser, 1997*).

Setelah orang yang dicintai mengetahui tentang kejahatan itu, cara mereka kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dapat

bervariasi. *Kubler-Ross (1969)* menguraikan proses berduka yang normal, mengidentifikasi lima tahap yang harus dilalui seseorang ketika mereka mengalami kehilangan: penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Namun, ketika seseorang kehilangan orang yang dicintainya akibat pembunuhan, reaksi yang dialami seseorang seringkali lebih parah dan rumit daripada ketika seseorang meninggal dengan cara yang berbeda. Keadaan yang mengelilingi pembunuhan dapat mengubah proses berduka. Kemarahan normal yang akan dialami seseorang dalam kehilangan seseorang sering diarahkan pada pelaku atau sistem peradilan pidana karena gagal menemukan pelaku (*Doka, 1996*). Orang yang berduka juga dapat terpaku pada kejahatan dan kengerian dan penderitaan yang dialami orang yang mereka cintai (*Sprang, McNeil & Wright, 1989*), menyebabkan perasaan depresi dan rasa bersalah yang ekstrem. Proses berduka dan kemampuan untuk menerima apa yang terjadi seringkali berkepanjangan untuk pembunuhan orang-orang yang dicintai korban sebagai akibat dari cara orang tersebut meninggal.

Fakta bahwa orang yang mereka cintai menemui ajalnya yang kejam dan menderita di tangan orang lain sering kali sulit dihadapi orang. Akibatnya, orang yang dicintai juga dapat mengalami gangguan stres pascatrauma, mimpi buruk, insomnia, perasaan keterasingan, kewaspadaan berlebihan, depresi, dan kecemasan (*Schlosser, 1997*). Orang-orang yang dicintai oleh para religius yang menjadi korban pembunuhan mungkin kehilangan kepercayaan mereka, yang dapat menghambat proses koping. Mereka juga mungkin kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang: keluarga korban pembunuhan dapat dikucilkan di komunitas mereka karena orang tidak ingin diingatkan akan kematian, pembunuhan, dan kejahatan dan berada di

dekat orang yang dicintai korban mengingatkan mereka (*Magee, 1983; Fowlkes, 1990; Ressler, Burgess, & Douglas, 1988; Spungen, 1998*).

Pembunuhan orang yang dicintai juga dapat berarti perubahan dalam kehidupan sehari-hari bagi yang berduka yang dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Jika pasangan dibunuh dan pasangan memiliki anak, ini berarti perubahan dalam pengasuhan dan pengasuhan anak. Jika seorang anak dibunuh, saudara kandungnya sering mencoba menebus kehilangan anak yang hilang. Selain tekanan keuangan dari biaya pemakaman, keluarga mungkin mengalami kehilangan pendapatan korban jika dia dipekerjakan sebelum kematian mereka. Anak-anak korban pembunuhan menderita dalam cara yang berbeda dari orang dewasa karena usia dan perkembangan mereka. Jika mereka menyaksikan pembunuhan itu, mereka dapat dipanggil untuk bersaksi di persidangan. Baik menyaksikan pembunuhan dan dipanggil untuk menghidupkan kembali itu dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma dan masalah emosional dan psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi anak itu selama bertahun-tahun (*Pynoos & Eth, 1984*). Jika salah satu orangtua anak membunuh yang lain, anak itu mungkin merasa jijik, pengkhianatan, dan kemarahan, bersama dengan kebingungan. Anak itu juga mungkin menderita masalah pengabaian dan ketakutan terkait dengan situasi kehidupan mereka yang berubah.

5.2 Korban dan Dampak Kejahatan Penyerangan Serangan Sederhana (*Simple Assault*)

Serangan sederhana adalah serangan atau upaya serangan seseorang tanpa menggunakan senjata yang tidak menyebabkan cedera atau cedera ringan. Beberapa contoh cedera ringan termasuk mata hitam, memar, luka, goresan, goresan, bengkak, atau cedera yang memerlukan waktu kurang

dari dua hari di rumah sakit (*Bureau of Justice Statistics, 2017*). Diperkirakan ada 3.179.440 serangan sederhana pada tahun 2015. Kebanyakan korban mengetahui penyerang mereka. Penyerang biasanya adalah teman, kenalan, kerabat, atau mitra intim (*Bureau of Justice Statistics, 2017*).

Serangan dengan Senjata (*Aggravated Assault*)

Serangan yang diperburuk adalah serangan atau percobaan serangan dengan senjata yang melibatkan cedera atau serangan tanpa menggunakan senjata yang mengakibatkan cedera fisik yang serius.

Cidera serius dapat mencakup kehilangan kesadaran, cedera internal, cedera yang memerlukan dua hari atau lebih rawat inap, patah tulang, atau gigi yang hilang (*Biro Statistik Keadilan, 2017*). Biro Statistik Keadilan memperkirakan bahwa ada 816.760 yang dilaporkan mengalami penyerangan di 2015. Sebagian besar korban mengetahui penyerang mereka, yang mungkin teman, kenalan, kerabat, atau pasangan intim (*Bureau of Justice Statistics, 2017*). Penelitian tentang serangan yang diperburuk telah menemukan bahwa argumen verbal mendahului serangan itu, sebagian besar serangan terjadi pada akhir pekan, pada malam hari, dan selama bulan-bulan musim panas, dan bahwa sebagian besar serangan melibatkan satu pelaku dan satu korban (*Lauritsen & White, 2014*).

Dampak ke Korban

Korban bereaksi terhadap serangan secara berbeda. Beberapa individu memiliki reaksi langsung, sementara yang lain memiliki respons yang lebih tertunda. Untuk beberapa orang, suatu reaksi dapat dipicu setelah suatu peristiwa atau pertemuan. Para korban mungkin merasa terhina, malu, atau malu tentang apa yang terjadi, berpikir bahwa mereka dapat mencegah serangan itu atau bahwa itu adalah kesalahan mereka. Individu dapat merasa ditolak atau terisolasi dari teman dan

keluarga setelahnya. Mereka juga mungkin mengalami kemarahan yang terkait dengan pelaku. Mereka mungkin merasa marah dan/atau frustrasi pada sistem peradilan pidana karena kurangnya tindakan atau hukuman dari pelaku penyerangan. Korban juga mungkin dalam keadaan panik, dengan ketakutan dan/atau kecemasan bahwa mereka akan diserang lagi. Korban dapat mengalami gangguan stres pascatrauma di mana mereka menderita gangguan tidur, menanggung kilas balik terhadap viktimisasi, dan menghindari tempat-tempat yang mengingatkan mereka akan serangan itu. Mereka juga mungkin menderita depresi dan kegelisahan, serta mudah waspada atau terkejut oleh suara atau tindakan cepat (*Office of Justice Programme, 2017*).

5.3 Korban dan Dampak Kejahatan Perampokan dengan Kekerasan (*Robbery*)

Robbery adalah tindakan yang dilakukan atau diselesaikan untuk mengambil properti atau uang tunai langsung dari individu lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu dapat terjadi dengan atau tanpa senjata (*Bureau of Justice Statistics, 2017*). Menurut Kejahatan FBI di Amerika Serikat (2015), ada 327.374 perampokan pada tahun 2015. Nilai rata-rata dolar properti yang dicuri dalam perampokan adalah \$ 1.190 dan total kerugian \$ 390 juta. Bank menderita kerugian terbesar dengan \$ 3.884 kerugian per pelanggaran. Dalam hal senjata yang digunakan selama perampokan, FBI (2015) melaporkan bahwa taktik senjata kuat digunakan 42,2% dari waktu, diikuti oleh senjata api di 40,8% kasus, senjata berbahaya "lainnya" 9,1%, dan pisau/alat pemotong 7,9 % waktu. Dalam hal lokasi, perampokan paling sering terjadi di jalan atau jalan raya (39,88%) dan paling tidak mungkin terjadi di bank (1,7%) (*FBI, 2015*).

Dampak ke Korban

Individu yang telah menjadi korban perampokan dapat menderita konsekuensi fisik dan emosional pada tingkat yang berbeda selama periode waktu yang berbeda sebagai akibat dari trauma yang dialami (Elklit, 2002). Mereka mungkin merasa rentan dan bahwa mereka telah kehilangan kendali atas hidup dan keputusan mereka. Korban juga mungkin berada dalam keadaan sangat kewaspadaan, waspada terhadap potensi bahaya atau ancaman. Mereka mungkin merasa bahwa mereka melakukan sesuatu untuk berkontribusi pada viktimisasian mereka atau bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjadi korban. Mereka juga mungkin merasa kesal atas harta benda yang dicuri selama perampokan. Korban mungkin takut bahwa orang yang merampok mereka akan kembali untuk melukai mereka atau merampok mereka lagi dan mengambil harta benda lainnya. Mereka mungkin mengalami kilas balik dan dipicu oleh hal-hal tertentu. Individu mungkin merasa marah pada perampok dan mengalami perasaan ingin balas dendam atau pembalasan. Mereka juga dapat mengalami kejadian depresi, gangguan stres akut (ASD; Elklit, 2002; Hansen & Elklit, 2011) atau gangguan stres pasca trauma (PTSD) (Fischer et al., 2014). Reaksi yang dimiliki oleh korban terhadap trauma semacam ini dipengaruhi oleh akses mereka ke sistem dukungan sosial dan keseluruhan kekuatan emosional serta ketahanannya (Brewin, Andrews & Valentine, 2000; Yap & Devilly, 2004).

Mengalami perampokan di tempat kerja dapat memengaruhi reaksi dan kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Mereka mungkin mengalami kilas balik ke viktimisasi di tempat kerja, mengembangkan PTSD, membutuhkan peningkatan kunjungan perawatan kesehatan, dan mengalami absen terkait trauma (Belleville et al., 2012). Bagi mereka yang mengalami perampokan di tempat kerja, sangat sulit untuk

kembali ke tempat viktimisasi setiap hari. Ini dapat menyebabkan trauma tambahan dan memengaruhi kehadiran di tempat kerja karena individu mungkin ingin menghindari pemicu tentang insiden perampokan (*Belleville et al., 2012*). Korban perampokan juga mungkin mengalami tekanan psikologis yang merusak interaksi mereka dengan pelanggan serta rekan kerja (*Jones, 2002*).

Property Crimes

Istilah properti mengacu pada barang, tanah, bangunan, uang, dan/atau mobil—hal-hal fisik yang dapat Anda lihat dan sentuh. Kejahatan properti mengacu pada pengambilan ilegal, merusak, atau perusakan properti seseorang. Bentuk umum kejahatan properti termasuk pencurian, pencurian kendaraan bermotor, dan pembakaran. Sementara definisi kejahatan harta benda seringkali tidak mencakup penggunaan atau ancaman kekerasan, ini tidak berarti bahwa kekerasan tidak digunakan, atau bahwa ini adalah kejahatan tanpa korban atau pelanggaran ringan. Kejahatan properti melibatkan properti tetapi dilakukan terhadap orang. Orang-orang yang menjadi korban kejahatan harta benda menderita dengan cara yang mirip dengan korban kejahatan lainnya. Mereka mungkin mengalami cedera fisik, tekanan emosional, gangguan stres pascatrauma (PTSD), ketakutan, dan masalah kecemasan setelah viktimisasi serta berurusan dengan penggantian properti mereka.

Menurut Kantor Korban Kejahatan (2017) kejahatan properti membentuk sekitar 75% dari semua kejahatan di Amerika Serikat. Kejahatan properti yang paling umum adalah pencurian, dan itu paling sering terjadi di properti sewaan. Setiap tahun, kerugian akibat kejahatan properti adalah lebih dari \$ 10 miliar, dengan lebih dari \$ 4 miliar dihabiskan untuk kunci dan brankas, \$ 1,4 miliar untuk kamera pengintai, dan \$ 49 juta untuk anjing penjaga.

5.4 Korban dan Dampak Kejahatan Perampokan dengan Pembobolan (*Burglary*)

Burglary terjadi ketika seseorang atau beberapa orang memasuki atau mencoba memasuki tempat tinggal secara tidak sah. Ini sering melibatkan pencurian, tetapi tidak selalu. Pintu masuk yang melanggar hukum dapat melibatkan kekuatan seperti memecahkan jendela, memotong layar, atau memaksa membuka pintu. Pintu masuk yang melanggar hukum juga dapat terjadi tanpa paksa, seperti ketika seseorang masuk melalui pintu atau jendela yang tidak terkunci. Perampokan dapat terjadi pada bangunan yang bukan rumah, seperti garasi atau gudang. Selain itu, jika seseorang secara tidak sah memasuki rumah liburan atau hotel, itu dianggap sebagai pencurian bahkan jika tidak ada yang tinggal di sana pada saat itu (*Biro Statistik Keadilan, 2017*). Menurut *Uniform Crime Report FBI* (2015), ada sekitar 1.579.527 pencurian di Amerika Serikat. Di tahun 2015, perampokan menyumbang 19,8% dari semua kejahatan properti dan korban menderita kerugian properti \$ 3,6 miliar. Kerugian rata-rata per pelanggaran pencurian adalah \$ 2.316. Pencurian properti tempat tinggal adalah yang paling umum, membentuk 71,6% dari semua pencurian untuk 2015 (*FBI, 2015*).

Dampak ke Korban

Ketika rumah seseorang diserang dengan perampokan, mereka mungkin mengalami berbagai emosi dan reaksi. Sementara perampokan bukanlah suatu peristiwa di mana cedera atau kematian aktual terancam, penelitian menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa yang dapat menimbulkan respons serupa. Para korban mengalami perasaan tidak berdaya, kengerian, ketakutan yang intens, dan respons seperti PTSD (*Brown & Harris, 1989; Caballero, Ramos, & Saltijeral, 2000; Maguire, 1980; Mawby & Walklate, 1997; Ostrihanska & Wojcik, 1993*).

Perasaan ini dapat bertahan, terjadi berbulan-bulan setelah viktimisasi (*Woblfarth, Van den Brink, Winkel, & Ter Smitten, 2003*). Individu sering merasa kaget dan tidak percaya, serta frustrasi dan bingung bagaimana hal ini bisa terjadi pada mereka. Mereka mungkin merasa dilanggar dan kesal. Para korban mungkin mengalami perasaan tidak nyaman dan kesulitan bersantai di rumah. Mungkin perlu beberapa saat bagi mereka untuk merasa nyaman lagi di rumah mereka sendiri.

Korban juga mungkin menjadi lebih takut berada di rumah mereka setelah pencurian karena seseorang ada di rumah mereka secara tak terduga. Akibatnya, korban mungkin merasa bahwa mereka perlu mengambil tindakan pencegahan keamanan ekstra untuk merasa aman, mengurangi kecemasan, dan/atau mencegah viktimisasi lebih lanjut. Ini mungkin melibatkan memasang sistem keamanan di rumah dan mengevaluasi pintu, jendela, dan pencahayaan. Korban juga mungkin merasa perlu membeli senjata api atau memiliki sejenis senjata lain di rumah mereka, di dekat mereka, atau pada orang mereka untuk membuat mereka merasa aman jika seseorang menerobos masuk lagi. Untuk mengatasi perasaan-perasaan ini, para korban pencurian dapat mengambil manfaat dari berbicara dengan dan mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, dan/atau seorang penasihat atau terapis. Reaksi korban terhadap pencurian rumah sering kali didasarkan pada persepsi kualitas tanggapan polisi. Perampokan adalah kejahatan yang unik jika dibandingkan dengan banyak kasus lainnya karena sebagian besar kasus dilaporkan ke polisi. Jika korban merasa puas dengan respons polisi, mereka sering memiliki reaksi yang lebih baik daripada jika mereka menerima respons negatif dari polisi (*Kilpatrick & Otto, 1987; Orth, 2009; Parsons & Bergin, 2010; Sales, Baum, & Shore, 1984*).

Individu juga dapat mengalami kemarahan dan kesedihan karena kehilangan barang-barang berharga, sentimental, atau tak tergantikan. Ini bisa sangat sulit bagi anak-anak yang kehilangan barang-barang yang mereka sukai dan mungkin tidak mengerti mengapa dan/atau bagaimana barang-barang mereka diambil. Korban yang mengajukan klaim dengan perusahaan asuransi mereka mungkin mengalami stres dan kecemasan tambahan. Sebagian besar perusahaan asuransi memiliki sistem untuk prosedur dan jumlah yang dibayarkan oleh korban pencurian untuk barang-barang mereka yang hilang. Korban mungkin tidak menerima penggantian yang cukup untuk mengganti barang curian. Misalnya, seorang korban memiliki televisi yang lebih tua yang telah mengalami penyusutan seiring waktu. Korban akan diganti untuk nilai televisi lama, tetapi membeli televisi baru kemungkinan akan lebih mahal daripada penggantian. Selain itu, sebagian besar korban yang mengajukan klaim pembobolan membayar biaya yang dapat dikurangkan, biaya sendiri yang berkisar antara \$ 100 hingga \$ 1.000 tergantung pada paket asuransi. Korban mungkin merasa frustrasi oleh perusahaan asuransi mereka, merasa bahwa barang yang hilang tidak diganti secara memadai. Ada juga para korban perampokan yang tidak memiliki asuransi dan harus mengganti barang-barang yang hilang tanpa bantuan keuangan dari perusahaan asuransi (*Office of Victims of Crime, 2017*).

5.5 Korban dan Dampak Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor adalah upaya pencurian kendaraan bermotor. Ini termasuk skuter motor, mobil salju, sepeda motor, kendaraan segala medan, kendaraan sport, truk, dan bus. Pencurian kendaraan bermotor tidak termasuk pesawat terbang, peralatan pertanian,

buldoser dan peralatan konstruksi lainnya, perahu motor, perahu layar, rumah perahu, atau perahu pribadi (FBI, 2017). Diperkirakan ada 707.758 pencurian kendaraan bermotor di Amerika Serikat pada 2015, dengan \$ 4,9 miliar hilang sebagai akibatnya. Jumlah rata-rata yang hilang untuk kendaraan curian adalah \$ 7.001 (FBI, 2015). Dari semua kendaraan bermotor curian, 74,7% adalah mobil. Baru-baru ini, ada beberapa perkembangan dalam cara pelanggar melakukan pencurian kendaraan bermotor dan mengorbankan individu karena teknologi. Pengembangan yang dilengkapi transponder atau "kunci pintar" telah membatasi kemampuan calon pencuri untuk melakukan hotwire kendaraan bermotor.

Salah satu cara yang berkembang dari pencurian kendaraan bermotor adalah melalui pelaku mencuri kunci dari area parkir valet. Mereka juga dapat bertindak sebagai pemilik mobil sah yang menginginkan kunci pengganti yang dibuat oleh dealer atau tukang kunci. Pelanggar juga telah mengembalikan mobil sewaan dengan kunci kerja yang baik di kunci kontak dan kunci kosong di sampingnya. Mereka kemudian kembali ke tempat parkir nanti dengan kunci kerja lainnya dan mencuri mobil. Pelanggar juga telah menempatkan pelacak GPS di dalam atau di mobil dan ketika mobil itu disewa lagi, mereka mengikutinya dan mencurinya. Pelanggar juga dapat membuat identitas palsu atau menggunakan identitas curian untuk membiayai mobil secara ilegal di dealer mobil. Mobil yang dicuri, baik dari individu atau bisnis, sering diberi nomor identifikasi kendaraan (VIN) yang berbeda untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka dicuri sehingga dapat dijual kepada pelanggan yang naif (National Insurance Crime Bureau, 2017).

Dampak ke Korban

Sementara pencurian kendaraan bermotor sering dianggap sebagai kejahatan ekonomi, itu dapat berdampak pada para korban. Seperti

halnya pencurian, korban mungkin mengalami stres dan kecemasan ketika berhadapan dengan perusahaan asuransi dan berpotensi tidak menerima nilai penuh untuk barang curian mereka. Mereka juga mungkin kehilangan pekerjaan jika mereka tidak memiliki sarana angkutan lain. Dampak psikologis pada korban seringkali lebih rendah daripada yang terlihat dengan pencurian, karena mobil tidak dijiwai dengan privasi dan kesucian yang sama seperti rumah.

5.6 Korban dan Dampak Kejahatan Pembakaran Disengaja

Arson adalah pembakaran yang disengaja dan berbahaya atau upaya untuk membakar rumah, bangunan publik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, atau properti pribadi orang lain. Itu juga dapat mencakup niat untuk menipu (FBI, 2017). *Uniform Crime Report* tidak termasuk perkiraan untuk kejahatan pembakaran karena pelaporannya bervariasi. Namun, FBI telah mengumpulkan beberapa data untuk memberikan gambaran umum tentang pembakaran. Lembaga penegak hukum pada tahun 2015 yang menyediakan data pembakaran menunjukkan bahwa ada 41.376 insiden yang dilaporkan. Dari mereka, 45,7% melibatkan perumahan, penyimpanan, atau struktur publik, diikuti oleh properti seperti tanaman, kayu, dan pagar di 29,8% dan properti bergerak di 24,4%. Kerugian rata-rata per insiden pembakaran adalah \$ 14.182 (FBI, 2015). Menurut *National Fire Protection Association (NFPA) (2017)*, sengaja mengatur kebakaran struktur rumah kemungkinan besar akan diatur antara 3 siang dan tengah malam, dan kamar tidur adalah daerah asal terkemuka untuk kebakaran rumah, dengan kamar mandi menjadi daerah asal terkemuka untuk pembakaran properti publik.

Dampak ke Korban

Korban yang terbakar menderita dengan cara yang sama seperti korban kejahatan orang dan kejahatan properti—mereka menderita kerusakan fisik, psikologis, dan properti. Dampak utama pembakaran terhadap korban termasuk kematian (warga sipil dan petugas pemadam kebakaran), cedera fisik, dan kerusakan harta benda. Korban pembakaran paling sering dirugikan melalui struktur kebakaran (melibatkan komponen struktural bangunan). Meskipun kebakaran struktur hanya terdiri dari 18% dari semua kebakaran yang disengaja, mereka merupakan 92% dari kematian, 84% dari cedera dan 86% dari kerusakan dan kehilangan properti langsung. Sebagian besar kebakaran struktur (63%) terjadi di perumahan properti, dan 80% dari ini digunakan pada saat pembakaran (*Campbell, 2014*). Tidak ada korban pembakaran yang khas; itu adalah kejahatan yang dapat memengaruhi siapa pun. Ada juga potensi untuk korban pihak ketiga, seperti mereka yang tinggal di sebelah gedung atau apartemen yang terbakar (NFPA, 2017). Selain kerugian fisik, ada kerugian emosional juga. Mirip dengan apa yang dialami korban pencurian, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor, korban pembakaran telah kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi mereka—terkadang seluruh rumah mereka.

Beberapa korban pembakaran yang kehilangan rumah dan tidak dapat menemukan yang lain di daerah tersebut mungkin terpaksa pindah ke komunitas yang tidak dikenal, yang dapat menyebabkan perasaan depresi dan pemindahan. Korban juga mungkin takut akan keselamatan mereka setelah mengetahui bahwa rumah mereka sengaja dibakar (*NFPA, 2017*). Korban pembakaran mungkin juga khawatir tentang rumah mereka dijarah (ketika orang-orang datang dan mengambil

barang apa saja yang belum dirusak oleh api). Jika penghuni rumah terluka dalam kebakaran, mereka mungkin tidak dapat menghapus barang-barang tersebut sebelum mereka dicuri, menambah kejahatan lain pada viktimisasi yang mereka alami. Seperti halnya para korban pencurian, para korban pembakaran juga harus berurusan dengan perusahaan asuransi, dan mereka menjalani proses akuntansi yang panjang dan melelahkan untuk barang-barang yang rusak atau hancur, mungkin hanya untuk menerima kompensasi yang tidak memadai. Ada juga banyak korban yang tidak memiliki asuransi, seperti mereka yang menyewa. Korban yang mengajukan permohonan untuk program kompensasi korban kejahatan negara seringkali menemukan bahwa mereka hanya bisa mendapatkan penggantian dan pertanggungungan untuk cedera fisik dan biaya medis dan bukan kehilangan pendapatan karena cedera fisik atau properti (FEMA, 1997).

5.7 Korban dan Dampak Kejahatan Pengambilan yang Melanggar Hukum (*Larceny-theft*)

Larceny adalah pengambilan yang melanggar hukum, memimpin, membawa, atau menumpang dengan properti atau kepemilikan orang lain (FBI, 2017). Laporan Kejahatan Seragam FBI menunjukkan bahwa pada 2014 diperkirakan ada 1.238.190 penangkapan karena pencurian. Nilai rata-rata properti yang diambil adalah \$ 929 per pelanggaran dan rata-rata total kerugian secara nasional diperkirakan \$ 5,3 miliar (FBI, 2015).

Dampak ke Korban

Banyak korban pencurian yang tidak memiliki harta benda dikembalikan kepada mereka. Hal ini dapat membuat korban mempertanyakan kebaikan orang lain serta membuat mereka marah karena mereka kehilangan sesuatu yang mereka hargai. Mereka mungkin juga merasa

takut barang-barang dicuri lagi dan mengalami perasaan tidak aman secara umum. Jika harta curian tidak tergantikan, korban mungkin menemukan kejahatan sangat sulit untuk ditangani. Juga, jika korban mengajukan klaim asuransi, masalah berurusan dengan perusahaan asuransi yang disebutkan sebelumnya juga berlaku.

Kejahatan tanpa korban (“Victimless” Crimes)

Kejahatan tanpa korban adalah tindakan ilegal di mana orang dewasa yang setuju berpartisipasi dan di mana tidak ada individu yang mengeluh (yaitu, korban) (Schur, 1965). Dalam jenis kejahatan ini, tidak ada salahnya dilakukan pada korban, atau jika ada kejahatan, itu sering tidak dilihat seperti itu karena orang yang dirugikan (korban) adalah peserta yang bersedia yang setuju untuk terlibat dalam kejahatan (Stitt, 1988). Topik kejahatan tanpa korban seringkali kontroversial di dunia akademis dan komunitas karena ada dua sudut pandang utama yang terkait dengan kejahatan ini. Yang pertama adalah bahwa tindakan ini tidak boleh dianggap kejahatan karena tidak ada yang dirugikan kecuali orang yang berpartisipasi dalam tindakan itu dengan bebas. Yang kedua adalah bahwa tindakan ini harus ilegal karena undang-undang harus menegakkan standar moral masyarakat dan ada konsekuensi negatif meskipun mereka mungkin tidak segera terlihat.

Pelacuran, penggunaan narkoba, dan taruhan olahraga ilegal sering dianggap sebagai tanpa korban karena satu-satunya orang yang mereka rugikan adalah mereka yang berpartisipasi atas kehendak bebas mereka sendiri. Namun, dalam ikhtisar kejahatan berikut ini, kedua belah pihak akan dibahas, termasuk cara di mana kejahatan “tanpa korban” ini memang memiliki korban nyata dan nyata.

Prostitusi atau Pelacuran

Prostitusi adalah pertukaran ilegal tindakan seksual dengan uang.

Beberapa orang percaya bahwa prostitusi adalah kejahatan tanpa korban dan harus dilegalkan dan diatur dengan cara yang sama seperti bisnis nirlaba lainnya. Inti dari argumen ini adalah bahwa bisnis seks untuk dijual—tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyetujui—tidak akan pernah hilang, jadi kita sebagai masyarakat seharusnya menjadikannya lebih aman dan lebih baik bagi mereka yang terlibat. Banyak yang percaya bahwa pekerja seks yang menukar layanan mereka dengan uang harus memiliki pengaturan kerja yang sah sama seperti individu lain dalam industri jasa, dan mereka percaya bahwa perubahan ini akan melindungi baik pelacur maupun "john" (orang yang membeli layanan seksual) (Kempadoo, 2005; Klinger, 2003; Kuo, 2003; Weitzer, 2007, 2010).

Namun, beberapa orang percaya bahwa kejahatan prostitusi berbahaya dan bukan tanpa korban, dan bahwa legalisasi dan/atau peraturan tidak akan mengurangi bahaya. Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang berada dalam perdagangan seks sering mulai sebagai anak di bawah umur (Estes dan Weiner, 2002) dan sering dipaksa atau dipaksa untuk melakukan tindakan seperti itu melawan keinginan mereka atau hanya untuk bertahan hidup (Chapkis, 2003; Flowers, 2001). Pelacur sering menjadi korban kekerasan di tangan mucikari, pedagang manusia, atau mereka yang membeli layanan seksual (Flowers, 2001; Miller, 1993). Kehidupan seorang pelacur tidak glamor seperti yang telah digambarkan dalam film-film seperti *Pretty Woman*, Mereka yang membeli seks dari pelacur, "hidung belang," beresiko tertular penyakit menular seksual, yang menempatkan mereka dan pasangan mereka yang lain dan/atau keluarga berisiko. Bisnis di atau dekat daerah di mana pelacuran terlihat dapat dirugikan jika daerah tersebut dikenal sebagai lingkungan yang penuh kejahatan (Ayala & White, 2008). Beberapa orang percaya bahwa prostitusi dapat menghancurkan pernikahan dan keluarga.

Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan obat-obatan terlarang sering dianggap sebagai kejahatan tanpa korban: banyak orang berpendapat bahwa satu-satunya orang yang dirugikan adalah orang yang menggunakan narkoba, yang melakukannya dengan pilihan. Menurut FBI, pelanggaran penyalahgunaan narkoba biasanya didefinisikan sebagai pelanggaran negara bagian dan/atau lokal sementara agen federal, negara bagian, dan lokal berbagi penegakan hukum terhadap hukum narkoba. Tuduhan kriminal untuk narkoba seringkali terkait dengan kepemilikan obat secara tidak sah, tetapi penjualan, penggunaan, pertumbuhan, atau pembuatan obat-obatan juga bisa menjadi biaya. Jenis-jenis obat yang paling umum dikonsumsi secara ilegal oleh individu termasuk opium atau kokain dan turunannya, ganja, narkotika sintetis, dan obat-obatan non-narkotik seperti barbiturat (*Bureau of Justice Statistics, 2017*).

Menurut *Uniform Crime Report* Kejahatan FBI di Amerika Serikat (2014), jumlah penangkapan terbesar untuk kejahatan pada tahun 2014 adalah pelanggaran penyalahgunaan narkoba, berjumlah 1.561.231.

Sementara banyak yang menganggap narkoba menggunakan kejahatan tanpa korban, yang lain berpendapat sebaliknya. Orang yang menggunakan narkoba dapat menjadi kecanduan dan melakukan kejahatan tambahan, seperti pencurian, untuk memberi makan kecanduan mereka, sehingga merugikan orang lain dan menciptakan korban tambahan. Mereka juga dapat menderita konsekuensi fisik negatif atau bahkan kematian akibat penggunaan narkoba, dan ini bisa sangat sulit bagi orang yang mereka cintai. Keluarga dapat mengalami kecemasan, depresi, dan masalah fisik jika perawatan diri mereka terputus-putus karena hanya berfokus pada merawat orang yang mereka kecanduan narkoba. Keluarga dan teman-teman pengguna narkoba sering merasa terluka, marah, dan kesal. Perasaan ini sering mengintensifkan jika penyalahguna narkoba berbohong atau mencuri darinya (*Powers, 2016*).

Perjudian (*Illegal Gambling*)

Berjudi adalah taruhan atau taruhan pada hasil, biasanya pada permainan atau sesuatu yang setidaknya sebagian didasarkan pada kesempatan. Perjudian ilegal terjadi ketika individu berpartisipasi dalam perjudian yang dilarang oleh hukum. Ini termasuk judi di dunia maya. Undang-undang Perlindungan Olahraga Profesional dan Amatir (PASPA) disahkan oleh Kongres pada tahun 1992. Undang-undang ini melarang taruhan olahraga di sebagian besar Amerika Serikat. Hari ini, Nevada adalah satu-satunya negara bagian di mana taruhan di perguruan tinggi dan olahraga profesional melalui bandar berlisensi adalah legal. Menurut American Gaming Association (2017), orang Amerika bertaruh \$ 4,2 miliar untuk Super Bowl 50 dan 97% dari taruhan itu ilegal. Selain itu, \$ 90 miliar taruhan ilegal dipertaruhkan di *National Football League* dan pertandingan sepak bola perguruan tinggi musim lalu dan \$ 2 miliar dipertaruhkan secara legal. Banyak yang akan berpendapat bahwa perjudian ilegal adalah kejahatan tanpa korban karena semua yang terlibat menyetujui dan tidak ada yang terluka. Pendukung seperti *American Gaming Association* (2017) mengatakan bahwa undang-undang federal tentang perjudian ilegal telah gagal mengurangi perjudian. Diperkirakan bahwa pada tahun 2016, orang Amerika menempatkan \$ 155 miliar dalam taruhan olahraga ilegal. Pendukung mengklaim ini berarti perjudian harus disahkan.

Namun, banyak yang menyatakan bahwa ini bukan kejahatan tanpa korban, karena ada bahaya yang terkait dengan perjudian yang mungkin diperburuk jika perjudian itu legal dan dengan demikian lebih mudah diakses. Salah satu bahaya seperti itu adalah gangguan perjudian (GD), di mana individu bertaruh secara kompulsif dan tidak dapat berhenti tidak peduli apa pun konsekuensinya. GD telah ditambahkan ke edisi kelima Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (*American Psychiatric Association, 2013*) dan dimasukkan dalam bab tentang gangguan kecanduan.

Perjudian mengaktifkan sistem penghargaan otak dengan cara yang mirip dengan penyalahgunaan zat. Seseorang yang menderita GD juga dapat melakukan jenis perilaku kriminal lainnya. Kejahatan tambahan ini sering tentang mendapatkan lebih banyak uang untuk dipertaruhkan, seperti penipuan dan pencurian (*Folino dan Abait, 2009*). Ini memberikan potensi bagi individu untuk menjadi korban dan menderita. Apakah perjudian yang disahkan meningkatkan kejahatan atau tidak, tidak pasti. Ada bukti yang menunjukkan bahwa implementasi kasino dalam komunitas memang meningkatkan kejahatan secara signifikan, serta bukti bahwa kasino tidak. Hubungan itu tidak sepenuhnya dipahami (*Stitt, Nichols dan Giacomassi, 2003*). Untuk benar-benar memahami dampak perjudian yang disahkan, diperlukan lebih banyak penelitian. Namun, penting untuk dicatat bahwa apakah perjudian itu ilegal atau legal, jika seseorang menderita kecanduan judi, orang yang dicintai dari individu tersebut juga menderita. Mereka mungkin menderita secara finansial karena pecandu judi menggunakan uang yang dibutuhkan untuk mendukung rumah tangga untuk berjudi, membuat keluarga dalam bahaya kehilangan tempat tinggal atau transportasi mereka. Mereka juga dapat membahayakan keluarga mereka jika mereka secara ilegal bertaruh dengan "bandar judi", yang mungkin menggunakan kekerasan untuk mencoba memaksa atau memastikan pembayaran hutang.

Pertarungan Anjing (*Dog Fighting*)

Pertarungan anjing (seperti adu ayam) sering menjadi fokus perjudian ilegal dan dianggap sebagai kejahatan tanpa korban oleh beberapa orang yang melihat binatang sebagai harta dan alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai "korban." Pacuan kuda juga sering menjadi bagian dari perjudian ilegal, tetapi institusi pacuan kuda itu legal dan kuda-kuda itu tidak menghadapi perlakuan brutal atau pelecehan ekstrem seperti yang

dilakukan anjing-anjing ras. Dalam pertarungan anjing, cedera yang diderita anjing bisa berakibat fatal dan banyak perkelahian sampai mati. Cedera yang paling umum yang diderita anjing-anjing petarung adalah memar yang parah, luka tusukan yang dalam, dan patah tulang. Jika seekor anjing tidak mati selama perkelahian, mereka sering mati akibat efek perkelahian, seperti kehilangan darah, dehidrasi, syok, kelelahan, atau infeksi. Anjing-anjing juga dibesarkan dalam lingkungan pelecehan dan penganiayaan berat sejak lahir sehingga mereka jahat, marah, dan siap untuk melawan anjing lain atas perintah. Perkelahian itu sendiri berlangsung satu hingga dua jam sampai salah satu anjing tidak bisa melanjutkan karena cedera atau kematian. Penonton bertaruh pada anjing mana yang akan menang (*Masyarakat Manusiawi Amerika Serikat, 2017*).

Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa anjing dipandang sebagai properti dalam masyarakat kita dan oleh karena itu tidak ada korban nyata dalam perkelahian anjing, anjing adalah makhluk hidup yang mampu mengalami rasa sakit dan penderitaan. "Olahraga" pertarungan anjing memang memiliki korban: anjing. Mereka menderita dari tindakan kekejaman yang tak terukur dan tidak dapat mengubah keadaan mereka karena hewan peliharaan bergantung pada kemurahan hati manusia. Gagasan ini tercermin dalam undang-undang, karena perkelahian anjing adalah kejahatan di 50 negara bagian. Di tingkat federal, UU Kesejahteraan Hewan melarangnya, serta transportasi hewan untuk berkelahi (*Masyarakat Amerika untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan, 2017*).

5.8 Dampak Viktimisasi dalam Kehidupan Korban

Penelitian telah menunjukkan bahwa viktimisasi sering tidak acak dan tampaknya terkonsentrasi untuk mempengaruhi sebagian kecil populasi (*Farrell, Tseloni, & Pease, 2005; Gottfredson, 1984*). **Farrell** dan **Pease** (1993) memperkirakan bahwa 4% dari populasi menderita 44% dari viktimisasi.

Pengorbanan sebelumnya dapat menjadi indikator pengorbanan di masa depan (*Lauritsen & Davis-Quinet, 1995; Osborn, Ellingworth, Hope, & Trickett, 1996; Osborn & Tseloni, 1998; Pease, 1998*). Ketika seseorang menjadi korban, mereka tidak dibawa keluar dari kolam untuk viktimisasi lagi, yang berarti bahwa hanya karena mereka sudah menjadi korban tidak berarti mereka tidak dapat menjadi korban lagi. Penelitian telah menunjukkan hubungan antara viktimisasi sebelumnya dan risiko viktimisasi masa depan (*Gottfredson, 1984; Hindelang, Gottfredson, & Garafalo, 1978; Ousey, Wilcox, & Brummel, 2008; Tseloni & Pease, 2003*). Misalnya, sebuah rumah tangga dapat berisiko mengalami pencurian berulang. Ini cenderung terjadi dalam waktu enam minggu sejak perampokan pertama (*Pohvi et al., 1990*). Setelah mencuri rumah sekali, para pencuri sekarang tahu lebih banyak tentang lokasi dan dengan demikian memilih untuk membobolnya lagi (*Hearnden & Magill, 2004*). Ini bisa sangat membuat frustrasi dan menjengkelkan bagi para korban karena mereka mungkin berusaha untuk mengatasi viktimisasi mereka sebelumnya hanya untuk menjadi korban lagi, sehingga membuat proses pemulihan mereka lebih lama dan lebih sulit.

Langkah pertama dalam analisis yang berpusat pada korban membahas masalah, “Kelompok mana yang mempertahankan korban terbesar? Kelompok mana yang menghadapi ancaman bahaya yang lebih kecil? Tingkat viktimisasi untuk seluruh populasi menunjukkan seberapa sering pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan dilakukan terhadap orang Amerika "biasa" dan seberapa sering rumah tangga "tipikal" menderita pencurian, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian identitas. Adalah masuk akal untuk mencurigai bahwa peluang untuk menjadi korban tidak seragam untuk semua orang tetapi lebih mungkin untuk beberapa jenis dan lebih kecil untuk yang lain.

Orang dengan atribut yang sama seperti usia atau jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kejahatan lebih banyak atau lebih jarang daripada yang

lain. Jika kecurigaan ini dapat didokumentasikan, maka setiap tingkat keseluruhan yang memproyeksikan risiko untuk semua orang Amerika dapat menutupi variasi penting dalam subkelompok. Dengan kata lain, perlu untuk "memilah" atau "mendekonstruksi" atau memecah tingkat viktimisasi menjadi potongan-potongan komponen mereka untuk mengungkapkan risiko diferensial yang dihadapi oleh kategori orang tertentu.

Pola dalam tingkat viktimisasi dapat dikenali ketika satu kategori menderita lebih banyak dari yang lainnya. Contoh yang paling jelas adalah insiden pemerkosaan: Perempuan jauh lebih mungkin dilanggar secara seksual daripada laki-laki. Mencari pola berarti mencari keteraturan dalam massa informasi yang tampaknya kacau dan menemukan keterprediksian pada apa yang pada mulanya tampak menjadi peristiwa acak. Risiko diferensial yang berasal dari pola yang diidentifikasi dalam data akan diselidiki dalam bab ini untuk kejahatan kekerasan pembunuhan dan perampokan dan untuk kejahatan properti pencurian, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian identitas.

Sumber utama data tentang angka viktimisasi di negara lain adalah cabang Perserikatan Bangsa-Bangsa-Kantornya untuk Pengawasan Narkoba dan Kejahatan-yang secara berkala mensurvei lembaga penegak hukum anggotanya. Juga, Uni Eropa (UE) mengumpulkan data dari sistem peradilan pidana negara-negara anggotanya dan menerbitkan Buku Sumber Statistik Kejahatan dan Keadilan Pidana Eropa tahunan. Di masa lalu, Organisasi Kepolisian Internasional (Interpol) juga mempublikasikan data secara publik. Sejak 1989, sebagian besar negara Eropa telah berpartisipasi dalam Survei Korban Kejahatan Internasional yang menghasilkan statistik yang dianggap lebih dapat diandalkan daripada data dari departemen kepolisian.

Polisi di berbagai negara menggunakan definisi berbeda untuk

kejahatan umum seperti pemerkosaan, pencurian, dan perampokan. Juga, beberapa pasukan polisi lebih berhati-hati dalam merekam insiden dan meneruskan data mereka ke kantor pusat daripada yang lain. Perbedaan dalam praktik pencatatan dapat mempersulit perbandingan (misalnya, beberapa negara tidak mengikuti "aturan hierarki"), dan, tentu saja, kesediaan para korban untuk mengungkapkan masalah mereka kepada pihak berwenang bervariasi secara dramatis dari satu tempat ke tempat lain.

5.9 Bahan Diskusi

1. Menurut Anda apa yang akan membantu keluarga dan orang-orang terkasih dari korban pembunuhan untuk mengatasinya?
2. Jenis kejahatan properti apa yang menurut Anda memiliki dampak jangka panjang pada korban? Mengapa?
3. Apakah Anda percaya bahwa ada kejahatan tanpa korban? Mengapa atau mengapa tidak?
4. Apakah Anda berpikir bahwa kejahatan yang dibahas dalam bab ini adalah tanpa korban? Jelaskan jawabanmu.
5. Pilih beberapa statistik yang disajikan dalam bab ini dan interpretasikan dengan dua cara: Pertama, buat mereka seakan mungkin seterang mungkin; dan kedua, gambarkan mereka sejeles mungkin.
6. Jenis informasi apa tentang korban kekerasan interpersonal dan pencurian yang dapat ditemukan dalam laporan polisi? Apa sumber ketidakakuratan dalam statistik ini?
7. Jenis informasi apa tentang korban kekerasan dan pencurian antarpribadi yang dapat ditemukan di sumber lain selain laporan polisi? Apa sumber ketidakakuratan dalam statistik ini?
8. Informasi apa tentang orang-orang yang terluka atau terbunuh

oleh pelaku tidak dikumpulkan secara sistematis oleh UCR dan NCVS, atau bahkan NIBRS? Mengapa informasi tambahan ini penting? Bagaimana itu bisa digunakan dan masalah apa yang bisa menjelaskannya?

9. Buatlah beberapa skenario hipotetis di mana orang-orang dengan kepentingan pribadi dalam meyakinkan publik bahwa tingkat viktimisasi naik atau turun bisa "berbelanja" untuk statistik UCR atau NCVS tentang perampokan atau pencurian untuk mendukung klaim mereka.
10. Cari tahu definisi dan kata-kata yang tepat dari pertanyaan yang diajukan di NCVS dengan mengunduh instrumen survei dari Situs web BJS. Diskusikan bagaimana pertanyaan tentang penyerangan yang diperburuk, pemerkosaan, dan penyerangan seksual lainnya diungkapkan, dan mengapa responden mungkin bingung atau tidak jelas tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- American Gaming Association. (2017). Retrieved from www.americangaming.org/
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). (2017). *Dog fighting*. Retrieved from www.aspc.org/animal-cruelty/dog-fighting
- Ayala, J., & White, J. (2008). *Operation spotlight*. Arlington, TX: Arlington Police Department. Retrieved from [www.popcenter.org/library/awards/goldstein/2008/08-01\(F\).pdf](http://www.popcenter.org/library/awards/goldstein/2008/08-01(F).pdf)
- Belleville, G., Marchand, A., St-Hilaire, M. H., Martin, M., & Silva, C. (2012). *PTSD and depression following armed robbery: Patterns of appearance and impact on absenteeism and use of health care services*. *Journal of Traumatic Stress*, 25(4), 465–468.
- Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). *Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults*. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(5), 748–766.
- Brown, B. B., & Harris, P. B. (1989). *Residential burglary victimization: Reactions to the invasion of a primary territory*. *Journal of Environmental Psychology*, 9, 119–132.
- Bureau of Justice Statistics. (2017). *Drugs and crime facts*. Retrieved from www.bjs.gov/content/DCF/enforce.cfm
- Caballero, M. A., Ramos, L., & Saltijeral, M. T. (2000). *Posttraumatic stress dysfunction and other reactions of the victims of house burglary*. *Salud Mental*, 23, 8–17.
- Campbell, R. (2014). *Intentional fires report*. *National Fire Protection Association*. Retrieved from www.nfpa.org/news-and-research/fire-statistics-and-reports/fire-statistics/fire-causes/arson-and-juvenile-firesetting/intentional-fires

- Chapkis, W. (2003). *Trafficking, migration, and the law: Protecting innocents, punishing Immigrants*. *Gender & Society*, 17(6), 923–937.
- Doka, K. J. (Ed.). (1996). *Living with grief after sudden loss*. Washington, DC: Hospice Foundation of America.
- Elklit, A. (2002). *Acute stress disorder in victims of robbery and victims of assault*. *Journal of Interpersonal Violence*, 17(8), 872–887.
- Estes, R. J., & Weiner, N. A. (2002). *The commercial sexual exploitation of children in the U. S. Canada and Mexico: Full Report (of the U.S. National Study)*. University of Pennsylvania School of Social Work Center for the Study of Youth Policy. Retrieved from www.thenightministry.org/070_facts_figures/030_research_links/060_homeless_youth/CommercialSexualExploitationofChildren.pdf
- Farrell, G., & Pease, K. (1993). *Once bitten, twice bitten: Repeat victimization and its implications for crime prevention (Crime Prevention Unit Paper No. 46)*. London, UK: Home Office.
- Farrell, G., Tseloni, A., & Pease, K. (2005). *Repeat victimization in the ICVS and the NCVS*. *Crime Prevention and Community Safety: An International Journal*, 7(3), 7–18.
- Federal Bureau of Investigation (FBI). (2015). *Crime in the United States*. Retrieved from <https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2015/crime-in-the-u.s.-2015>
- Federal Bureau of Investigation (FBI). (2017). *Offense definitions*. Retrieved from www.ucrdatatool.gov/offenses.cfm
- Federal Emergency Management Agency (FEMA). (1997) *Arson victims: Suggestions for a system response*. Washington, DC. Retrieved from www.fapsonline.com/sites/default/files/Arson%20Victims_0.pdf
- Fichera, G. P., Fattori, A., Neri, L., Musti, M., Coggiola, M., & Costa, G. (2014). *Post-traumatic stress disorder among bank employee victims of robbery*. *Occupational Medicine*, 65(4), 283–289.
- Flowers, R. B. (2001). *Runaway kids and teenage prostitution: America's lost, abandoned and sexually exploited children*. Westport, CT: Praeger Publishing.

- Folino, J. O., & Abait, P. E. (2009). *Pathological gambling and criminality*. *Current Opinions in Psychiatry*, 22(5), 477–481.
- Fowlkes, M. R. (1990). *The social regulation of grief*. *Sociological Forum*, 5, 635–652.
- Gottfredson, M. R. (1984). *Victims of crime: The dimension of risk (Home Office Research Study 81)*. London: Home Office.
- Hansen, M., & Elklit, A. (2011). *Predictors of acute stress disorder in response to bank robbery*. *European Journal of Psychotraumatology*, 2(supp).
- Hearnden, I., & Magill, C. (2004). *Decision-making by house burglars: Offender's perspectives (pp. 1–6)*. Research, Development, and Statistics Directorate Findings 249, London: Home Office.
- Hindelang, M., Gottfredson, M., & Garafalo, J. (1978). *Victims of personal crime*. Cambridge, MA: Ballinger.
- The Humane Society of the United States. (2017). *Dog fighting fact sheet*. Retrieved from www.humanesociety.org/issues/dogfighting/facts/dogfighting_fact_sheet.html
- Jones, C. A. (2002). *Victim perspective of bank robbery trauma and recovery*. *Traumatology*, 8(4), 191–204.
- Kempadoo, K. (2005). *Trafficking and prostitution reconsidered: New perspectives on migration, sex work, and human rights*. St. Paul: Paradigm Publishers.
- Kilpatrick, D. G., & Otto, R. K. (1987). *Constitutionally guaranteed participation in criminal proceedings for victims: Potential effects on psychological functioning*. *Wayne Law Review*, 34, 7–28.
- Klinger, K. (2003, January/February). *Prostitution humanism and a woman's choice*. *Humanist*, 63(1), 16–21.
- Kubler-Ross, E. (1969). *On death and dying*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Kuo, L. (2003). *Prostitution policy: Revolutionizing practice through a gendered perspective*. New York, NY: NYU Press.
- Lauritsen, J. L., & Davis-Quinet, K. F. (1995). *Repeat victimization among adolescents and young adults*. *Journal of Quantitative Criminology*, 11(2), 143-166.

- Lauritsen, J. L., & White, N. (2014). *Seasonal patterns in criminal victimization trends*. Special Report. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. NCJ 245959.
- Lord, J. H. (1987). *No time for goodbyes*. Berkeley, CA: Pathfinder.
- Magee, D. (1983). *What murder leaves behind: The victim's family*. New York: Dodd, Mead.
- Maguire, M. (1980). *The impact of burglary upon victims*. *British Journal of Criminology*, 3, 261–275.
- Mawby, R. I., & Walklate, S. (1997). *The impact of burglary: A tale of two cities*. *International Review of Victimology*, 4, 267–295.
- Miller, J. (1993). *Your life is on the line every night you're on the streets: Victimization and the resistance among prostitutes*. *Humanity and Society*, 17(4), 422–446.
- National Crime Information Center (NCIC). (2017). <https://archives.fbi.gov/archives/about-us/cjis/ncic/ncic-missing-person-and-unidentified-person-statistics-for-2013>
- National Fire Protection Association. (2017). Retrieved from www.nfpa.org/
- National Insurance Crime Bureau. (2017). Retrieved from www.nicb.org/
- Office for Victims of Crime. (2017). Retrieved from www.ovc.gov/
- Orth, U. (2009). *The effects of legal involvement on crime victims' psychological adjustment*. In M. E. Oswald, S. Bieneck, & J. Hupfeld-Heinemann (Eds.), *Social psychology of punishment of crime* (pp. 427–442). Chichester, UK: Wiley- Blackwell.
- Osborn, D. R., Ellingworth, D., Hope, T., & Trickett, A. (1996). *Are repeatedly victimized households different?* *Journal of Quantitative Criminology*, 12, 223–245.
- Osborn, D. R., & Tseloni, A. (1998). *The distribution of household property crimes*. *Journal of Quantitative Criminology*, 14(3), 307–330.
- Ostrihanska, Z., & Dobrochna, W. (1993). *Burglaries as seen by the victims*. *International Review of Victimology*, 2, 217–225.
- Ousey, G. C., Wilcox, P., & Brummel, S. (2008). *Déjà vu all over again:*

- Investigating temporal continuity of adolescent victimization.* Journal of Quantitative Criminology, 24, 307–336.
- Parents of Murdered Children. (2017). *Survivors of homicide victims*. Retrieved from www.pomc.com/survivors.html
- Parsons, J., & Bergin, T. (2010). *The impact of criminal justice involvement on victims' mental health.* Journal of Traumatic Stress, 23, 182–188.
- Pease, K. (1998). *Repeat victimization: Taking stock (Crime Detection and Prevention Series No. 90)*. London: Home Office.
- Polvi, N., Looman, T., Humphries, C., & Pease, K. (1990). *Repeat break and enter victimization: Time course and crime prevention opportunity.* Journal of Police Science and Administration, 17, 8–11.
- Powers, T. (2016, January 4). *The effects addiction has on family members.* The Jennifer Act. <http://thejenniferact.com/2016/01/04/the-effects-addiction-has-on-family-members/>
- Pynoos, I. L. S., & Eth, S. (1984). *The child as witness to homicide.* Journal of Social Issues 40(2), 87–108.
- Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Douglas, J. E. (1988). *Sexual homicide: Patterns and motives.* New York: Free Press.
- Sales, E., Baum, M., & Shore, B. (1984). *Victim readjustment following assault.* Journal of Social Issues, 40, 117–136.
- Schlosser, E. (1997, September). *A grief like no other.* Atlantic Monthly, 37–76.
- Schur, E. (1965). *Crimes without victims: Deviant behavior and public policy.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Sprang, M. V., McNeil, I. S., & Wright, R., Jr. (1989). *Psychological changes after the murder of a significant other.* Social Casework, 70(3), 159–164.
- Spungen, D. (1998). *Homicide: The hidden victims. A guide for professionals.* Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stitt, B. G. (1988). *Victimless crime: A definitional issue.* Journal of Crime and Justice, 11(2), 87–102.
- Stitt, B. G., Nichols, M., & Giacompassi, D. (2003). *Does the presence of casinos*

- increase crime? An examination of casino and control communities.* Crime and Delinquency, 49(2), 253–284. Tseloni, A., & Pease, K. (2003). *Repeat personal victimization: Boost or flags?* British Journal of Criminology, 43, 196–212.
- Weitzer, R. (2007). *The social construction of sex trafficking: Ideology and institutionalization of a moral crusade.* Politics and Society, 35(3), 447–475.
- Weitzer, R. (2010). *The mythology of prostitution: Advocacy research and public policy.* Sexuality Research and Social Policy, 7(1), 15–29.
- Wohlfarth, T. D., Van den Brink, W., Winkel, F. W., & Ter Smitten, M. (2003). *Screening for posttraumatic stress disorder: An evaluation of two self-report scales among crime victims.* Psychological Assessment, 15, 101–109.
- Yap, M. B. H., & Devilly, G. J. (2004). *The role of perceived social support in crime victimization.* Clinical Psychology Review, 24(1), 1–14.